

PROSPEKTUS

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	: 22 September 2016
Tanggal Penyertaan Pendaftaran HMETD menjadi Efektif	: 25 November 2016
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	: 7 Desember 2016
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum+Right</i>)	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 2 Desember 2016
Pasar Tunai	: 7 Desember 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 5 Desember 2016
Pasar Tunai	: 8 Desember 2016
Distribusi HMETD	: 8 Desember 2016

JADWAL

Periode Perdagangan HMETD	: 9 Desember 2016 s/d 16 Desember 2016
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	: 9 Desember 2016 s/d 16 Desember 2016
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 14 Desember 2016 s/d 20 Desember 2016
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 20 Desember 2016
Tanggal Penjatahan	: 21 Desember 2016
Periode penyerahan saham Hasil Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 22 Desember 2016
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 22 Desember 2016
Periode Pendistribusian Waran Seri II	: 9 Desember 2016 s/d 20 Desember 2016
Periode Perdagangan Waran Seri II di Bursa Efek Indonesia	: 9 Desember 2016 – 8 Juni 2018
Periode Pelaksanaan Waran Seri II	: 9 Juni 2017 s/d 11 Juni 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN YANG MATERIAL DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha

Kegiatan umum di bidang perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung BRI AGRO
JL. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740
Telp. (021) 79199980 Fax. (021) 79199950
Website www.briagro.co.id
Email: corpsec@briagro.co.id

16 Kantor Cabang, 18 Kantor Cabang Pembantu dan 4 Kantor Kas di kota-kota di Indonesia

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VI

Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua) saham baru yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 7 Desember 2016 dimana setiap pemilik 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham Perseroan akan memperoleh 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham, dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp499.979.495.860,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh Rupiah).

Bersamaan dengan PMHMETD ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus tiga) Waran Seri II yang mewakili 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD ini dilaksanakan. Waran Seri II akan diterbitkan bersamaan dengan saham hasil pelaksanaan HMETD mulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016 secara cuma-cuma dibagikan kepada pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya. Setiap 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD akan memperoleh 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Waran Seri II. Setiap 1 (satu) Waran Seri II dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar harga sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham dalam periode pelaksanaan yakni 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD dan Waran Seri II ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dan Waran Seri II dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan jumlah sebanyak-banyak Rp436,14 miliar, sesuai Pernyataan tanggal 25 Agustus 2016 dengan demikian dengan memperhatikan harga pelaksanaan HMETD maka akan mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya sejumlah 3.354.766.910 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) saham. Jika Saham dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

PMHMETD YANG DISERTAI WARAN SERI II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DIPEROLEHNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 9 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN 16 DESEMBER 2016. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 9 DESEMBER 2016. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 16 DESEMBER 2016 SETELAH TANGGAL TERSEBUT, MAKA HMETD TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN ATAU GUGUR DEMI HUKUM.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

DALAM HAL PARA PEMEGANG SAHAM MINORITAS TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA MAKA PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA MAKSIMUM SEBESAR 25,32% (DUA PULUH LIMA KOMA TIGA PULUH DUA PERSEN)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD DAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENTIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGHADAPI RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2016.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD yang disertai Waran Seri II kepada OJK di Jakarta melalui surat No. B.23/Dir.01/SKP/X/2016 pada tanggal 17 Oktober 2016 dan surat No. B.07/Dir.01/SKP/X/2016 pada tanggal 4 November 2016 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**POJK No. 32/2015**) serta surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-695/D.04/2016 tanggal 25 November 2016 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam rangka PMHMETD ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD ini, semua pihak, termasuk pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya sesuai Pernyataan tanggal 12 Oktober 2016.

Jika Saham dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik, maka saham-saham tersebut tidak akan dikeluarkan dalam portepel.

Saham hasil PMHMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki Surat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**SBHMETD**) dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PMHMETD INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		ii
DEFINISI DAN SINGKATAN		iii
RINGKASAN PROSPEKTUS		vii
I	PENAWARAN UMUM	1
II	PENGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN WARAN SERI II	15
III	PERNYATAAN UTANG	16
IV	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
V	ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
1	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA OPERASIONAL	25
2	TINJAUAN KEUANGAN	29
3	KONDISI KEUANGAN	32
4	KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL	38
5	RASIO KEUANGAN	39
6	BELANJA MODAL	41
7	MANAJEMEN RISIKO	42
VI	FAKTOR RISIKO	46
VII	KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	49
VIII	KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	50
1	KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA	50
A.	RIWAYAT PENCATATAN SAHAM PERSEROAN	50
B.	PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	50
C.	PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	52
D.	SUMBER DAYA MANUSIA	61
E.	KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN PENYERTAAN	65
F.	TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFLIASI	65
G.	TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	66
H.	PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	67
I.	ASURANSI	74
J.	ASET TETAP PERSEROAN	74
K.	DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN	75
L.	DIAGRAM PENGAWASAN PERSEROAN	75
2	KEGIATAN USAHA	75
A.	STRATEGI PERSEROAN	75
B.	UNIT BISNIS UTAMA	76
C.	TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI (TSI)	77
D.	KOMUNIKASI PEMASARAN	78
E.	JARINGAN DAN LAYANAN	79
F.	PENGELOLAAN RISIKO DAN KEPATUHAN	82
G.	GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	84
H.	TANGGUNG JAWAB SOSIAL	84
I.	HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	85
3	KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA	85
A.	PROSPEK USAHA	85
B.	TINGKAT KESEHATAN BANK	91
C.	PERSAINGAN USAHA	93
IX	EQUITAS	95
X	KEBIJAKAN DIVIDEN	97
XI	PERPAJAKAN	98
XII	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	101
XIII	TATACARA PEMESANAN SAHAM	103
XIV	PENYEBARAN PROSPEKUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	109

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	Berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Aset Produktif	:	Berarti terdiri dari Penempatan Pada Bank Lain, Wesel dan tagihan lainnya, Surat berharga, Kredit Yang Diberikan, Tagihan Akseptasi dan Penyertaan Saham.
ALCO	:	Berarti singkatan dari <i>Assets and Liabilities Committee</i> , yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aset dan liabilitas, yang diketuai oleh Direktur Utama dan bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas.
API	:	Berarti singkatan dari Arsitektur Perbankan Indonesia.
ATM	:	Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi <i>teller</i> seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan peminahbukan.
ATMR	:	Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko besar yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Otoritas, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio</i> CAR).
Anggota Bursa	:	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk menggunakan sistem dan/atau sarana BEI dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di BEI sesuai dengan peraturan BEI.
BAE	:	Berarti Biro Administrasi Efek.
Bank Kustodian	:	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK)	:	Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tanggal 30 Desember 2005 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2010, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
BEI atau Bursa Efek Indonesia	:	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BI	:	Berarti singkatan dari Bank Indonesia.
BLBI	:	Berarti singkatan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.
BMPK	:	Berarti singkatan dari Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank yang diberikan kepada nasabah perorangan atau grup sesuai dengan ketentuan BI.
BPPN	:	Berarti singkatan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional yaitu badan khusus yang didirikan

dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.

BUMN	:	Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Negara.
BUMD	:	Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah.
CAR	:	Berarti singkatan dari <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
<i>Coverage Ratio</i>	:	Berarti rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.
DPK	:	Berarti singkatan dari Dana Pihak Ketiga.
DPS	:	Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham yang merupakan daftar yang disusun oleh Biro Administrasi Efek yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI dan pemegang saham yang sahamnya dalam bentuk warakat dan tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
Entitas Anak	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai PSAK yang berlaku di Indonesia.
<i>Fee Based Income</i>	:	Berarti terdiri dari provisi dan komisi selain dari provisi dan komisi atas kredit yang diberikan, laba selisih kurs – bersih, dan pendapatan operasional lainnya – lain-lain.
GCG	:	Berarti singkatan dari <i>Good Corporate Governance</i> .
GWM	:	Berarti singkatan dari Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Harga Pelaksanaan	:	Harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dalam PMHMETD untuk melaksanakan haknya menjadi 1 (satu) saham baru, yaitu Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Bursa	:	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek Indonesia melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia tersebut.
Hari Kerja	:	Berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan atau dihindari oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
HMETD	:	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli saham baru, Perseroan dan bilamana HMETD dilaksanakan oleh pemegangnya untuk membeli saham baru dalam PMHMETD ini yang bersangkutan akan memperoleh Waran Seri II yang dapat dikonversikan menjadi saham Perseroan.
IAPI	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Kredit Yang Diberikan	:	Berarti kredit yang diberikan (tidak termasuk piutang pembiayaan konsumen) setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan, kecuali dinyatakan lain.
KSEI	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian	:	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
LDR	:	Berarti singkatan dari <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio jumlah kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Masyarakat	:	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Menkumham RI	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Modal Inti (Tier 1)	:	Berarti modal bank yang terdiri dari modal inti utama (Common Equity Tier 1) yang mencakup modal disetor, cadangan tambahan modal (disclosed reserve) dan modal inti tambahan (Additional Tier 1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
Modal Pelengkap (Tier 2)	:	Berarti modal pelengkap bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
NIM	:	Berarti singkatan dari <i>Net Interest Margin</i> yaitu marjin pendapatan bunga bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata aset produktif.
NPL	:	Berarti singkatan dari <i>Non Performing Loan</i> , yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan BI.
Obligasi Pemerintah	:	Berarti obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
<i>Payment Point</i>	:	Berarti kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara Perseroan dengan pihak lain yang merupakan nasabah Perseroan.
PDN	:	Berarti singkatan dari Posisi Devisa Netto, yaitu angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: (i) selisih bersih antara aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan (ii) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam Rupiah.
Pemegang Saham Utama	:	Berarti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
Peraturan KSEI	:	Berarti peraturan KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat keputusan Bapepam dan LK No. S-6953/BL/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal Persetujuan atas rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya, dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
Periode Perdagangan	:	Berarti periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Pernyataan Efektif	:	Berarti telah diterimanya surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Perseroan yang memberitahukan bahwa OJK tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut secara tertulis terhadap Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 UUPM juncto Peraturan OJK No. 32/ 2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Perseroan	:	Berarti PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (Bank BRI AGRO) suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan melakukan PMHMETD.
Perusahaan Efek	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
PPA	:	Berarti Penyisihan Penghapusan Aset, adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas aset produktif (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, Macet), sesuai ketentuan BI.
Prospektus	:	Berarti dokumen penawaran sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 26 UUPM.
POJK No. 32/2014	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 30/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No. 32/2015	:	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
PSAK	:	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rasio NPL	:	Berarti kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan penggolongan kolektibilitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Rekening Efek	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dengan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham HMETD	:	Berarti seluruh saham hasil pelaksanaan HMETD yang merupakan saham baru yang diperoleh oleh pemegang HMETD dalam PMHMETD yaitu sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) per saham.
Saham Lama	:	Berarti saham biasa atas nama Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
SBHMETD	:	Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD.
SBI	:	Berarti singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia, yaitu surat berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto.
TERP	:	Berarti <i>Theoretical Ex-Right Price</i> atau Harga Pasar Teoritis.
Tanggal Terakhir Pelaksanaan HMETD	:	Berarti tanggal 16 Desember 2016
USD	:	Berarti Dolar Amerika Serikat.
Undang-Undang Perbankan	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
UUPM	:	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 Tambahan No. 3608, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
UUPT	:	Berarti Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007 Tambahan No. 4756, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari.
Usaha Kecil	:	Berarti usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
Waran Seri II	:	Berarti efek yang diterbitkan Perseroan dan didistribusikan secara cuma-cuma kepada pemegang HMETD telah melaksanakan HMETD-nya dalam PMHMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan pada periode pelaksanaan Waran Seri II dengan membayar harga pelaksanaan.

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Ĭ KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. ("**Perseroan**") didirikan tahun 1989 dengan nama PT Bank Agroniaga berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 27 September 1989, dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 27 tanggal 23 Oktober 1989, keduanya dibuat di hadapan Raden Soekarsono, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-10019.HT.01.01-TH.89, tertanggal 28 Oktober 1989, dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor 2484/1989 dan Nomor 2485/1989 tanggal 3 November 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96, tanggal 1 Desember 1989, Tambahan Berita Negara Nomor 3303. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1347/KMK.013/1989 tanggal 11 Desember 1989 dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 22/1037/Upps/PSbD tanggal 26 Desember 1989. Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 2 Desember 2002 di hadapan Notaris Siti Rayhana, S.H., pengganti dari B.RAY. Mahyastoeti Notonagoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 24 Desember 2002, dengan Surat Keputusan No. C-24779.HT.01.04.TH.2002, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9, Tambahan No. 881 tanggal 31 Januari 2003. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 16 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor: AHU-46794.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69, Tambahan No. 15961 tanggal 26 Agustus 2008.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya terkait dengan perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.30 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Rusnaldy, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-30947.AH.01.02 tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 7 Juni 2012. Sehubungan dengan perubahan nama ini, maka izin usaha Perseroan telah disesuaikan berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 14/72/KEP.GBI/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang perubahan izin usaha atas nama PT Bank Agroniaga Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Perubahan modal dasar Perseroan yang terakhir dimuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 167, tanggal 18 Juni 2015, dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0937628.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66, tanggal 18 Agustus 2015, Tambahan No. 29782. Sedangkan perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan yang terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran No. 68 tanggal 14 Juli 2015, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, SH, Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0951264 tanggal 14 Juli 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3533252.AH.01.09.Tahun 2015 Tanggal 14 Juli 2015.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 30 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 167, tanggal 18 Juni 2015 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68, tanggal 14 Juli 2015, keduanya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH, MKn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Modal Dasar	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.013.470.929	1.001.347.092.900	87,23
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	9,10
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	421.266.405	42.126.640.500	3,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.479.715.698	1.147.971.569.800	100,00
Saham Dalam Portepel	13.520.284.302	1.352.028.430.200	-

PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran	:	HMETD dengan disertai Waran Seri II
Jumlah Saham PMHMETD	:	3.845.996.122 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam seratus dua puluh dua) saham baru
Jumlah Waran Seri II	:	616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan seratus tiga) Waran Seri II
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah)
Harga Pelaksanaan Waran Seri II	:	Sama dengan harga pelaksanaan HMETD
Rasio PMHMETD	:	3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham Perseroan akan memperoleh 1.122 (seribu seratus dua puluh dua)
Rasio Waran Seri II	:	1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD akan memperoleh 239 (dua ratus tiga puluh sembilan)
Dilusi Kepemilikan	:	25,32 % dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan dan seluruh Waran Seri II dilaksanakan.
Pencatatan	:	BEI

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan jumlah sebanyak-banyak Rp436,14 miliar, sesuai Pernyataan tanggal 25 Agustus 2016 dengan demikian dengan memperhatikan harga pelaksanaan HMETD maka akan mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya sejumlah 3.354.766.910 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) saham.

Jika Saham dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi seluruh pemegang HMETD melaksanakan HMETD-nya untuk membeli saham Perseroan dalam PMHMETD.

	Sebelum PMHMETD			Setelah PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.013.470.929	1.001.347.092.900	87,23	13.368.237.839	1.336.823.783.900	87,23
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	9,10	1.395.072.638	139.507.263.800	9,10
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	421.266.405	42.126.640.500	3,67	562.401.343	56.240.134.300	3,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.479.715.698	1.147.971.569.800	100,00	15.325.711.820	1.532.571.182.000	100,00
Saham Dalam Portepel	13.520.284.302	1.352.028.430.200	-	9.674.288.180	967.428.818.000	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD dengan asumsi seluruh Waran Seri II seluruhnya dikonversi menjadi saham baru Perseroan.

	Setelah PMHMETD			Setelah Konversi Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.368.237.839	1.336.823.783.900	87,23	13.906.351.458	1.390.635.145.800	87,23
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.395.072.638	139.507.263.800	9,10	1.451.228.699	145.122.869.900	9,10
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	562.401.343	56.240.134.300	3,67	585.039.766	58.503.976.600	3,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.325.711.820	1.532.571.182.000	100,00	15.942.619.923	1.594.261.992.300	100,00
Saham Dalam Portepel	9.674.288.180	967.428.818.000	-	9.057.380.077	905.738.007.700	-

Jumlah Waran Seri II yang diterbitkan dalam PMHMETD ini sebanyak-banyaknya 616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus tiga) dengan demikian sebesar 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD ini yakni sebesar 11.479.715.698 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan) Saham. Waran Seri II dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia untuk periode 9 Desember 2016 sampai dengan 8 Juni 2018 dan dapat dilaksanakan untuk membeli saham untuk periode konversi Waran Seri II pada tanggal 9 Juni 2017 s/d 11 Juni 2018.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi hanya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan jumlah sebanyak-banyak Rp436,14 miliar, sesuai Pernyataan tanggal 25 Agustus 2016 dengan demikian dengan memperhatikan harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp130,- per saham maka akan mengambil bagian sejumlah 3.354.766.910 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) saham.

	Sebelum PMHMETD			Setelah PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.013.470.929	1.001.347.092.900	87,23	13.368.237.839	1.336.823.783.900	90,12
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	9,10	1.044.978.364	104.497.836.400	7,04
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	421.266.405	42.126.640.500	3,67	421.266.405	42.126.640.500	2,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.479.715.698	1.147.971.569.800	100,00	14.834.482.608	1.483.448.260.800	100,00
Saham Dalam Portepel	13.520.284.302	1.352.028.430.200	-	10.165.517.391	1.016.551.739.100	-

Dengan jumlah PMHMETD Sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam seratus dua puluh dua) saham baru. Dengan demikian para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi kepemilikan dalam Perseroan setelah pelaksanaan HMETD sebesar-besarnya sebesar 22,61% (dua puluh dua koma enam puluh satu persen) setelah PMHMETD.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD dengan asumsi hanya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang melaksanakan HMETD-nya untuk membeli saham Perseroan dan Waran Seri II yang diterbitkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dikonversi menjadi saham baru Perseroan.

	Setelah PMHMETD			Setelah PMHMETD dan Konversi Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.368.237.839	1.336.823.783.900	90,12	13.906.351.458	1.390.653.1485.800	90,46
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	7,04	1.044.978.364	104.497.836.400	6,80
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	421.266.405	42.126.640.500	2,84	421.266.405	42.126.640.500	2,74
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.834.482.608	1.483.448.260.800	100,00	15.372.596.227	1.537.259.622.700	100,00
Saham Dalam Portepel	10.165.517.392	1.016.551.739.200	-	9.627.403.733	962.740.373.300	-

Jumlah Waran Seri II yang diterbitkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejumlah 538.138.668 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan) dengan asumsi dalam PMHMETD hanya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang melaksanakan HMETD-nya dengan jumlah maksimum sebesar Rp436,14 miliar dengan jumlah saham yang dibeli sebanyak 3.354.766.910 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) saham.

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan demikian tidak berhak atas Waran Seri II maka akan mengalami dilusi maksimum sebesar 25,32% (dua puluh lima koma tiga puluh dua persen) setelah periode pelaksanaan HMETD dan setelah periode pelaksanaan Waran Seri II.

Keterangan selengkapnya mengenai HMETD yang disertai Waran Seri II dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

A. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD dan Waran Seri II ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD dan Waran Seri II akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yang selanjutnya sesuai rencana akan digunakan seluruhnya untuk mendukung pertumbuhan kredit.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD yang disertai Waran Seri II dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

B. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi Risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Risiko Operasional
- Risiko Kredit
- Risiko Pasar mencakup Risiko Tingkat Suku Bunga dan Risiko Valuta Asing
- Risiko Likuiditas
- Risiko Operasional yang mencakup Risiko proses internal, Risiko manusia, Risiko sistem, Risiko eksternal
- Risiko Strategik
- Risiko Hukum
- Risiko Reputasi

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua Risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing Risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus. Penjelasan atas risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

Risiko Terkait Kepemilikan Saham

Disamping Risiko yang dihadapi oleh Perseroan, kegiatan usaha dan industri Perseroan, kepemilikan saham mengandung risiko-risiko di bawah ini:

1. Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas Saham.
2. Harga Saham Perseroan dapat berfluktuasi.
3. Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut.
4. Kemampuan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam PMH/MTD di masa yang akan datang mungkin terbatas.
5. Pembeli atau pemegang saham mungkin menghadapi pembatasan tertentu sehubungan dengan hak pemegang saham minoritas.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko terkait kepemilikan saham Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

C. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Pada tanggal prospektus diterbitkan, Perseroan terlibat dalam beberapa perkara perdata, perkara sengketa konsumen, perkara niaga, perkara tata usaha negara, perkara pidana yang diuraikan pada Bab VIII. 1.H pada halaman 66 s/d 73

D. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, dan ditandatangani oleh Yasir, Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703, dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

(dalam ribuan Rupiah kecuali ROA, ROE, LDR, NPL dan CAR dalam persentase)

Keterangan	Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016		Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
			2015	2014
Jumlah Aset	9.402.340.250	8.364.502.563	6.388.305.061	
Jumlah Liabilitas	7.999.174.983	7.012.090.138	5.493.624.199	
Jumlah Ekuitas	1.403.165.267	1.352.412.425	894.680.862	
Pendapatan Bunga	441.648.505	786.709.562	598.344.410	
Beban Bunga	(251.545.588)	(430.938.429)	(339.152.201)	
Pendapatan Bunga – Neto	190.102.917	355.771.133	259.192.209	
Pendapatan Operasional Lainnya	44.446.598	55.231.685	39.889.880	
Beban Operasional Lainnya	(101.787.088)	(211.198.040)	(181.691.611)	
Laba Operasional	57.161.610	95.694.134	77.528.142	
Laba Tahun Berjalan	47.003.242	80.491.880	59.407.934	
ROA (%) *)	1,51%	1,55%	1,47%	
ROE (%) *)	6,97%	7,65%	7,05%	
LDR (%)	91,01%	87,15%	88,49%	
Rasio CAR (Tier 1)	18,62%	21,02%	17,98%	
Rasio CAR (Tier 2)	1,02%	1,10%	1,08%	
Rasio CAR (Total)	19,64%	22,12%	19,06%	
NPL – (Neto)	2,07%	1,32%	1,32%	
NPL – (Bruto)	3,24%	1,90%	2,02%	

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini, Laporan Keuangan Perseroan yang untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, dapat dilihat selengkapnya melalui website Perseroan dan/atau website Bursa Efek Indonesia

*) Rasio 30 Juni 2016 tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya

C. KEBIJAKAN DIVIDEN

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pasal 24 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diatur dalam hal Perseroan diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif maka Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS.

Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan Dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan.

Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru.

Ringkasan Kebijakan Dividen Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

D. TATACARA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD Perseroan, sesuai dengan Akta 41 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dan Akta nomor 22 tanggal 18 November 2016 tentang Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk keduanya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 7 Desember 2016 dimana setiap pemilik 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham Perseroan akan memperoleh 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham melalui pelaksanaan HMETD baik untuk saham yang dititipkan dalam penitipan kolektif KSEI maupun pemegang saham warant. Setiap 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD akan memperoleh 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Waran Seri II. Setiap 1 (satu) Waran Seri II dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar harga sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham dalam periode pelaksanaan yakni 9 Juni 2017 s/d 11 Juni 2018.

Keterangan selengkapnya mengenai tatacara pemesanan pembelian saham dapat dilihat pada Bab XIII dalam Prospektus ini

E. KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DENGAN WARAN SERI II

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sesuai dengan Akta Risaalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, Akta No. 47 tanggal 22 September 2016 dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua) saham baru yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 7 Desember 2016 dimana setiap pemilik 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham Perseroan akan memperoleh 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham.

Bersamaan dengan PMHMETD ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus tiga) Waran Seri II yang mewakili 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD ini dilaksanakan. Waran Seri II akan diterbitkan bersamaan dengan saham hasil pelaksanaan HMETD mulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 8 Juni 2018 secara cuma-cuma dibagikan kepada pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya. Setiap 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD akan memperoleh 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Waran Seri II. Setiap 1 (satu) Waran Seri II dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar harga sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham dalam periode pelaksanaan yakni 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD dan Waran Seri II ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dan Waran Seri II dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dan Waran Seri II dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan Efek tersebut akan dijual oleh Perseroan.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai peraturan No. 32/POJK.04/2015 selama 5 (Lima) Hari Bursa mulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 16 Desember 2016. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 9 Desember 2016, tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 16 Desember 2016, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Waran Seri II akan dicatitkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 8 Juni 2018. Pencatatan Saham Hasil Konversi Waran Seri II akan dilakukan di BEI pada tanggal 9 Desember 2016, tanggal terakhir pelaksanaan Waran Seri II adalah tanggal 11 Juni 2018, sehingga Waran Seri II yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dan Waran Seri II ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatitkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham seri lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Ketentuan yang harus diperhatikan dan penjelasan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Keterangan lebih lanjut mengenai HMETD dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

I. PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua) saham baru yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 7 Desember 2016 dimana setiap pemilik 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham Perseroan akan memperoleh 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham, dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp499.979.495.860,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh Rupiah).

Bersamaan dengan PMHMETD ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus tiga) Waran Seri II yang mewakili 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD ini dilaksanakan. Waran Seri II akan diterbitkan bersamaan dengan saham hasil pelaksanaan HMETD mulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016 secara cuma-cuma dibagikan kepada pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya. Setiap 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD akan memperoleh 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Waran Seri II. Setiap 1 (satu) Waran Seri II dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar harga sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham dalam periode pelaksanaan yakni 9 Juni 2017 s/d 11 Juni 2018.

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan jumlah sebanyak-banyak Rp436,14 miliar, sesuai Pernyataan tanggal 25 Agustus 2016 dengan demikian dengan memperhatikan harga pelaksanaan HMETD maka akan mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya sejumlah 3.354.766.910 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) saham. Jika Saham dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD dan Waran Seri II ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dan Waran Seri II dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Jika Saham dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.



PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK

Kegiatan Usaha:

Kegiatan umum di bidang perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat Operasi :

Gedung BRI AGRO
JL. Warung Jati Barat No. 139 Jakarta 12740
Telp. (021) 79199980 Fax. (021) 79199950
Website www.briagro.co.id
Email: corpsec@briagro.co.id

16 Kantor Cabang, 18 Kantor Cabang Pembantu dan 4 Kantor Kas di kota-kota di Indonesia

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAKNI KETIDAKMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI KREDIT YANG DIBERIKAN PERSEROAN DAN APABILA JUMLAHNYA CUKUP MATERIAL, MAKA HAL INI AKAN MENGAKIBATKAN MENURUNNYA KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.

RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PUT VI, DAPAT TERJADI BILAMANA RENCANA PERSEROAN UNTUK MENINGKATKAN PROSENTASE KEPEMILIKAN PUBLIK TIDAK DAPAT TERLAKSANA.

KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2014 pada tanggal 22 September 2016 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Risalah Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, No. 47 tanggal 22 September 2016 dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah diumumkan melalui surat kabar Investor Daily tanggal 23 September 2016, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.briagro.co.id seluruhnya pada tanggal 23 September 2016, sebagai berikut :

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan PMHMETD sesuai dengan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, No. 47 tanggal 22 September 2016 dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan.

1. Menyetujui Penambahan Modal Perseroan Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), dengan demikian mengeluarkan saham baru dari portepel Perseroan yang disertai Waran Seri II. Jumlah saham baru hasil pelaksanaan PMHMETD yang disertai Waran Seri II dengan jumlah seluruhnya sebanyak-banyaknya 4.465.150.218 (empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu dua ratus delapan belas) saham
2. Sehubungan dengan usulan agenda tersebut diatas, memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD yang disertai penerbitan Waran Seri II dengan memperhatikan seluruh peraturan perundangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas :
 - a) menetapkan jumlah saham yang akan ditawarkan termasuk penetapan jumlah penerbitan Waran Seri II dengan ketentuan jumlah saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri II tidak melebihi 35% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum pelaksanaan PMHMETD (sesuai yang diatur dalam pasal 6 Peraturan OJK no 32/POJK.04/2015).
 - b) menetapkan harga pelaksanaan HMETD dan harga pelaksanaan Waran Seri II dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
 - c) Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI dan persyaratannya, melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD yang disertai dengan penerbitan Waran Seri II.
3.
 - a) Selanjutnya sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD dan konversi Waran Seri II, karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - b) Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dan mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar termasuk untuk menyusun kembali pasal 4 anggaran dasar dengan akta-akta tersendiri dihadapan Notaris, selanjutnya mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Jenis Penawaran	: HMETD dengan disertai Waran Seri II
Jumlah Saham PMHMETD	: 3.845.996.122 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam seratus dua puluh dua) saham baru
Jumlah Waran Seri II	: 616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus tiga) Waran Seri II
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan HMETD	: Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah)
Harga Pelaksanaan Waran Seri II	: Sama dengan harga pelaksanaan HMETD
Rasio PMHMETD	: 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham Perseroan akan memperoleh 1.122 (seribu seratus dua puluh dua)
Rasio Waran Seri II	: 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD akan memperoleh 239 (dua ratus tiga puluh sembilan)
Dilusi Kepemilikan	: 25,32 % dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan dan seluruh Waran Seri II dilaksanakan.
Pencatatan	: BEI

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD dan Waran Seri II ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dan Waran Seri II dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan jumlah sebanyak-banyaknya Rp436,14 miliar, sesuai Pernyataan tanggal 25 Agustus 2016 dengan demikian dengan memperhatikan harga pelaksanaan HMETD maka akan mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya sejumlah 3.354.766.910 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) saham.

Jika Saham dalam PMHMETD ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham porsi publik maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

PENCATATAN SAHAM DAN WARAN SERI II YANG DITERBITKAN PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Perseroan akan mencatatkan saham baru yang berasal dari PMHMETD di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Desember 2016 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam seratus dua puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau 33,50% (tiga puluh tiga koma lima puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebelum pelaksanaan PMHMETD.

Selain itu Waran Seri II akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Desember 2016 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus tiga) Waran Seri II yang mewakili 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tanggal 30 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 167, tanggal 18 Juni 2015 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 14 Juli 2015, keduanya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Jakarta Selatan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut

	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.013.470.929	1.001.347.092.900	87,23
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	9,10
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	421.266.405	42.126.640.500	3,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.479.715.698	1.147.971.569.800	100,00
Saham Dalam Portepel	13.520.284.302	1.352.028.430.200	-

PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dengan sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua) saham baru yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 7 Desember 2016 dimana setiap pemilik 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham Perseroan akan memperoleh 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) HMETD.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi seluruh pemegang HMETD melaksanakan HMETD-nya untuk membeli saham Perseroan dalam PMHMETD.

	Sebelum PMHMETD			Setelah PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.013.470.929	1.001.347.092.900	87,23	13.368.237.839	1.336.823.783.900	87,23
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	9,10	1.395.072.638	139.507.263.800	9,10
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	421.266.405	42.126.640.500	3,67	562.401.343	56.240.134.300	3,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.479.715.698	1.147.971.569.800	100,00	15.325.711.820	1.532.571.182.000	100,00
Saham Dalam Portepel	13.520.284.302	1.352.028.430.200	-	9.674.288.180	967.428.818.000	-

Sedangkan jumlah Waran Seri II yang diterbitkan dalam PMHMETD ini sebanyak-banyaknya 616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus tiga) dengan demikian sebesar 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD ini yakni sebesar 11.479.715.698 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan) Saham.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD dengan asumsi seluruh Waran Seri II seluruhnya dikonversi menjadi saham baru Perseroan.

	Setelah PMHMETD			Setelah Konversi Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.368.237.839	1.336.823.783.900	87,23	13.906.351.458	1.390.635.145.800	87,23
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.395.072.638	139.507.263.800	9,10	1.451.228.699	145.122.869.900	9,10
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	562.401.343	56.240.134.300	3,67	585.039.766	58.503.976.600	3,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.325.711.820	1.532.571.182.000	100,00	15.942.619.923	1.594.261.992.300	100,00
Saham Dalam Portepel	9.674.288.180	967.428.818.000	-	9.057.380.077	905.738.007.700	-

Sesuai Pernyataan tanggal 25 Agustus 2016 Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan jumlah sebanyak-banyak Rp436,14 miliar, dengan demikian struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD dengan asumsi hanya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan demikian dengan memperhatikan harga pelaksanaan HMETD sebesar Rp130,- per saham maka akan mengambil bagian sejumlah 3.354.766.910 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) saham adalah sebagai berikut :

	Sebelum PMHMETD			Setelah PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.013.470.929	1.001.347.092.900	87,23	13.368.237.839	1.336.823.783.900	90,12
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	9,10	1.044.978.364	104.497.836.400	7,04
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	421.266.405	42.126.640.500	3,67	421.266.405	42.126.640.500	2,84
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.479.715.698	1.147.971.569.800	100,00	14.834.482.608	1.483.448.260.800	100,00
Saham Dalam Portepel	13.520.284.302	1.352.028.430.200	-	10.165.517.391	1.016.551.739.100	-

Para pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami dilusi kepemilikan dalam Perseroan setelah pelaksanaan HMETD sebesar-besarnya sebesar 22,61 % (dua puluh dua koma enam puluh satu persen) setelah PMHMETD.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD dengan asumsi hanya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang melaksanakan HMETD-nya untuk membeli saham Perseroan dan Waran Seri II yang diterbitkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dikonversi menjadi saham baru Perseroan.

	Setelah PMHMETD			Setelah PMHMETD dan Konversi Waran Seri II		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp100,-)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	13.368.237.839	1.336.823.783.900	90,12	13.906.351.458	1.390.653.1485.800	90,46
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	7,04	1.044.978.364	104.497.836.400	6,80
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	421.266.405	42.126.640.500	2,84	421.266.405	42.126.640.500	2,74
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.834.482.608	1.483.448.260.800	100,00	15.372.596.227	1.537.259.622.700	100,00
Saham Dalam Portepel	10.165.517.392	1.016.551.739.200	-	9.627.403.733	962.740.373.300	-

Jumlah Waran Seri II yang diterbitkan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sejumlah 538.113.691 (lima ratus tiga puluh delapan juta seratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh satu) dengan asumsi dalam PMHMETD hanya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang melaksanakan HMETD-nya dengan jumlah maksimum sebesar Rp436,14 miliar dengan jumlah saham yang dibeli sebanyak 3.354.766.910 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh) saham.

Dalam kondisi tersebut, para pemegang saham tidak melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan demikian tidak berhak atas Waran Seri II maka akan mengalami dilusi maksimum sebesar 25,32% (dua puluh lima koma tiga puluh dua persen) setelah periode pelaksanaan HMETD dan setelah periode pelaksanaan Waran Seri II.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 16 Desember 2016 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POJK No. 32/2015.

KETERANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU YANG DISERTAI WARAN SERI II

Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh dua) saham baru yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 7 Desember 2016 dimana setiap pemilik 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham Perseroan akan memperoleh 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham, dengan asumsi seluruh HMETD dilaksanakan untuk membeli saham maka Perseroan akan memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp499.979.495.860,-(empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh Rupiah).

Bersamaan dengan PMHMETD ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus tiga) Waran Seri II yang mewakili 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD ini dilaksanakan. Waran Seri II akan diterbitkan bersamaan dengan saham hasil pelaksanaan HMETD mulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016 secara cuma-cuma dibagikan kepada pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya. Setiap 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD akan memperoleh 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Waran Seri II. Setiap 1 (satu) Waran Seri II dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar harga sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham dalam periode pelaksanaan yakni 9 Juni 2017 s/d 11 Juni 2018.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham dalam rangka PMHMETD ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 16 Desember 2016 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POUK No. 32/2015..

Pemegang Saham Utama Perseroan yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. akan melaksanakan HMETD yang menjadi haknya dengan jumlah sebanyak-banyak Rp436,14 miliar, sesuai Pernyataan tanggal 25 Agustus 2016 dengan demikian dengan memperhatikan harga pelaksanaan HMETD maka akan mengambil bagian HMETD yang menjadi haknya sejumlah 3.354.766.910 (tiga miliar tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh)saham.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD dan Waran Seri II ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dan Waran Seri II dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat diperdagangkan selama masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan sistem pemindahbukuan HMETD antar Pemegang Rekening Efek di KSEI.

Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1. Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Desember 2016 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endosemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
 - Harga Pelaksanaan HMETD = Rp b
 - Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD = A
 - Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD = B
 - Harga teoritis Saham setelah PMHMETD = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
- Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah = Rp c
= Rp a - Rp c

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI II

Bersamaan dengan PMHMETD ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus tiga) Waran Seri II yang mewakili 5,37% (lima koma tiga puluh tujuh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD ini dilaksanakan. Waran Seri II akan diterbitkan bersamaan dengan saham hasil pelaksanaan HMETD mulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016 secara cuma-cuma dibagikan kepada pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya.

Setiap 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD akan memperoleh 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Waran Seri II. Setiap 1 (satu) Waran Seri II dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar harga sebesar Rp.130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham dalam periode pelaksanaan yakni 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018 Waran Seri II yang tidak digunakan untuk membeli saham Perseroan sampai dengan masa akhir masa berlakunya Waran Seri II yakni tanggal 11 Juni 2018 maka Waran Seri II akan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai serta tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan dengan demikian gugur demi hukum.

Seluruh persyaratan dan ketentuan Waran Seri II sebagaimana diatur dalam Akta No. 02 tanggal 03 November 2016 tentang Pernyataan Penerbitan Waran Seri II dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan.

Beberapa Ketentuan Waran Seri II yang harus diperhatikan dalam penerbitannya, sebagai berikut:

a. Definisi

- Waran Seri II berarti surat waran atau surat kolektif Waran Seri II yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham hasil pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II.
- Surat Kolektif Waran Seri II adalah surat bukti pemilikan sejumlah Waran Seri II dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri II serta keterangan lain sehubungan Waran Seri II tersebut.
- Pelaksanaan Waran berarti pelaksanaan hak beli saham baru oleh Pemegang Waran Seri II.
- Harga pelaksanaan berarti harga yang ditetapkan untuk melaksanakan Waran Seri II menjadi saham Perseroan atau Harga Pelaksanaan Waran Seri II baru apabila terjadi penyesuaian.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri II dan memberikan kepada pemegangnya yang sah suatu hak yang sama dengan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. Hak Atas Waran Seri II

Setiap 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD akan memperoleh 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Waran Seri II, dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri II berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri II dengan membayar Harga Pelaksanaan Waran Seri II sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah).

Waran Seri II akan diterbitkan pada tanggal yang sama dengan saham hasil pelaksanaan HMETD yakni pada periode tanggal 2 Desember 2016 s/d 13 Desember 2016 kepada pemegang HMETD yang telah melaksanakan HMETD menjadi saham baru Perseroan selama periode pelaksanaan HMETD dalam rangka PMHMETD.

Waran Seri II yang diterbitkan adalah Waran Seri II atas nama yang tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri II dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama periode perdagangan Waran Seri II yakni 9 Desember 2016 sampai dengan 11 Juni 2018.

Waran Seri II dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan mulai tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri II dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bilamana Waran Seri II sampai dengan tanggal akhir pelaksanaan Waran Seri II yakni tanggal 11 Juni 2018 maka waran menjadi kadaluarsa, dan tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan. Dengan demikian waran menjadi tidak berlaku lagi, tidak memiliki nilai dan pemegang waran tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99,0% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di bursa efek. Saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sejumlah 159.426.199 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam seratus sembilan puluh sembilan) saham yang merupakan saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan demikian setiap pemegang Waran Seri II dapat melaksanakan haknya untuk membeli saham baru Perseroan terkait ketentuan telah dipenuhinya 1% (satu persen) dari jumlah modal

ditempatkan dan disetor penuh yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1999.

c. Pemegang Waran

Pemegang Waran adalah pemegang saham baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka PMHMETD yang dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri II dan selanjutnya pemegang Waran Seri II yang memperoleh Waran Seri II melalui perdagangan Waran Seri II di Bursa Efek Indonesia pada periode perdagangan Waran Seri II.

d. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap pemegang Waran Seri II dapat melakukan pelaksanaan Waran Seri II dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bagi pemegang Waran Seri II yang warannya berada dalam *system* penitipan kolektif KSEI maka untuk pelaksanaan hak pembelian saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri II dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelolaan efeknya kepada KSEI.
- 2) Bagi pemegang Waran Seri II dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri II pelaksanaan Waran Seri II dilaksanakan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan untuk pengelolaan administrasi Waran Seri II sebagaimana diatur dalam Akta No.43 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga dan Akta No.22 Tanggal 18 November 2016 Tentang Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. serta Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, Akta No. 21 tanggal 18 November 2016. Keduanya dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan.

e. Jangka Waktu Waran

Jangka Waktu Waran Seri II adalah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri II di Bursa Efek Indonesia yaitu sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan 11 Juni 2018.

f. Pemberitahuan Atas Perubahan Pernyataan Waran Seri II

Dengan memperhatikan Pasal 7 Peraturan No. 32/POJK.04/2015, Perseroan dilarang melakukan penyesuaian jumlah waran kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi perubahan jumlah waran akibat pemecahan saham atau penggabungan saham maka Perseroan akan melakukan sebagai berikut:

- 1) Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang melakukan pemecahan saham atau penggabungan saham wajib memuat penyesuaian waran dengan perhitungan secara proporsional terhadap jumlah Waran Seri II yang beredar sebelum pelaksanaan pemecahan atau penggabungan saham.
- 2) Perseroan wajib mengumumkan rencana perubahan Waran Seri II melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.briagro.co.id yang meliputi :
 - a) Akta Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri II yang dibuat dihadapan Notaris.
 - b) Jumlah rasio Waran Seri II lama terhadap Waran Seri II baru yang telah disesuaikan.
 - c) Tanggal Daftar Pemegang Waran Seri II lama yang berhak atas penyesuaian Waran Seri II baru.
 - d) Tanggal pendistribusian Waran Seri II yang telah disesuaikan.
 - e) Tanggal akhir perdagangan Waran Seri II lama.
 - f) Tanggal awal dimulainya perdagangan Waran Seri II baru yang telah disesuaikan

g. Periode Perdagangan Waran Seri II

Periode perdagangan Waran Seri II adalah setiap hari bursa terhitung sejak tanggal pendistribusian Waran Seri II yakni mulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018.

h. Periode Pelaksanaan Waran Seri II

Periode Pelaksanaan Waran Seri II adalah setiap hari bursa sejak 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendistribusian Waran Seri II yakni 9 Juni 2017 sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya yakni tanggal 11 Juni 2018.

Pemegang Waran Seri II berhak untuk melaksanakan sebagian atau seluruh Waran Seri II dengan membeli saham baru Perseroan dengan ketentuan 1 (satu) Waran Seri II berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham selama Periode Pelaksanaan Waran Seri II yakni 9 Juni 2017 sampai dengan 11 Juni 2018.

Bilamana Waran Seri II sampai dengan tanggal akhir Periode Pelaksanaan Waran Seri II yakni tanggal 11 Juni 2018 tidak menggunakan Waran Seri II untuk membeli saham baru Perseroan, maka sejak tanggal 11 Juni 2018 waran menjadi kadaluarsa, dan tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan. Dengan demikian waran menjadi tidak berlaku lagi, tidak memiliki nilai dan dengan demikian pemegang waran tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada Perseroan. Sejak tanggal 11 Juni 2018 Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta Pemegang Waran Seri II tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

i. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri II

1) *Untuk Waran Dalam Penitipan Kolektif KSEI*

Bagi pemegang Waran Seri II yang warannya berada dalam sistem penitipan kolektif KSEI maka untuk pelaksanaan hak untuk membeli saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri II dilakukan dengan memberikan instruksi melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian yang ditunjuk sebagai pengelolaan efeknya kepada KSEI.

2) *Untuk Waran Dalam Bentuk Warkat*

Bagi pemegang Waran Seri II dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Waran Seri II pelaksanaan Waran Seri II dilaksanakan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan untuk pengelolaan administrasi Waran Seri II sebagaimana diatur dalam Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.41 tanggal 14 Oktober 2016 dan Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Nomor 22 tanggal 18 November 2016 serta Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, Akta No. 43 tanggal 14 Oktober 2016 dan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri II PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.21 tanggal 18 November 2016.

Pada setiap hari kerja Senin – Jumat, pada Pukul 09.00 s/d 15.00 WIB Pemegang Waran Seri II dapat melaksanakan Waran Seri II dengan mengisi formulir pelaksanaan Waran Seri II dengan melampirkan :

- (i) Sertifikat Kolektif Waran Seri II atas nama pemegang Waran Seri II,
- (ii) *Copy* Dokumen Pemegang Waran Seri II,
 - *Untuk Badan Usaha*
 - Fotokopi anggaran dasar dan akta pengurus yang terakhir
 - Fotokopi jati diri yang masih berlaku dari pengurus yang mewakili
 - Surat kuasa bilamana pengurusan dikuasakan
 - *Untuk Perorangan*
 - Fotokopi jati diri yang masih berlaku (KTP/Paspor)
- (iii) Bukti pembayaran harga pelaksanaan Waran Seri II

Saham hasil pelaksanaan Waran Seri II tersedia dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan Waran Seri II dapat diambil dengan menunjukkan formulir Pelaksanaan Waran Seri II yang telah ditandatangani dan distempel oleh petugas Biro Administrasi Efek pada saat pelaksanaan Waran Seri II.

j. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri II

Pemegang Waran Seri II yang akan melaksanakan Waran Seri II menjadi saham dapat melakukan pembayaran sesuai harga pelaksanaan dengan menggunakan cek, bilyet giro, transfer dan pemindahan-bukuan ataupun setoran tunai yang harus *in good funds* pada rekening bank Perseroan sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
Kantor Pusat Operasional (KPO)
A/C No. 0010-01-000156.99.9
Atas nama : PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk – PMHMETD 1

Bilamana terdapat biaya bank yang timbul dalam rangka pelaksanaan Waran Seri II, maka seluruh biaya menjadi tanggungan pemegang Waran Seri II.

k. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri II

Dengan memperhatikan Pasal 7 Peraturan No. 32/POJK.04/2014, Perseroan dilarang melakukan penyesuaian jumlah Waran kecuali dalam hal terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham. Dalam hal terjadi perubahan jumlah waran akibat pemecahan saham atau penggabungan saham maka Perseroan akan melakukan penetapan Jumlah Waran Seri II baru dan harga pelaksanaan Waran Seri II baru.

Dalam hal perhitungan Waran Seri II baru mengakibatkan pecahan, maka Perseroan akan melakukan pembulatan keatas.

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat dari pemecahan nilai nominal (stock split) atau penggabungan nilai nominal (reverse stock) maka,

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{NB} \times X}{N}$$

$$\text{Jumlah Waran Seri II Baru} = \frac{\text{NL} \times W}{\text{NB}}$$

NB = harga nominal baru setiap saham

NL = harga nominal lama setiap saham

N = harga saham

X = harga pelaksanaan Waran Seri II lama

W = jumlah keseluruhan Waran Seri II baru

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal baru yang diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.briagro.co.id).

l. Daftar pemegang Waran Seri II

Pengelola Administrasi Waran Seri II telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan pencatatan Daftar Pemegang Waran Seri II baik Waran Seri II yang berada dalam sistem penyimpanan KSEI maupun yang dalam bentuk Warkat.

Pengelola Administrasi Waran Seri II juga bertugas untuk melaksanakan pencatatan transaksi perdagangan Waran Seri II di Bursa Efek yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri II untuk kepentingan Perseroan.

m. Pengelola Administrasi Waran Seri II

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri II yakni :

Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220
Telp. (021) 5709009 Fax. (021) 5709009
deone@datindo.com

Pengelola Administrasi Waran Seri II bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran

Seri II sehubungan dengan transaksi perdagangan Waran Seri II di Bursa Efek Indonesia yang mencakup pengalihan dan pencatatan hasil transaksi termasuk diantaranya Pelaksanaan Waran Seri II demi kepentingan Perseroan.

n. Peralihan Hak Atas Waran Seri II

Hak atas Waran Seri II dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum transaksi jual beli, hibah, maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri II.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri II karena jual beli di Bursa Efek Indonesia, akan terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri II sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri II karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri II atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri II beralih menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perseroan melalui Pengelolaan Administrasi Waran Seri II yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri II dengan mengajukan bukti-bukti mengenai haknya tersebut dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelolaan Administrasi Waran Seri II dapat menerima dan menyetujui keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk peralihan hak atas Waran.

Jikalau hak atas Waran Seri II pindah tangan karena Warisan atau karena sebab-sebab lain menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang bersama-sama mempunyai hak atas Waran Seri II tersebut diwajibkan menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak wakil itu yang diberikan oleh hukum kepada Waran Seri II tersebut. Peralihan hak atas Waran Seri II harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Waran Seri II maupun pada Surat Kolektif Waran yang bersangkutan. Peralihan hak atas Waran Seri II baru berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri II yang bersangkutan.

o. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri II

Jika ada Surat kolektif Waran Seri II yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Direksi Perseroan atau kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri II yang baru untuk menggantikan Surat Kolektif Waran Seri II yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan aslinya harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri II.

Jika ada Surat Kolektif Waran Seri II yang hilang atau musnah, maka untuk Surat Kolektif Waran Seri II tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri II yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dan dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri II serta diumumkan di Bursa Efek Indonesia, Pengelola Administrasi Waran Seri II berhak untuk menetapkan dan meminta jaminan-jaminan tentang pembuktian dan tentang penggantian kerugian pihak yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri II yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita Perseroan. Pengelola Administrasi Waran Seri II mewakili Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri II yang hilang atau rusak.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri II yang hilang atau rusak dipikul oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri II tersebut.

Asli Surat Kolektif Waran Seri II yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut, tidak berlaku lagi.

p. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Apabila pada Masa Laku Pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan dan/atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran.

q. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri II ini berada dan tunduk dibawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

r. Faktor yang Mempengaruhi Likuiditas Waran

Fluktuasi harga saham yang diperdagangkan di BEI merupakan faktor yang mempengaruhi likuiditas perdagangan Waran Seri II, disamping aksi korporasi maupun kinerja Perseroan di masa mendatang.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, PMHMETD telah disetujui oleh RUPSLB Perseroan yang diadakan pada tanggal 22 September 2016.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999, Perseroan hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99,0% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) dari jumlah modal disetor Perseroan yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di bursa efek, saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sejumlah 159.426.199 (seratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh enam seratus sembilan puluh sembilan) saham yang merupakan saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

HISTORIS HARGA SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis harga saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga tertinggi, harga terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK :

Bulan	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Total Volume Perdagangan
September 2016	352	328	41.705.200
Agustus 2016	332	306	31.257.800
Juli 2016	430	406	29.752.900
Juni 2016	312	254	167.273.600
Mei 2016	158	153	2.142.800
April 2016	189	165	17.771.200
Maret 2016	92	89	880.600
Februari 2016	93	87	2.102.600
Januari 2016	93	92	47.700
Desember 2015	99	95	113.600
November 2015	100	90	12.600
Oktober 2015	101	100	1.182.600
September 2015	80	79	115.600

*) sumber data situs website Bursa Efek Indonesia

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD INI, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN WARAN SERI II YANG AKAN DITERBITKAN KEPADA PARA PEMEGANG HMETD YANG TELAH MELAKSANAKAN HMETD-NYA UNTUK MEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD INI.

II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DAN WARAN SERI II

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD dan Waran Seri II ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PMHMETD akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yang selanjutnya sesuai rencana akan digunakan seluruhnya untuk mendukung pertumbuhan kredit.

Sesuai dengan Peraturan No. 30/POJK.04/2015 mengenai Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD diperkirakan berjumlah sekitar 0,173% dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD yang disertai penerbitan Waran Seri II.

Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya jasa akuntan publik sekitar 0%;
- Biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,029%;
- Biaya notaris sekitar 0,013%;
- Biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,038%;
- Biaya jasa akuntan publik penjabatan saham sekitar 0,01% dan
- Biaya percetakan dan biaya lain-lain sebesar 0,083%.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini dan akan melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut secara berkala kepada Pemegang Saham dalam RUPS Perseroan dan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan berencana mengubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari PMHMETD ini, setiap rencana yang menunjukkan perubahan tersebut wajib dilaporkan kepada OJK sebagai penjelasan atas perubahan yang diusulkan. Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas perubahan tersebut melalui RUPS sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan akan melakukan transaksi menggunakan dana yang diperoleh dari PMHMETD, dan transaksi tersebut merupakan transaksi material atau transaksi dengan pihak terafiliasi atau transaksi dengan benturan kepentingan, maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-614/BI/2011 serta Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/BI/2009.

Adapun aksi korporasi terakhir yang dilakukan Perseroan adalah Penawaran Umum Terbatas V pada tahun 2015 yakni penawaran sejumlah 5.588.085.883 (lima miliar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tiga) saham dengan harga nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, dana hasil Penawaran Umum Terbatas V tersebut telah digunakan seluruhnya sebagaimana laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. B.22/DIR.01/SKP/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 dengan uraian sebagai berikut:

(Jutaan Rupiah)

Jenis Penawaran Umum	Tanggal Efektif	Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum (Rp)			Realisasi Penggunaan Dana		Sisa Dana Hasil Penawaran Umum
		Jumlah Hasil Penawaran	Biaya Penawaran Umum	Hasil Bersih	Kredit	Total	
Penawaran Umum Terbatas V	13 Juli 2015	402.893,45	1.210,40	401.683,05	401.683,05	401.683,05	0,00

II. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan liabilitas berikut diambil dari Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dan ditandatangani oleh Yasir, Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan mencatat jumlah liabilitas sebesar Rp8.944,63 miliar yang terdiri dari (A) Liabilitas seperti tertera dalam neraca Perseroan sebesar Rp7.999,17 miliar dan (B) Kewajiban karena Komitmen dan Kontinjensi sebesar Rp945,46 miliar, dengan perincian sebagai berikut:

A. LIABILITAS

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	15.918.039
Simpanan nasabah	
Giro	634.189.917
Tabungan	394.408.696
Deposito berjangka	6.663.857.082
Simpanan dari bank lain	118.105.969
Liabilitas akseptasi	76.849.599
Utang pajak	14.400.044
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	33.948.902
Liabilitas lain-lain	47.496.735
Jumlah Liabilitas	7.999.174.983

Tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

B. KEWAJIBAN KARENA KOMITMEN DAN KONTIJENSI

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Kewajiban komitmen	937.483.066
Kewajiban kontinjensi	7.972.964
Jumlah Kewajiban Komitmen Kontinjensi	945.456.030
Jumlah Liabilitas dan Kewajiban Komitmen Kontinjensi	8.944.631.013

Komponen liabilitas Perseroan terutama berasal dari simpanan nasabah yaitu dalam bentuk deposito berjangka sebesar 83,31% (Delapan puluh tiga koma tiga puluh satu persen), tabungan sebesar 4,93% (Empat koma sembilan puluh tiga persen), giro sebesar 7,93% (Tujuh koma sembilan puluh tiga persen), simpanan dari bank lain sebesar 1,48% (Satu koma empat puluh delapan persen), liabilitas akseptasi sebesar 0,96% (Nol koma sembilan puluh enam persen) dan liabilitas Lain-lain sebesar 0,59% (Nol koma lima puluh sembilan persen) dari jumlah liabilitas.

LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp15,92 miliar dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Umum dan administrasi	10.619.561
Titipan transfer dan ATM	3.110.151
Personalia	994.717
Titipan dana pihak ketiga	15.717
Titipan lain-lain	1.177.893
Jumlah Liabilitas Segera	15.918.039

SIMPANAN DARI NASABAH

Simpanan pada tanggal 30 Juni 2016 yang berhasil dihimpun Perseroan adalah sebesar Rp7.692,46 miliar yang terdiri dari simpanan dalam mata uang Rupiah sebesar Rp7.498,16 miliar dan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar Rp194,30 miliar, serta simpanan pihak ketiga dan pihak berelasi sebagaimana terlihat dalam tabel-tabel berikut ini:

Simpanan dari Nasabah berdasarkan Jenis Simpanan dan Mata Uang Simpanan

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)	
	Jumlah	
Rupiah		
Giro	615.336.481	
Tabungan	394.408.696	
Deposito berjangka	6.488.410.520	
Sub Jumlah	7.498.155.697	
Dolar Amerika Serikat		
Giro	18.853.436	
Deposito berjangka	175.446.562	
Sub Jumlah	194.299.998	
Jumlah	7.692.455.695	

Simpanan dari Nasabah berdasarkan Status Nasabah dan Jenis Mata Uang

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)	
	Pihak Ketiga	Pihak Berelasi
Rupiah		
Giro	535.030.419	80.306.062
Tabungan	389.706.089	4.702.607
Deposito	6.356.943.858	131.466.662
Sub Jumlah	7.281.680.366	216.475.331
Dolar Amerika Serikat		
Giro	7.344.158	11.509.278
Deposito	175.446.562	-
Sub Jumlah	182.790.720	11.509.278
Jumlah	7.464.471.086	227.984.609

Giro

Saldo giro pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp634,19 miliar. Berdasarkan denominasi mata uang, saldo giro Perseroan dalam Rupiah adalah sebesar Rp615,34 miliar dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar 0,56% dan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat sebesar Rp18,85 miliar dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar 0,25%.

Tabungan

Saldo tabungan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp394,41 miliar dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar 3,60%.

Deposito Berjangka

Saldo deposito berjangka pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp6.663,86 miliar. Berdasarkan denominasi mata uang, saldo deposito berjangka Perseroan dalam Rupiah adalah sebesar Rp6.488,41 miliar dengan suku bunga rata-rata per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar 8,80% dan suku bunga rata-rata Dolar Amerika Serikat per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar 1,12%. Dengan rincian sebagai berikut;

Deposito Berjangka berdasarkan Jangka Waktu

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
<i>Deposits on Call</i>	503.660.691
Deposito	
1 bulan	3.320.283.738
3 bulan	2.454.604.500
6 bulan	141.498.974
12 bulan	68.362.617
Sub Jumlah	6.488.410.520
Dolar Amerika Serikat	
<i>Deposits on Call</i>	2.642.500
Deposito	
1 bulan	163.594.800
3 bulan	3.963.750
6 bulan	5.245.512
Sub Jumlah	175.446.562
Jumlah	6.663.857.082

Jumlah deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp150,59 miliar.

SIMPANAN DARI BANK LAIN

Jumlah saldo simpanan dari bank lain pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp118,11 miliar berupa *inter-bank call money* dalam Rupiah dengan suku bunga rata-rata Rupiah per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar 5,81% dan suku bunga rata-rata Dolar Amerika Serikat per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar 0,51%. Giro dengan suku bunga rata-rata Rupiah per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar 4,93%, dan deposito berjangka dengan suku bunga rata-rata Rupiah per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar 6,50%, dengan rincian sebagai berikut ini:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Pihak ketiga	78.468.469
Pihak berelasi	39.637.500
Jumlah	118.105.969

LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp33,95 miliar.

Rincian dari liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH (dalam ribuan Rupiah)
Program pemutusan hubungan kerja	31.860.368
Cadangan cuti besar	2.088.534
TOTAL LIABILITAS IMBALAN KERJA	33.948.902

Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja Perseroan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	30 Juni	31 Desember		
	2016	2015	2014	2013
Tingkat diskonto tahunan	7,90%	9,00%	8,30%	8,80%
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
Tingkat kematian	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat cacat jasmaniah	10,0% of TMI 2011	10,0% of TMI 2011	10,0% of TMI 2011	10,0% of TMI 2011
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun	56 tahun	56 tahun

LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp47,50 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Bunga yang masih harus dibayar	32.975.987
Cadangan liabilitas litigasi dan hasil pemeriksaan pajak	10.290.267
Bonus dan insentif	725.555
Pendapatan diterima dimuka	576.150
Setoran jaminan	56.500
Lain-lain	2.872.276
Jumlah	47.496.735

KEWAJIBAN KARENA KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan memiliki kewajiban karena komitmen sebesar Rp937,48 miliar dan kewajiban karena kontinjensi sebesar Rp7,97 miliar. Kewajiban komitmen merupakan fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan dan *letter of credits* yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan dalam rangka impor, sedangkan kewajiban kontinjensi merupakan garansi yang diterbitkan.

PERNYATAAN MANAJEMEN

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan hak-hak pemegang saham publik sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Seluruh liabilitas Perseroan pada tanggal laporan keuangan terakhir telah disajikan dan diungkapkan di dalam prospektus dan laporan keuangan. Selain informasi tersebut di atas, Perseroan tidak mempunyai liabilitas-liabilitas lain yang material yang belum diungkapkan dalam Prospektus ini.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang, manajemen Perseroan memiliki kesanggupan untuk dapat menyelesaikan keseluruhan liabilitas.

Setelah tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan.

Tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, beserta penjelasan mengenai persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilanggar, dan tindakan yang telah atau akan diambil oleh Perseroan termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi kredit.

Tidak terdapat keadaan lalai atas pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, termasuk perkembangan terakhir dari negosiasi dalam rangka restrukturisasi utang.

IV IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Dibawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan ditandatangani oleh Yasir, Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703 dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Aset			
Kas	52.056.291	21.344.659	40.106.030
Giro pada Bank Indonesia	467.382.917	591.846.039	374.577.940
Giro pada Bank lain	192.621.308	378.230.209	43.691.045
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	684.996.966	459.951.160	571.720.981
Efek-efek – neto	761.055.160	682.002.293	645.104.129
Kredit – neto	6.865.870.438	5.912.690.475	4.593.675.964
Tagihan akseptasi	76.849.599	27.533.167	22.419.241
Penyertaan saham	297.658	297.658	297.658
Aset tetap – neto	242.644.556	237.038.335	49.832.968
Aset pajak tangguhan	15.747.828	22.257.562	18.050.007
Agunan yang diambil alih – neto	182.375	299.025	339.125
Aset pajak tangguhan	15.747.828	22.257.562	18.050.007
Biaya dibayar dimuka dan aset lain-lain	42.635.154	31.011.981	28.489.973
Jumlah Aset	9.402.340.250	8.364.502.563	6.388.305.061
Liabilitas			
Liabilitas segera	15.918.039	19.362.789	14.334.620
Simpanan nasabah	7.692.455.695	6.862.051.180	5.206.253.466
Simpanan dari bank lain	118.105.969	3.889.698	164.579.782
Liabilitas akseptasi	76.849.599	27.533.167	22.419.241
Utang pajak	14.400.044	10.426.550	9.524.682
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	33.948.902	29.377.357	34.938.398
Liabilitas lain-lain	47.496.735	59.449.397	41.574.010
Jumlah Liabilitas	7.999.174.983	7.012.090.138	5.493.624.199
Ekuitas			
Modal saham	1.147.971.570	1.147.971.570	745.078.118
Tambahan modal disetor	75.915.828	75.915.828	77.116.982
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - setelah pajak tangguhan	(1.714.889)	(22.727.337)	(7.121.572)
(Kerugian) keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(2.433.294)	(785.868)	1.984.870
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	5.869.206	3.454.449	2.214.427
Belum ditentukan penggunaannya	177.556.846	148.583.783	75.408.037
Jumlah Ekuitas	1.403.165.267	1.352.412.425	894.680.862
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	9.402.340.250	8.364.502.563	6.388.305.061

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember	
	2016	2015 (Tidak Diaudit)	2015	2014
Pendapatan bunga	441.648.505	380.162.530	786.709.562	598.344.410
Beban bunga	(251.545.588)	(208.609.554)	(430.938.429)	(339.152.201)
Pendapatan bunga – neto	190.102.917	171.552.976	355.771.133	259.192.209
Pendapatan operasional lainnya	44.446.598	24.317.832	55.231.685	39.889.880
Beban operasional lainnya	(177.387.905)	(141.137.873)	(315.308.684)	(221.553.947)
Laba operasional	57.161.610	54.732.935	95.694.134	77.528.142
Pendapatan non operasional - neto	7.267.138	358.567	15.101.134	4.367.944
Laba sebelum pajak	64.428.748	55.091.502	110.795.268	81.896.086
Beban pajak	(17.425.506)	(14.740.423)	(30.303.388)	(22.488.152)
Laba Periode/ Tahun Berjalan	47.003.242	40.351.079	80.491.880	59.407.934
Pendapatan Komprehensif Lainnya				
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Pengkuran kembali atas program imbalan pasti	(2.196.568)	751.998	(3.694.317)	(236.420)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	549.142	(188.000)	923.579	59.105
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual	28.016.597	(1.721.981)	(20.807.687)	20.522.874
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(7.004.149)	430.495	5.201.922	(5.130.719)
Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain Periode/ Tahun Berjalan Setelah Pajak	19.365.022	(727.488)	(18.376.503)	15.214.840
Total Penghasilan Komprehensif Periode/ Tahun Berjalan	66.368.264	39.623.591	62.115.377	74.622.774
Laba Periode/ Tahun Berjalan per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	4,09	5,42	8,50	7,97

Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

	Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember	
	2016	2015 (Tidak Diaudit)	2015	2014
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan bunga, provisi, dan komisi	439.852.743	380.379.483	789.476.202	601.398.419
Pembayaran bunga, provisi, dan komisi	(245.937.758)	(209.543.611)	(422.546.511)	(335.303.724)
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	14.971.864	2.821.568	8.999.037	15.306.979
Pendapatan operasional lainnya	21.997.487	19.374.711	42.993.601	18.239.522
Pembayaran pajak penghasilan badan dan angsuran	(17.069.100)	(11.736.976)	(26.579.889)	(24.822.548)
Hasil penjualan agunan yang diambil alih	2.816.400	-	-	1.200.000
Beban operasional lainnya	(72.981.390)	(85.478.138)	(211.690.186)	(162.191.403)
Pendapatan non operasional - neto	271.108	4.167.244	15.903.092	2.935.086

Arus kas sebelum perubahan				
dalam aset dan liabilitas operasi	143.921.354	99.984.281	196.555.346	116.762.331
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				
Kredit yang diberikan	(1.013.588.285)	(697.336.912)	(1.424.104.753)	(1.036.331.867)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	149.982.728	657.337	(131.040.750)	-
Aset lain-lain	(10.646.007)	(17.998.521)	(1.030.068)	408.401
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	(3.455.176)	7.051.867	5.254.756	3.094.321
Giro	177.842.160	519.455.070	101.364.129	(294.459.419)
Tabungan	(57.418.666)	27.457.556	143.031.860	77.753.105
Deposito Berjangka	709.981.020	123.624.464	1.411.401.725	1.302.705.947
Simpanan dari bank lain	114.216.271	(39.909.945)	(160.690.084)	70.549.786
Liabilitas lain-lain	(21.257.862)	4.679.790	5.211.780	1.976.254
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	189.577.537	27.664.987	145.953.941	242.458.859
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penurunan (kenaikan) efek-efek yang tersedia untuk dijual	(232.532.377)	22.509.919	10.589.684	58.257.583
Penurunan (kenaikan) efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	15.231.428	(28.326.779)	63.880.809	(54.513.596)
Hasil penjualan aset tetap	207.515	-	174.015	232.859
Perolehan aset tetap	(11.183.267)	(159.966.882)	(194.938.564)	(27.992.168)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(228.276.701)	(165.783.742)	(120.294.056)	(24.015.322)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Pembagian laba untuk dividen	(15.615.421)	(6.076.112)	(6.076.112)	(10.278.181)
Penerimaan dari penerbitan saham	-	-	402.893.452	-
Biaya emisi saham	-	-	(1.201.154)	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(15.615.421)	(6.076.112)	395.616.186	(10.278.181)
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS PENGARUH PERUBAHAN KURS	(54.314.585)	(144.194.867)	421.276.071	208.165.356
MATA UANG ASING	-	-	-	(165.000)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE/ TAHUN	1.451.372.067	1.030.095.996	1.030.095.996	822.095.640
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE/ TAHUN	1.397.057.482	885.901.129	1.451.372.067	1.030.095.996
Kas dan Setara Kas akhir				

periode/ tahun terdiri dari:				
Kas	52.056.291	36.321.966	21.344.659	40.106.030
Giro pada Bank Indonesia	467.382.917	417.421.430	591.846.039	374.577.940
Giro pada bank lain	192.621.308	235.502.641	378.230.209	43.691.045
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	684.996.966	196.655.092	459.951.160	571.720.981
Total Kas dan Setara Kas	1.397.057.482	885.901.129	1.451.372.067	1.030.095.996

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Permodalan			
Rasio CAR (Tier 1)	18,62%	21,02%	17,98%
Rasio CAR (Tier 2)	1,02%	1,10%	1,08%
Rasio CAR (Total)	19,64%	22,12%	19,06%
Kualitas aset			
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif	2,67%	1,51%	1,64%
<i>Non Performing Loan</i> – bruto	3,24%	1,90%	2,02%
<i>Non Performing Loan</i> – neto	2,07%	1,32%	1,32%
CKPN terhadap aset produktif	2,22%	1,76%	1,78%
Rentabilitas			
<i>Return on Asset</i> (ROA) *)	1,51%	1,55%	1,47%
<i>Return on Equity</i> (ROE) *)	6,97%	7,65%	7,05%
<i>Net Interest Margin</i> (NIM) *)	4,27%	4,77%	4,62%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) *)	88,24%	88,63%	87,85%
Likuiditas			
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	91,01%	87,15%	88,49%
Kepatuhan			
a. Persentase Pelanggaran BMPK			
1) Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%
2) Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%
b. Persentase Pelampauan BMPK			
1) Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%
2) Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%
Giro Wajib Minimum			
a. GWM Utama Rupiah	6,60%	10,16%	8,16%
b. GWM Sekunder Rupiah	8,30%	7,92%	7,03%
c. GWM Valuta Asing	16,45%	60,67%	12,93%
Posisi Devisa Neto (PDN)	0,27%	4,35%	5,82%
Liabilitas terhadap total aset	85,08%	83,83%	85,99%
Liabilitas terhadap ekuitas	570,08%	518,49%	614,03%

*) Rasio 30 Juni 2016 tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya

V ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini audit tanpa modifikasi.

Pembahasan di bawah ini berisi prediksi kinerja ke depan dan mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda secara materiil dari yang diantisipasi dalam pernyataan-pernyataan untuk masa yang akan datang ini sebagai akibat dari faktor-faktor tertentu seperti yang dimaksud dalam Bab VI Risiko Usaha dan bagian lain dalam Prospektus ini.

Sesuai dengan PSAK di Indonesia, informasi tertentu untuk periode/ tahun yang ditetapkan bukan merupakan suatu acuan untuk kinerja keuangan Perseroan dan tidak bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menyesuaikan seluruh hal-hal yang terdapat di laporan keuangan Perseroan atau acuan kinerja lainnya, acuan likuiditas atau acuan lainnya yang sesuai dengan PSAK di Indonesia.

1. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA OPERASIONAL

Dibawah ini faktor-faktor utama yang telah mempengaruhi kinerja operasional Perseroan pada periode yang diungkapkan antara lain:

A. *Kondisi Ekonomi Makro*

Sebagai perusahaan keuangan yang memiliki peran sebagai lembaga intermediasi, kinerja Perseroan juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi. Pertumbuhan makro ekonomi yang baik akan memberikan peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan kredit Perseroan. Dengan peningkatan kegiatan ekonomi akan terjadi peningkatan jumlah transaksi yang harus dilayani, produk-produk baru yang dibutuhkan untuk pertumbuhan simpanan. Sebaliknya pertumbuhan kredit perbankan akan terpengaruh pada saat terjadinya perlambatan perekonomian yang dapat berdampak pada kinerja Perseroan.

Mengawali tahun 2016, Indonesia membangun optimisme untuk menghadapi setiap situasi ekonomi, baik global maupun domestik. Namun, mengingat kondisi ekonomi global yang masih rentan dengan krisis, maka kondisi ini mudah berubah-ubah. Pengaruh terbesar bagi ekonomi Indonesia di tahun 2016 antara lain perlambatan ekonomi Tiongkok dan masih rendahnya harga minyak. Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia, perlambatan di Tiongkok berarti memberi pengaruh pada kegiatan ekspor. Sedangkan terkait harga minyak yang menjadi referensi harga bagi komoditas lain, dengan nilai minyak yang rendah akan berimbas pada harga komoditas yang rendah. Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan koordinasi agar dapat menjaga fundamental ekonomi baik makro, moneter, maupun fiskal dengan mengoptimalkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang menjadi salah satu faktor penyokong pertumbuhan tahun 2016. Penyerapan APBN didorong untuk dilaksanakan pada awal tahun dimana proses lelang telah diizinkan untuk dilakukan sejak November 2015. Pada Januari 2016, beberapa proyek pekerjaan infrastruktur telah dimulai, antara lain oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Perhubungan.

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kegiatan usaha pada triwulan II-2016 tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang sebesar 18,40%, lebih tinggi dibandingkan 5,80% pada triwulan I-2016. Peningkatan kegiatan usaha terindikasi pada seluruh sektor, terutama sektor perdagangan, hotel & restoran (SBT 3,69%) dan sektor industri pengolahan (SBT 3,41%). Peningkatan kegiatan usaha ini dikonfirmasi oleh kenaikan volume penjualan yang didorong oleh meningkatnya permintaan khususnya dari dalam negeri, sejalan dengan faktor musiman.

Seiring dengan peningkatan kegiatan usaha, rata-rata kapasitas produksi terpakai pada triwulan II-2016 berada di level 77,01%, meningkat dibandingkan 75,75% pada triwulan sebelumnya. Penggunaan tenaga kerja dan

investasi juga terindikasi meningkat dengan SBT masing-masing sebesar 2,32% dan 10,82%, lebih tinggi dibandingkan 1,94% dan 6,10% pada triwulan I-2016.

Peningkatan kinerja dunia usaha juga terindikasi dari kinerja keuangan yang membaik. Saldo Bersih (SB) kondisi likuiditas dan rentabilitas dunia usaha pada triwulan II-2016 masing-masing tercatat sebesar 37,66% dan 38,96%, meningkat dari 34,75% dan 31,88% pada triwulan sebelumnya. Terkait pembiayaan, dunia usaha berpendapat bahwa akses terhadap kredit perbankan lebih mudah dibandingkan triwulan sebelumnya (SB 8,20%, naik dari 6,77% pada triwulan sebelumnya).

Kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan II-2016 mengalami ekspansi sebagaimana diindikasikan oleh SBT sebesar 3,41%, meningkat dibandingkan SBT periode sebelumnya yang berkontraksi sebesar -0,77%. Hal ini sejalan dengan nilai *Prompt Manufacturing Index* (PMI) triwulan II-2016 yang sebesar 52,38%, meningkat dibandingkan 46,69% pada triwulan I-2016. Berdasarkan komponen pembentuk PMI, ekspansi pada sektor industri pengolahan terutama disebabkan oleh ekspansi pada indeks volume produksi dan indeks persediaan barang jadi yang tercatat masing-masing sebesar 59,08% dan 52,42%.

Kegiatan usaha pada triwulan III-2016 diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi. Hal ini terindikasi dari SBT kegiatan usaha pada triwulan III-2016 yang sebesar 17,70%. Kegiatan usaha sektor industri pengolahan juga diperkirakan terus ekspansif pada triwulan III-2016 dengan SBT sebesar 3,53%. Ekspansi kegiatan usaha sektor industri pengolahan pada triwulan III-2016 terindikasi dari nilai *Prompt Manufacturing Index* (PMI) triwulan III-2016 sebesar 52,33%. Ekspansi sektor industri pengolahan terutama didorong oleh ekspansi indeks volume produksi dan indeks volume persediaan barang jadi masing-masing sebesar 59,37% dan 50,59% (*sumber situs web Bank Indonesia 11 Juni 2016 Survei Kegiatan Dunia Usaha*).

Bank Indonesia (BI) kembali merevisi proyeksi pertumbuhan kredit perbankan 2016. Otoritas moneter memperkirakan kredit perbankan hanya akan tumbuh pada kisaran 8,0% hingga 10% (*year on year/yo*y). Proyeksi ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yang tercatat pada rentang 11% sampai 12% (*sumber situs web Bank Indonesia 30 Juni 2016*).

B. Segmen Bisnis

Kinerja operasional Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 didukung oleh peningkatan margin aset terutama karena peningkatan komposisi portofolio kredit terhadap total aset dan pertumbuhan pendapatan operasional lainnya (*fee-based*). Pada tahun 2015 portofolio kredit Perseroan tercatat sebesar Rp5.912,69 miliar dan meningkat dibandingkan dengan pada tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp4.593,68 miliar. Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan penyaluran kredit dipengaruhi beberapa faktor, termasuk kemampuan untuk meningkatkan penghimpunan dana untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 total simpanan dari nasabah tercatat sebesar Rp7.692,46 miliar dan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp6.862,05 miliar atau sebesar 12,10 % dan penguatan modal melalui akumulasi saldo laba dimana pada 30 Juni 2016 laba bersih Perseroan tercatat sebesar Rp47,00 miliar dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sebesar Rp80,49 miliar dan tahun 2014 tercatat sebesar Rp59,41 miliar dengan demikian meningkat 35,49% untuk tahun 2015 serta fokus pada pengembangan bisnis di sektor agribisnis yang telah dilaksanakan Perseroan.

Di tahun 2015, Perseroan menyadari kemungkinan terjadinya perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal di atas, namun industri perbankan cukup optimis akan kestabilan ekonomi Indonesia. Di tahun 2015 dengan stabilitas keuangan yang tetap terjaga, ditopang oleh ketahanan sistem perbankan dan relatif terjaganya kinerja pasar keuangan.

Selain itu, dengan seluruh inisiatif yang telah dilakukan Perseroan seperti memperkuat sistem teknologi informasi, mengoptimalkan jaringan kantor, meningkatkan kualitas layanan, mengembangkan sumber daya manusia dan memanfaatkan potensi maupun dukungan dari pemegang saham serta mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, Perseroan akan terus fokus untuk mengembangkan keunggulan di sektor perkebunan dan ritel sambil terus meningkatkan bisnis *commercial banking* dan *corporate banking*-nya.

C. Marjin Bunga Bersih

Indikator makro ekonomi terutama suku bunga dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja Perseroan. Perubahan-perubahan indikator tersebut akan mempengaruhi kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan, mengingat aktivitas bisnis utama Perseroan adalah upaya untuk mencapai tingkat marjin yang maksimal yaitu selisih (*spread*) antara biaya dana, antara lain dari simpanan dan pendapatan yang diperoleh dari pemberian kredit. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tingkat marjin (*spread*) yang berhasil dicapai oleh Perseroan adalah sebesar 4,27% dan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar 4,77% dan tahun 2014 sebesar 4,62%. Hal tersebut terutama disebabkan karena persentase suku bunga dana lebih besar daripada persentase bunga kredit.

Perseroan memperkirakan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi dan tingginya marjin bunga bersih di Indonesia akan meningkatkan persaingan yang tidak saja berasal dari perbankan domestik tetapi juga bank asing. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia bahwa bank yang memiliki tingkat LDR yang lebih rendah dari 78% atau lebih tinggi dari 92% (jika CAR di bawah 14%) akan dikenakan tambahan GVM. Kondisi ini akan mendorong bank untuk meningkatkan suku bunga dana untuk memperoleh simpanan dari nasabah untuk menjaga tingkat LDR di bawah 92%, hal ini akan menekan marjin bunga bersih perbankan nasional yang pada akhirnya akan berdampak pada Perseroan. Tingkat LDR Perseroan pada tahun 2014 tercatat sebesar 88,49% dan pada tahun 2015 tercatat sebesar 87,15% dengan demikian diharapkan Perseroan dikemudian hari dapat mempertahankan *spread* tersebut sehingga dapat membukukan kinerja yang membaik ditengah kompetisi yang sangat ketat dalam bidang perbankan.

Perseroan memiliki fungsi Manajemen Risiko yang melakukan evaluasi, monitor dan melaporkan secara konsisten dan independen eksposur risiko suku bunga pada *trading book* dan *banking book*. Selain itu Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Management Committee*) yang menetapkan strategi pengelolaan risiko suku bunga, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko dengan menyetujui limit yang disesuaikan dengan kecukupan modal, kondisi keuangan secara menyeluruh, kondisi pasar dan prinsip kehati-hatian. Secara berkala Komite Manajemen Aset dan Kewajiban mengadakan forum diskusi yang berkaitan dengan tingkat suku bunga.

D. Biaya Pendanaan

Penghimpunan dana Perseroan untuk mendanai kegiatan operasionalnya terutama bersumber dari simpanan dana masyarakat Deposito, Tabungan dan Giro. Penghimpunan dana memiliki peran yang penting terhadap kemampuan Perseroan untuk meningkatkan portofolio kredit sekaligus memelihara marjin bunga bersih yang tinggi.

Simpanan dana masyarakat yang dicapai periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp7.692,46 miliar meningkat 12,10% dibandingkan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sebesar Rp6.862,05 miliar.

E. Langkah-langkah yang ditempuh Perseroan dalam meningkatkan kinerja Perseroan

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, Perseroan menerapkan strategi-strategi yang mendukung pertumbuhan Perseroan secara organik maupun non-organik, diantaranya adalah pengembangan produk baru, perluasan jaringan kerja (termasuk jaringan *e-channel*), peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan pertumbuhan bisnis, pengembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan operasional yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perseroan.

F. Kebijakan di Sektor Perbankan

Peraturan BI No.14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 mengenai Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mewajibkan bank-bank untuk memberikan kredit kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan minimal sebesar persentase yang diwajibkan secara bertahap sebagai berikut :

- (i) 2013 dan 2014 sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB)
- (ii) 2015 minimal sebesar 5%
- (iii) 2016 minimal sebesar 10%
- (iv) 2017 minimal sebesar 15%
- (v) 2018 minimal sebesar 20%

Peraturan BI No.18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bank Indonesia dan Peraturan BI No. 15/15/PBI//2013 tentang Giro wajib minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valas bagi Bank umum konvensional dan efektif 16 Maret 2016.

- (i) Bank wajib memenuhi GWM sebagai berikut, untuk Rupiah, GWM Primer sebesar 6,5% dari DPK Rupiah, GWM Sekunder sebesar 4% dari DPK Rupiah, sedangkan GWM LDR sebesar hasil perhitungan antara parameter disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR target (78%-92%) dengan memperhatikan KPMM Bank dan KPMM Insentif. Sedangkan GWM dalam valuta asing tidak berlaku terhadap GWM Sekunder dan GWM LDR.
- (ii) Perhitungan GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan dengan parameter LDR Target adalah 78% - 92%, KPMM Insentif sebesar 14%, Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 dan Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 sebagai berikut :
 - a) Jika LDR Bank lebih kecil dari batas bawah LDR Target maka GWM LDR dari DPK dalam Rupiah.
 - b) Jika LDR Bank lebih kecil dari Batas bawah LDR Target maka GWM LDR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah LDR Target dan LDR Bank, dan DPK Rupiah.
 - c) Jika LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank Lebih kecil dari KPMM insentif maka GWM LDR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara LDR Bank dan batas atas LDR Target, dan DPK Rupiah.
 - d) Jika LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif, maka GWM LDR Bank adalah sebesar 0% dari DPK Rupiah.

Selanjutnya dalam mengelola kebijakan untuk mendukung penyaluran kredit, Bank Indonesia menetapkan kisaran *safety level* rasio LDR sebesar 78% sampai 92%. Bank yang memiliki rasio LDR diluar kisaran tersebut akan dikenakan persyaratan cadangan tambahan yang berlaku efektif sejak 2 Desember 2013. Sehubungan dengan hal tersebut Bank harus memiliki alternatif pembiayaan baik melalui pinjaman antar bank dan pengelolaan kas jangka pendek.

Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menghadapi tantangan kondisi makro ekonomi serta untuk meningkatkan efektifitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter melalui reformasi suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi BI 7 day (*reverse*) *repo rate*. Dimana rate yang berlaku saat ini sebesar 5,25%.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Adapun penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

- (i) 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
- (ii) 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
- (iii) 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau

- (iv) 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Dalam pemenuhan persyaratan KPMM Perseroan telah mencapai 19,64%.

Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, Perseroan wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (buffer) sebagai berikut:

- (i) *Capital Conversation Buffer* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR;
- (ii) *Counter Cyclical Buffer* sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR; dan
- (iii) *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR.

Dalam pemenuhan persyaratan KPMM Perseroan akan meningkatkan porsi penempatan pada surat berharga (Pemerintah) yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Mengatur Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah 6% dari ATMR dan modal inti utama paling rendah 4,5% dari ATMR. Berdasarkan peraturan tersebut, saat ini pemenuhan besaran modal inti Perseroan telah mencapai 18,62%.

F. Kebijakan Akuntansi Penting

Perseroan telah menetapkan kebijakan-kebijakan akuntansi penting dalam penyusunan informasi laporan keuangan Perseroan sesuai dengan penerapan standar akuntansi yang berlaku, apabila terdapat perubahan standar akuntansi di kemudian hari dapat berpengaruh pada penyajian akun-akun laporan keuangan Perseroan.

2. TINJAUAN KEUANGAN

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016 dan 2015, Perseroan berhasil membukukan kinerja keuangan cukup baik didukung oleh strategi pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan dan landasan keuangan maupun organisasi yang semakin kokoh. Perseroan berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp47,00 miliar, meningkat 16,49% dibandingkan tahun 2015 sebelumnya yang besarnya Rp40,35 miliar.

Dengan peningkatan profitabilitas tersebut, Perseroan mencatat tingkat pengembalian atas aset (*Return on Assets/ ROA*) pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar 1,51% dan tingkat pengembalian atas ekuitas (*Return on Equity/ ROE*) sebesar 6,97%.

Laporan Laba/Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015 (Tidak Diaudit)	2015	2014
Pendapatan Bunga	441.648.505	380.162.530	786.709.562	598.344.410
Beban Bunga	(251.545.588)	(208.609.554)	(430.938.429)	(339.152.201)
Pendapatan Bunga - Neto	190.102.917	171.552.976	355.771.133	259.192.209
Pendapatan Operasional Lainnya	44.446.598	24.317.832	55.231.685	39.889.880
Beban Operasional Lainnya	(101.787.088)	(99.830.218)	(211.198.040)	(181.691.611)
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(75.600.817)	(41.307.655)	(104.110.644)	(39.862.336)
Pendapatan Non Operasional - Neto	7.267.138	358.567	15.101.134	4.367.944
Laba Sebelum Pajak	64.428.748	55.091.502	110.795.268	81.896.086
Laba Bersih	47.003.242	40.351.079	80.491.880	59.407.934

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 cukup memuaskan dibandingkan dengan periode yang sama pada tanggal 30 Juni 2015, yaitu tercatat sebesar Rp441,65 miliar atau naik 16,17% dibandingkan dengan periode yang sama pada tanggal 30 Juni 2015. Pencapaian tersebut terutama didukung oleh pertumbuhan kredit neto sebesar Rp953,18 miliar atau 16,12% dibandingkan 31 Desember 2015. Hal tersebut berdampak pada kenaikan pendapatan bunga dari kredit sebesar Rp54,48 miliar atau naik 15,44% dibandingkan periode yang sama pada tanggal 30 Juni 2015. Pendapatan lainnya sebagai pendukung dalam pencapaian bunga pada periode 30 Juni 2016 adalah pendapatan dari penempatan kepada Bank Indonesia dan Bank lain tercatat Rp11,97 miliar atau naik 73,86% dan pendapatan dari penempatan surat berharga tercatat Rp21,32 miliar atau naik 10,47% dibandingkan dengan periode yang sama pada tanggal 30 Juni 2015.

Pada tahun 2015 pertumbuhan kredit neto sebesar Rp1.319,01 miliar atau 28,71% dibandingkan tahun 2014 berdampak pada peningkatan yang cukup signifikan pada pendapatan bunga kredit tercatat sebesar Rp730,60 miliar atau naik 30,99% dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp557,75 miliar.

Beban Bunga

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp251,55 miliar mengalami peningkatan 20,58% dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Di tengah persaingan yang ketat, peningkatan bunga simpanan didorong oleh inflasi yang masih tinggi sehingga dampaknya beban bunga Perseroan pada tahun 2015 mengalami peningkatan 27,06% menjadi Rp430,94 miliar dibandingkan tahun 2014 yang tercatat Rp339,15 miliar. Penyebab lain meningkatnya beban bunga karena pada saat yang sama dana pihak ketiga Perseroan juga tumbuh dengan baik sebesar 31,80% dibandingkan dengan tahun 2014.

Pendapatan Bunga - Neto

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp190,10 miliar mengalami peningkatan 10,81% dibandingkan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Pendapatan bunga - neto Perseroan tahun 2015 tumbuh 37,26% menjadi Rp355,77 miliar dibanding tahun 2014 yang tercatat Rp259,19 miliar. Peningkatan ini antara lain disebabkan karena persentase pendapatan bunga lebih besar dari persentase beban bunga.

Pendapatan Operasional Lainnya

Komposisi pendapatan operasional lainnya Perseroan terdiri dari penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan, keuntungan dari penjualan efek-efek, jasa administrasi, provisi dan komisi lainnya, keuntungan transaksi mata uang asing dan lain-lain. Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, mengalami peningkatan sebesar 82,77% menjadi Rp44,45 miliar dibandingkan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang tercatat sebesar Rp24,32 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan sebesar 430,27% menjadi Rp14,96 miliar dan keuntungan dari penjualan efek-efek – neto sebesar 107,07% menjadi Rp16,88 miliar. Disamping itu penerimaan lainnya diperoleh dari keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto sebesar Rp5,72 miliar dan jasa administrasi sebesar Rp4,68 miliar.

Pada Tahun 2015, Pendapatan operasional lainnya mengalami kenaikan sebesar 38,46% menjadi Rp55,23 miliar dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp39,89 miliar. Kontribusi terbesar pendapatan operasional lainnya Perseroan dihasilkan oleh keuntungan penjualan efek-efek – neto sebesar Rp23,23 miliar. Disamping itu penerimaan lainnya diperoleh dari keuntungan transaksi mata uang asing - neto sebesar Rp9,23 miliar dan penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan sebesar Rp7,98 miliar. Selebihnya

penerimaan diperoleh dari transaksi jasa administrasi dan provisi dan komisi lainnya.

Beban Operasional Lainnya

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, beban operasional lainnya mencapai Rp101,79 miliar meningkat dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang tercatat Rp99,83 miliar. Kenaikan terjadi pada biaya umum dan administrasi sebesar 4,68% atau Rp1,88 miliar dan kerugian transaksi mata uang asing sebesar Rp2,93 miliar, sedangkan biaya gaji dan tunjangan mengalami penurunan sebesar 3,74% atau Rp2,16 miliar seiring dengan perluasan jaringan kantor dan pengembangan sumber daya manusia.

Pada tahun 2015 beban operasional lainnya mencapai Rp211,20 miliar, sedikit naik dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat Rp181,69 miliar. Peningkatan ini didominasi oleh kenaikan gaji dan tunjangan serta biaya umum dan administrasi dari Rp178,92 miliar menjadi Rp203,98 miliar. Kenaikan biaya umum dan administrasi sebesar 16,70% dan kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 12,27%.

(Dalam ribuan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015 (Tidak Diaudit)	2015	2014
Gaji dan tunjangan	55.540.485	57.699.160	122.368.410	108.996.088
Umum dan administrasi	42.007.150	40.130.591	81.606.711	69.928.217
Kerugian transaksi mata uang asing	2.929.465	-	-	-
Provisi dan komisi	820.390	934.057	2.038.013	1.922.074
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	-	657.337	4.066.328	-
Lain-lain	489.598	409.073	1.118.578	845.232
Total beban operasional lainnya	101.787.088	99.830.218	211.198.040	181.691.611

Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai dan Beban Pajak

Untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan membuat penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar Rp75,60 miliar lebih tinggi dibandingkan dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp41,31 miliar. Sedangkan beban pajak penghasilan menurun tercatat sebesar Rp17,43 miliar dibandingkan dengan periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 yang tercatat sebesar Rp14,74 miliar.

Untuk periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, Perseroan membuat penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN) lebih besar dibandingkan dengan tahun 2014. Pada tahun 2015, pencadangan yang dibentuk sebesar Rp104,11 miliar, sedangkan tahun 2014 sebesar Rp39,86 miliar. Hal ini terjadi karena adanya prinsip kehati-hatian manajemen dalam melakukan mitigasi risiko kredit terhadap situasi ekonomi makro yang tidak kondusif.

Selama tahun 2015 beban pajak penghasilan meningkat sebesar 34,75% yaitu dari Rp22,49 miliar tahun 2014 menjadi Rp30,30 miliar tahun 2015. Hal ini merupakan salah satu partisipasi dan tanggung jawab Perseroan terhadap negara.

Laba bersih

Laba bersih pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp47,00 miliar meningkat sebesar 16,49% dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp40,35 miliar.

Peningkatan laba bersih tersebut disebabkan terdapat peningkatan beberapa pos pada pendapatan operasional antara lain: keuntungan yang cukup signifikan dari penjualan efek-efek sebesar Rp8,73 miliar atau 107%, penerimaan kembali aset keuangan yang telah dihapusbukukan sebesar Rp12,14 miliar atau 430% dan Keuntungan yang belum terealisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek sebesar Rp5,72 miliar sedangkan periode yang sama pada tahun 2015 mengalami kerugian, hal ini dipengaruhi oleh *rate* atas obligasi di pasar modal.

Laba bersih Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp80,49 miliar, meningkat sebesar 35,49% dibandingkan 31 Desember 2014 yang tercatat sebesar Rp59,41 miliar.

Pencapaian laba bersih pada tahun 2015 disebabkan pada pos-pos pendapatan operasional mengalami peningkatan antara lain: keuntungan dari penjualan efek-efek sebesar Rp14,15 miliar atau 156% dan keuntungan transaksi mata uang sebesar Rp6,21 miliar atau 206%. Selain itu pada pendapatan non operasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp10,73 miliar atau 246%, hal tersebut disebabkan Perseroan melakukan penyesuaian atas kebijakan atas kewajiban imbalan kerja pada tahun 2015.

3. KONDISI KEUANGAN

Untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, Perseroan lebih banyak melakukan konsolidasi organisasi untuk memperkokoh fundamental organisasi. Namun demikian dalam masa konsolidasi Perseroan tetap mencatatkan pertumbuhan kinerja yang cukup baik, terutama kegiatan ekspansi bisnis. Hal ini tercermin pada pertumbuhan aset, kredit yang diberikan, maupun dana pihak ketiga. Berikut ringkasan posisi keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

URAIAN	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Total Aset	9.402.340.250	8.364.502.563	6.388.305.061
Kas	52.056.291	21.344.659	40.106.030
Giro pada Bank Indonesia	467.382.917	591.846.039	374.577.940
Giro pada bank lain	192.621.308	378.230.209	43.691.045
Penempatan pada BI dan bank lain	684.996.966	459.951.160	571.720.981
Efek-efek - neto	761.055.160	682.002.293	645.104.129
Kredit yang diberikan - neto	6.865.870.438	5.912.690.475	4.593.675.964
Tagihan akseptasi	76.849.599	27.533.167	22.419.241
Penyertaan saham	297.658	297.658	297.658
Aset tetap - neto	242.644.556	237.038.335	49.832.968
Aset pajak tangguhan	15.747.828	22.257.562	18.050.007
Agunan yang diambil alih - neto	182.375	299.025	339.125
Biaya dibayar dimuka dan aset lain-lain	42.635.154	31.011.981	28.489.973
Total Liabilitas dan Ekuitas	9.402.340.250	8.364.502.563	6.388.305.061
Liabilitas	7.999.174.983	7.012.090.138	5.493.624.199
Liabilitas segera	15.918.039	19.362.789	14.334.620
Simpanan nasabah	7.692.455.695	6.862.051.180	5.206.253.466
Simpanan dari bank lain	118.105.969	3.889.698	164.579.782
Liabilitas akseptasi	76.849.599	27.533.167	22.419.241
Utang pajak	14.400.044	10.426.550	9.524.682
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	33.948.902	29.377.357	34.938.398
Liabilitas lain-lain	47.496.735	59.449.397	41.574.010
Ekuitas	1.403.165.267	1.352.412.425	894.680.862
Modal disetor	1.147.971.570	1.147.971.570	745.078.118
Modal lainnya	71.767.645	52.402.623	71.980.280
Saldo laba	183.426.052	152.038.232	77.622.464

Aset

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Aset Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp9.402,34 miliar atau lebih tinggi 12,41% dibandingkan per 31 Desember 2015. Peningkatan aset tersebut antara lain berasal dari peningkatan Kredit yang diberikan, Efek-efek dan Penempatan pada BI dan Bank Lain. Kredit yang diberikan sebesar Rp7.054,29 miliar dikarenakan adanya ekspansi kredit yang dilakukan Perseroan yang didukung dengan penambahan jaringan kantor Perseroan.

Aset produktif untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 masih didominasi oleh kredit yang diberikan sebesar Rp7.054,29 miliar atau 74,68% dari total aset produktif. Komposisi aset produktif

lainnya termasuk efek-efek, penempatan dan giro pada bank lain sebesar 25,32% dari total aset produktif. Seiring dengan pertumbuhan aset produktif dan dalam beberapa kondisi terdapat penurunan nilai akibat kondisi usaha debitur yang menurun, maka total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk per 30 Juni 2016 mencapai sebesar Rp203,42 miliar, meningkat 54,30% dari posisi 31 Desember 2015 yang tercatat terjadi pembentukan sebesar Rp131,83 miliar. Perseroan melakukan perhitungan pencadangan menggunakan dasar penurunan nilai (impairment) yang dinilai secara individual dan secara kolektif.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Pada tahun 2015 aset Perseroan mencatatkan kenaikan sebesar 30,93% menjadi Rp8.364,50 miliar dari Rp6.388,31 miliar pada tahun 2014. Penyumbang terbesar dari kenaikan aset berasal dari kenaikan penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 28,76% atau menjadi Rp6.044,52 miliar. Aset produktif pada tahun 2015 masih didominasi oleh kredit yang diberikan sebesar Rp6.044,52 miliar atau 72,00% dari total aset produktif. Seiring dengan pertumbuhan aset produktif dan dalam beberapa kondisi usaha debitur yang menurun, maka Total Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dibentuk per 31 Desember 2015 meningkat Rp30,93 miliar atau naik sebesar 30,65% dari posisi Desember 2014 yang tercatat sebesar Rp100,90 miliar.

Kas dan Giro pada BI

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Posisi kas Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp52,06 miliar atau mengalami kenaikan 143,88% dari Rp21,34 miliar pada tahun 2015. Giro pada Bank Indonesia juga mengalami penurunan sebesar 21,03% dari Rp591,85 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp467,38 miliar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016. Giro pada bank lain dan penempatan pada BI serta bank lain mengalami kenaikan sebesar 4,71% dari Rp838,18 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp877,62 miliar pada 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Posisi kas Perseroan pada tahun 2015 mengalami penurunan 46,78% yaitu menjadi Rp21,34 miliar dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp40,11 miliar. Sedangkan posisi Giro pada Bank Indonesia tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 58% yaitu Rp591,85 miliar dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp374,58 miliar. Giro pada bank lain dan penempatan pada BI serta bank lain di tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebesar 36,20% yaitu Rp838,18 miliar dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp615,41 miliar.

Efek-efek

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Tanggal 30 Juni 2016, posisi efek-efek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 13,79% dari Rp682 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi sebesar Rp776,06 miliar. Hal ini terjadi antara lain karena optimalisasi penempatan dana dari *secondary reserve* pada surat berharga yang lebih menguntungkan.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Pada Posisi tahun 2015, efek-efek Perseroan mengalami peningkatan sebesar 5,72% yaitu Rp682 miliar dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp645,10 miliar. Peningkatan ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan penempatan dana *secondary reserve* pada surat berharga yang lebih menguntungkan.

Kredit Yang Diberikan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Kredit Perseroan posisi 30 Juni 2016 mencapai Rp7.054,29 miliar atau tumbuh 16,71% dibandingkan kredit pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat Rp6.044,52 miliar. Pertumbuhan kredit Perseroan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan kredit perbankan nasional yang sebesar 8%. Kualitas kredit Perseroan pada posisi

30 Juni 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang berkategori lancar meningkat 14,84% dari Rp5.787,84 miliar menjadi Rp6.646,78 miliar. Sedangkan total kredit yang masuk kategori *non performing loan* (gross) Perseroan mengalami peningkatan dari Rp113,34 miliar menjadi Rp226,62 miliar, sedangkan rasio kredit bermasalah bruto meningkat menjadi 3,24% dari sebelumnya 1,90%.

Kredit yang telah dihapusbukukan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp3,82 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2015, terdapat penurunan penghapusbukuan kredit sebesar Rp70,34 miliar.

Adapun suku bunga rata-rata efektif dan kontrak untuk kredit dalam mata uang Rupiah pada posisi 30 Juni 2016 adalah 13,13% dan 13,04%, untuk mata uang asing adalah 6,33% dan 6,33%, sedangkan untuk tahun 2015 suku bunga rata-rata efektif dan kontrak untuk kredit dalam mata uang Rupiah adalah 13,48% dan 13,29% dan untuk mata uang asing adalah 6,46% dan 6,34%.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Kredit Perseroan pada posisi 31 Desember 2015 mencapai Rp6.044,52 miliar atau tumbuh 28,76% dibandingkan kredit untuk posisi 31 Desember 2014.

Kualitas kredit Perseroan tahun 2015 yang berkategori kualitas lancar meningkat 28,72% yaitu menjadi sebesar Rp5.787,84 miliar dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp4.496,28 miliar. Total kredit *non performing loan* (gross) mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 21,89% yaitu menjadi Rp113,34 miliar dan Rp92,98 miliar pada tahun 2014. Walaupun terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah, namun rasio NPL (gross) mengalami perbaikan menjadi 1,90% dari tahun sebelumnya sebesar 2,02%.

Penyertaan Saham

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Penyertaan Saham Perseroan pada posisi 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp297,66 juta sama dengan posisi per tahun 2015.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Penyertaan Saham Perseroan per tahun 2015 adalah sebesar Rp297,66 juta, sama dengan posisi per tahun 2014.

Aset Tetap-Neto

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Posisi Aset Tetap Neto pada posisi 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp242,64 miliar atau naik 2,37% dibandingkan tahun 2015.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Posisi aset tetap neto tahun 2015 tercatat sebesar Rp237,04 miliar, naik 375,67% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp49,83 miliar. Peningkatan ini sejalan dengan kegiatan ekspansi jaringan kantor pusat dan cabang selama tahun 2015.

Liabilitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Untuk Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 jumlah liabilitas Perseroan sebesar Rp7.999,17 miliar bilamana dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sebesar sebesar Rp7.012,09 miliar telah mencapai 14,08%. Peningkatan terbesar didominasi oleh peningkatan dana pihak ketiga sebesar 12,10% atau menjadi Rp7.692,46 miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Sedangkan liabilitas pada tahun 2015 meningkat sebesar 27,64% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp5.493,62 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan dana pihak ketiga yang tumbuh sebesar 31,80% atau menjadi Rp6.862,05 miliar.

Liabilitas Segera

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Liabilitas segera merupakan liabilitas Perseroan kepada pihak lain yang harus segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa transaksi yang masuk ke dalam pos ini adalah titipan setoran pajak, titipan setoran kliring, titipan pengiriman uang dan lain-lain. Pada posisi 30 Juni 2016 Perseroan mencatat liabilitas segera sebesar Rp15,92 miliar, mengalami penurunan sebesar 17,79% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp19,36 miliar. Penurunan terbesar berasal dari personalia yang mencapai angka Rp0,99 miliar pada posisi 30 Juni 2016 sedangkan pada tahun 2015 sebesar Rp2,96 miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Di tahun 2015 Perseroan mencatat liabilitas segera sebesar Rp19,36 miliar, naik sebesar 35,08% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp14,33 miliar. Kenaikan terbesar berasal dari titipan transfer dan ATM yang mencapai angka Rp7,23 miliar pada tahun 2015, sedangkan periode sebelumnya sebesar Rp2,66 miliar.

Simpanan

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada posisi 30 Juni 2016, jumlah Simpanan sebesar Rp7.692,46 miliar yaitu meningkat 12,10% dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar Rp6.862,05 miliar. Simpanan terdiri dari Giro, Tabungan dan Deposito berjangka. Giro pada posisi 30 Juni 2016 sebesar Rp634,19 miliar yaitu meningkat 38,97% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp456,35 miliar. Sementara tabungan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp394,41 miliar atau menurun 12,71% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp451,83 miliar. Untuk Deposito pada posisi 30 Juni 2016 mengalami peningkatan sebesar 11,92% atau menjadi Rp6.663,86 miliar dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp5.953,88 miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Pada tahun 2015, jumlah simpanan sebesar Rp6.862,05 miliar yaitu meningkat 31,80% dibandingkan tahun

2014 yang hanya sebesar Rp5.206,25 miliar. Giro pada tahun 2015 mencatat pertumbuhan menjadi sebesar Rp456,35 miliar yaitu meningkat 28,55% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp354,98 miliar. Sementara tabungan juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp451,83 miliar atau meningkat 46,32% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp308,80 miliar, dan begitupula Deposito pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp5.953,88 miliar atau meningkat sebesar 31,07% dibandingkan tahun 2014 yang hanya sebesar Rp4.542,47 miliar.

Simpanan dari Bank Lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada posisi 30 Juni 2016 jumlah Simpanan dari Bank lain mengalami peningkatan sebesar 2.936,38% atau menjadi Rp118,11 miliar dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp3,89 miliar. Simpanan dari bank lain terdiri dari giro, deposito dan *inter-bank call money*. Pos ini digunakan untuk transaksi antar bank dalam rangka operasional dan manajemen likuiditas.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Pada tahun 2015 jumlah simpanan dari Bank lain mengalami penurunan sebesar Rp160,69 miliar yaitu menurun sebesar 97,64% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp164,58 miliar.

Liabilitas Akseptasi

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Liabilitas akseptasi pada posisi 30 Juni 2016 sebesar Rp76,85 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 179,12% dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp27,53 miliar .

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Pada tahun 2015 jumlah liabilitas akseptasi mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp5,11 miliar atau 22,81%, dari jumlah Rp22,42 miliar menjadi Rp27,53 miliar.

Utang Pajak

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Utang pajak pada posisi 30 Juni 2016 sebesar Rp14,4 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 38,11% dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp10,43 miliar .

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Pada tahun 2015 jumlah utang pajak sebesar Rp10,43 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 9,47% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp9,52 miliar.

Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas diestimasi atas imbalan kerja pada posisi 30 Juni 2016 sebesar Rp33,95 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 15,56% dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar Rp29,38 miliar .

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Pada tahun 2015 jumlah liabilitas diestimasi atas imbalan kerja sebesar Rp29,38 miliar mengalami penurunan sebesar 15,92% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp34,94 miliar.

Liabilitas lain-lain

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah liabilitas lain-lain terdiri dari bunga yang masih harus dibayar, cadangan liabilitas litigasi dan hasil pemeriksaan pajak, bonus dan insentif, pendapatan diterima dimuka, setoran jaminan dan lain-lain sebesar Rp47,50 miliar pada periode 30 Juni 2016 mengalami penurunan sebesar 20,11% dibandingkan periode 31 Desember 2015 sebesar Rp59,45 miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Pada posisi tahun 2015 jumlah liabilitas lain-lain sebesar Rp59,45 miliar atau naik 43,00% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp41,57 miliar. Peningkatan yang terbesar di liabilitas lain-lain terutama pada biaya bunga yang masih harus dibayar kepada nasabah sebesar Rp26,56 miliar pada tahun 2015, sedangkan tahun 2014 sebesar Rp15,90 miliar.

Ekuitas

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 jumlah Ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp1.403,17 miliar bilamana dibandingkan dengan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2015 meningkat sebesar 3,75% dimana Ekuitas Perseroan pada tahun 2015 tercatat sebesar Rp1.352,41 miliar.

Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun 2014

Untuk tahun 2015 jumlah Ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp457,73 miliar yaitu meningkat sebesar 51,16% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp894,68 miliar. Peningkatan jumlah Ekuitas tersebut antara lain adanya peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp73,18 miliar atau meningkat 97,04% dibandingkan tahun 2014 sebesar Rp75,41 miliar, dan adanya penambahan modal sebesar Rp402,89 miliar pada pertengahan tahun 2015.

Informasi Arus Kas

Aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang telah dilakukan oleh Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 memberi dampak pada peningkatan dana kas Perseroan. Posisi kas dan setara kas Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2016 sebesar Rp1.397,06 miliar, posisi ini naik dibandingkan dengan yang tercatat di tahun 2015 sebesar Rp885,90 miliar. Kenaikan paling besar adalah pada arus kas aktivitas operasi yaitu kenaikan deposito berjangka.

(dalam ribuan
Rupiah)

Arus Kas	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	189.577.537	145.953.941	242.458.859
Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(228.276.701)	(120.294.056)	(24.015.322)
Kas neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(15.615.421)	395.616.186	(10.278.181)

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp189,58 miliar. Arus kas masuk terutama berasal dari penerimaan bunga, provisi dan komisi, penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan, pendapatan operasional lainnya, penurunan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan juga dipengaruhi oleh kenaikan giro dan deposito berjangka masing-masing sebesar Rp439,85 miliar, Rp14,97 miliar, Rp22 miliar, Rp149,98 miliar, Rp177,84 miliar dan Rp709,98 miliar. Arus kas masuk tersebut lebih tinggi dibandingkan kas keluar untuk keperluan pencairan kredit yang diberikan sebesar Rp1.013,59 miliar, pembayaran bunga, provisi dan komisi sebesar Rp245,94 miliar, pembayaran pajak penghasilan badan dan angsuran sebesar Rp17,07 miliar dan beban operasional lainnya sebesar Rp72,98 miliar.

Pada tahun 2015, arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp145,95 miliar. Hal ini terjadi karena penerimaan bunga, provisi dan komisi serta kenaikan simpanan Perseroan (giro, tabungan dan deposito berjangka), tidak diimbangi oleh arus kas keluar, untuk keperluan pemberian kredit dan penurunan simpanan dari bank lain.

Pada tahun 2014, arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp242,46 miliar. Hal ini terjadi karena penerimaan bunga, provisi dan komisi serta kenaikan tabungan dan deposito perseroan tidak diimbangi oleh arus kas keluar untuk keperluan pemberian kredit dan pembayaran bunga, provisi dan komisi, beban operasional lainnya, serta penurunan giro.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp228,28 miliar, terutama berasal dari kenaikan efek-efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp232,53 miliar dan perolehan aset tetap sebesar Rp11,18 miliar.

Pada tahun 2015, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp120,29 miliar, terutama berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp194,94 miliar dan penurunan efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp63,88 miliar.

Pada tahun 2014, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp24,02 miliar, terutama berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp27,99 miliar, penurunan efek-efek yang tersedia untuk dijual sebesar Rp58,26 miliar dan kenaikan efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp54,51 miliar.

Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp15,62 miliar yang hanya berasal dari pembagian laba untuk dividen.

Pada tahun 2015, arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah Rp395,62 miliar. Arus kas masuk tersebut berasal dari penerimaan dari penerbitan saham sebesar Rp402,89 miliar, sedangkan arus kas keluar berasal dari pembagian laba untuk dividen sebesar Rp6,08 miliar dan biaya emisi saham sebesar Rp1,2 miliar.

Pada tahun 2014, arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp10,28 miliar yang hanya berasal dari pembagian laba untuk dividen.

4. KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Bank wajib menghitung Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Perseroan memiliki kebijakan untuk menjaga struktur modal yang mampu mengantisipasi seluruh risiko-risiko utama yang terjadi di dalam pengelolaan bank.

- **Modal Inti**
Merupakan modal inti Perseroan yang terdiri dari: modal saham yang disetor, cadangan tambahan modal dan faktor pengurang modal inti. Seperti tampak pada tabel, modal inti Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp1.378,16 miliar sedangkan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.302,60 miliar naik sebesar Rp75,56 miliar atau sebesar 5,8%. Sedangkan modal inti tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp451,19 miliar atau 53,00% dibandingkan periode 12 (dua belas) pada tahun 2014. Peningkatan tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain adanya pelaksanaan *right issue* dipertengahan tahun 2015 dan perolehan laba yang dicapai perusahaan.
- **Modal Pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)**
Modal pelengkap mengacu pada modal Perseroan yang terdiri dari: instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan, agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap, cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit, cadangan tujuan dan faktor pengurang modal pelengkap. Total modal pelengkap Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 tercatat sebesar Rp75,31 miliar sedangkan untuk periode 12 (dua) belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp68,07 miliar, dan tahun 2014 tercatat sebesar Rp50,96 miliar. Peningkatan modal pelengkap dari periode ke periode seiring dengan pertumbuhan kredit.
- **Total Modal**
Untuk 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 Perseroan memiliki modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp1.378,16 miliar dan Rp75,31 miliar sedangkan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp1.302,60 miliar dan Rp68,07 miliar. Apabila dilihat dari modal pelengkap - Tier 2, modal Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 yang tercatat sebesar Rp75,31 miliar sedangkan Rp68,07 miliar pada 31 Desember 2015, atau 5,46% dari total modal inti yang tercatat sebesar Rp1.378,16 miliar. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016, komposisi modal pelengkap adalah maksimal 100% dari modal inti maka dengan komposisi modal pelengkap sebesar 5,46%, Perseroan memiliki ruang yang cukup besar untuk memperkuat modalnya, seperti melalui penerbitan obligasi subordinasi.

Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank

(Dalam ribuan Rupiah)

KOMPONEN MODAL		30 Juni 2016	31 Desember	
			2015	2014
A.	MODAL INTI (Tier 1)	1.378.161.854	1.302.600.252	851.413.936
B.	MODAL PELENGKAP (Tier 2)	75.305.122	68.073.653	50.962.342
Total Modal		1.453.466.976	1.370.673.905	902.376.278
Aset Tertimbang Menurut Risiko				
ATMR Risiko Kredit		6.771.791.550	5.574.072.800	4.306.180.205
ATMR Risiko Pasar		76.433.150	171.476.396	49.278.000
ATMR Risiko Operasional		552.460.079	451.318.253	378.450.000
Total ATMR		7.400.684.779	6.196.867.449	4.733.908.205
RASIO KPMM				
Rasio Tier 1		18,62%	21,02%	17,98%
Rasio Tier 2		1,02%	1,10%	1,08%
Rasio Total		19,64%	22,12%	19,06%

5. RASIO KEUANGAN

Rasio Keuangan		30 Juni	31 Desember	
		2016	2015	2014
Rasio Kinerja				
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	19,64%	22,12%	19,06%
2.	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	2,40%	1,35%	1,31%

3.	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif		2,67%	1,51%	1,64%
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif		2,22%	1,76%	1,78%
5.	NPL <i>gross</i>		3,24%	1,90%	2,02%
6.	NPL <i>nett</i>		2,07%	1,32%	1,32%
7.	Return on Asset (ROA) *)		1,51%	1,55%	1,47%
8.	Return on Equity (ROE) *)		6,97%	7,65%	7,05%
9.	Net Interest Margin (NIM) *)		4,27%	4,77%	4,62%
10.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) *)		88,24%	88,63%	87,85%
11.	Loan to Deposit Ratio (LDR)		91,01%	87,15%	88,49%
Kepatuhan (Compliance)					
1.	a.	Persentase pelanggaran BMPK			
		- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
		- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
	b.	Persentase pelampauan BMPK			
		- Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
		- Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%
2.	Giro Wajib Minimum				
	a.	GWM Utama Rupiah	6,60%	10,16%	8,16%
	b.	GWM Sekunder Rupiah	8,30%	7,92%	7,03%
	c.	GWM Valuta Asing	16,45%	60,67%	12,93%
3.	Posisi Devisa Netto (PDN) secara keseluruhan		0,27%	4,35%	5,32%

*) Rasio 30 Juni 2016 tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya

Kemampuan Membayar Kewajiban

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka panjang maupun jangka pendek dicerminkan oleh perhitungan rasio Solvabilitas dan Kolektibilitas, yang terdiri dari Rasio Kecukupan Modal, Rasio Kolektibilitas dan Rasio Likuiditas.

Rasio Likuiditas

Posisi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Perseroan periode laporan adalah sebagai berikut :

- 30 Juni 2016 91,01%
- 31 Desember 2015 87,15%
- 31 Desember 2014 88,49%

Sesuai dengan profil risiko yang telah ditetapkan manajemen, tingkat LDR yang optimal berada berada di kisaran 78% - 92% agar tercapai keseimbangan antara pemanfaatan dana masyarakat dan antisipasi risiko kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Sampai dengan 30 Juni 2016, LDR Perseroan relatif terjaga pada target internal Perseroan, yaitu 91,01% naik dibandingkan dengan posisi akhir 2015 sebesar 87,15%, kenaikan ini dikarenakan oleh percepatan pertumbuhan kredit. Rasio LDR tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 88,49%.

Perseroan dalam menjaga likuiditas di kisaran LDR yang optimal berupaya meminimalkan risiko suku bunga yang timbul karena adanya *maturity gap* akibat perbedaan jatuh tempo antara kredit dan dana pihak ketiga. Selain itu Perseroan juga berusaha menjaga *secondary reserve* pada level yang minimal sama dengan

primary reserve sebagai bentuk penempatan dana dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas harian Perseroan.

Pada tahun 2016 Perseroan laksanakan Penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dalam upaya pemenuhan kecukupan modal kerja untuk pengembangan bisnis.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan dan tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perubahan suku bunga terhadap pendapatan bersih Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak berdampak material, karena suku bunga kredit yang diberikan akan disesuaikan sejalan dengan suku bunga dana pihak ketiga, dan kondisi persaingan yang ada. Pencapaian pendapatan bersih Perseroan lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit dalam dua tahun terakhir, yaitu pertumbuhan kredit pada Juni 2016 sebesar 16,7% dan 28,8% pertumbuhan tahun 2015.

Rasio Kredit Bermasalah dan Pengelolaan Tingkat Kolektibilitas

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 Rasio NPL *gross* mengalami kenaikan sebesar 3,24% dari angka sebelumnya 1,90% di tahun 2015, sedangkan untuk tahun 2014 sebesar 2,02%. Besaran NPL tersebut jauh dibawah ambang batas NPL yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 5%. Rasio NPL *nett* juga mengalami kenaikan sebesar 2,07% pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, sedangkan di tahun 2015 dan tahun 2014 masing-masing sebesar 1,32% dan 1,32%. Dari sisi nominal NPL Perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp226,62 miliar dari angka sebelumnya di tahun 2015 sebesar Rp113,34 miliar, sedangkan pada tahun 2014, nominal NPL sebesar Rp92,98 miliar.

Rasio Profitabilitas

Net Interest Margin (NIM) perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 mengalami penurunan menjadi 4,27% dibandingkan tahun 2015 sebesar 4,77%. Penurunan NIM tersebut disebabkan oleh peningkatan NPL. Sedangkan pada tahun 2014 NIM Perseroan mencapai 4,62%.

Return On Asset (ROA) perseroan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 juga mengalami penurunan menjadi 1,51% dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,55%, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 1,47%.

Return On Equity (ROE) yang merupakan cerminan dari imbal hasil kepada pemegang saham pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016 sebesar 6,97% lebih kecil dibandingkan tahun 2015 sebesar 7,65%, sedangkan pada tahun 2014 mencapai 7,05%.

Rasio Efisiensi

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2016, Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 88,24% sedikit lebih baik dibandingkan tahun 2015 sebesar 88,63%. Sedangkan untuk tahun 2014, BOPO sebesar 87,85%.

6. BELANJA MODAL

Per tanggal 30 Juni 2016 Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk aset tetap berupa tanah dan bangunan, kendaraan, perlengkapan kantor serta tanah dan bangunan yang belum digunakan dengan jumlah belanja sebesar Rp11,18 miliar sedangkan untuk periode 12 (dua belas) bulan pada tahun 2015 jumlah belanja sebesar Rp194,94 miliar dan tahun 2014 sebesar Rp27.99 miliar. Rincian pengeluaran investasi barang modal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 sebagai berikut

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	30 Juni 2016	31 Desember	
		2015	2014
Tanah dan Bangunan	6.390.364	12.648.129	18.267.968
Kendaraan	1.480.829	4.138.541	4.455.697
Perlengkapan Kantor	3.312.074	3.740.279	5.268.503
Tanah dan Bangunan yang belum digunakan	-	174.411.615	-

Total	11.183.267	194.938.564	27.992.168
--------------	-------------------	--------------------	-------------------

Dalam pelaksanaan Perseroan melakukan perjanjian dengan beberapa pihak terkait, antara lain;

Nama Pihak yang terkait dalam Perjanjian	Nilai keseluruhan (dalam ribuan Rupiah)		Mata Uang	Distribusi investasi secara geografis
PT. Margonda Raya	Tanah	2.525.955	Rupiah	Jakarta
PT. Karya Cipta Megah Mandiri	Bangunan	3.180.425		Jakarta
CV. Adistha Nugraha	Renovasi bangunan sewa	683.984		Jakarta
CV. Pandu Putra Sarana				Jakarta
PT. Delta Mas	Mobil	1.117.764	Rupiah	Lampung
PT. Nasmoco	Motor	363.065		Solo
PT. Hadji Kalla				Makassar
PT. Hutama Raharja Dellada	Perlengkapan kantor	3.312.074	Rupiah	Jakarta
PT. Alpha Cipta Computindo				Jakarta
PT. Mitra Timur Lestari				Jakarta
PT. Agra Jaya				Jakarta
PT. Harya Pilar Utama Sukses				Jakarta
PT. Rajawali Mega Kreasi				Jakarta
PT. Intan Cemerlang Electrindo				Jakarta
PT. Comparex Indonesia				Jakarta
PT. IP Network Solusindo				Jakarta
PT. Telkom Indonesia				Jakarta

Tujuan dari investasi barang modal adalah melakukan efisiensi terhadap biaya-biaya sewa gedung untuk operasional Perseroan. Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal berasal dari laba yang diperoleh, dan Perseroan tidak memiliki pinjaman untuk belanja modal tersebut. Dalam proses pengadaan barang investasi selalu menggunakan mata uang Rupiah sehingga Perseroan tidak memerlukan tindakan untuk melindungi dari risiko fluktuasi kurs mata uang asing. Prakiraan pelaksanaan pembangunan dalam rangka investasi barang modal yaitu dimulai pada bulan Januari 2016 dan selesainya pada bulan Mei 2016.

Peningkatan kapasitas produksi atau jasa yang diharapkan dari investasi barang modal adalah peningkatan produktifitas dan kinerja Perseroan dalam rangka peningkatan pertumbuhan kredit yang diberikan pada segmen ritel dan konsumen serta peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga terutama peningkatan CASA, sehingga berdampak pada peningkatan pada laba Perseroan.

7. MANAJEMEN RISIKO

Situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan terutama produk dan jasa sehingga meningkatkan profil risiko bank. Pengelolaan risiko menjadi hal sangat penting bagi bank agar dapat melaksanakan bisnis dengan tingkat risiko yang terukur. Meningkatnya kebutuhan pengelolaan bank yang sehat dan terpadu (*good corporate governance*) memerlukan penerapan manajemen risiko yang mendukung pencapaian target kinerja dan mampu menjaga kelangsungan usaha. Dengan mengelola risiko, Perseroan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan modal dan tingkat pengembangan modal (*return on equity/ROE*) untuk selanjutnya dapat memberi nilai tambah bagi pemegang saham, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan stakeholders lainnya, serta meningkatkan bisnis pada tingkat optimal.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko

Untuk mencapai tujuan di atas dan sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, perlu dibangun

kesadaran dan budaya manajemen risiko terpadu (*integrated risk culture*). Fokus penerapan manajemen risiko terutama pada efektivitas penerapan tata kelola dan kerangka kerja manajemen risiko.

Penanganan Kredit Bermasalah

Untuk meminimalkan kredit bermasalah Perseroan melakukan seleksi konsumen yang dilakukan Perusahaan memiliki kebijakan untuk melakukan *pre-screening* nasabah sebelum dilakukan proses analisa lebih lanjut. *Pre-screening* ini dilakukan melalui :

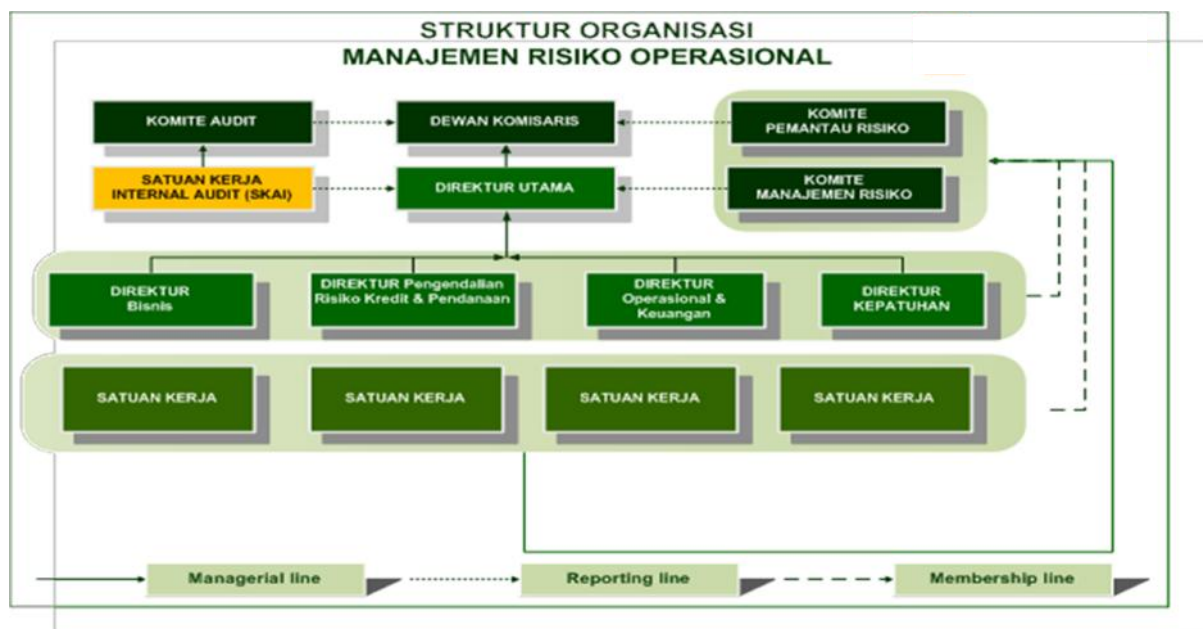
1. Penetapan Pasar Sasaran (PS) diantaranya adalah seleksi terhadap sektor industri yang dianggap Perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi.
2. Penetapan Kriteria Risiko yang dapat Diterima (KRD) diantaranya adalah kriteria-kriteria risiko termasuk kriteria nasabah atau calon nasabah yang dipilih dan dapat diterima oleh unit kerja bisnis, termasuk didalamnya adalah BI *Checking* dan *negative list* BKPM.
3. Upaya-upaya untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah di masa mendatang adalah melalui pemisahan pejabat kredit, penerapan *Four Eyes Principle*, penerapan *Risk Scoring System*, pemisahan Pengelolaan Kredit Bermasalah (KL, D, dan M), melaksanakan Prosedur Perkreditan yang Sehat.

Selanjutnya bilamana terjadi kredit yang bermasalah maka tindakan Perseroan untuk penyelesaian sebagai berikut :

1. Restrukturisasi Kredit bermasalah, dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit, dan
 - b. Debitur memiliki prospek usaha/kemampuan membayar kembali (*Repayment Capacity*) setelah kredit direstrukturisasi.
2. Penyelesaian Kredit.
Penyelesaian Kredit Bermasalah dengan cara yaitu penyelesaian kredit secara damai, melalui penjualan jaminan, melalui saluran atau mekanisme hukum, melalui penjualan jaminan atau pengalihan kredit.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Gambar Struktur Organisasi Manajemen Risiko di Perseroan



Penerapan manajemen risiko melibatkan semua unsur dalam bank, terutama pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi serta organisasi dan fungsi yang secara langsung terkait dengan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif manajemen bank, kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko bank serta integrasinya sistem informasi di bank.

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai tugas memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko bank serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank.

Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dan jajaran Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee/RMC*). Komite Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam merumuskan kebijakan, strategi manajemen risiko termasuk penetapan limit serta memperbaiki atau menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang akan mempengaruhi kecukupan pemodal dan profil risiko.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Penerapan manajemen risiko di Perseroan telah dituangkan dalam beberapa kebijakan dan prosedur, antara lain Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR). KUMR berperan sebagai aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis Perseroan, dimulai dari kebijakan, strategi, organisasi, sistem informasi manajemen risiko, pengawasan risiko, pengelolaan produk dan aktivitas baru dan *Business Continuity Plan (BCP)*. Proses penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan dan pengendalian terhadap 8 (delapan) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko hukum dan risiko reputasi.

Kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko yang telah dimiliki oleh Perseroan antara lain adalah:

- a. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas
- b. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi
- c. Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*
- d. Pedoman Pelaksanaan *Risk and Control Self Assessment (RCSA)*
- e. Pedoman Pelaksanaan Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*)
- f. Pedoman *Credit Risk Rating* Bisnis Ritel
- g. Pedoman Pelaksanaan Sistem Scoring Kredit Karyawan produktif
- h. Penetapan Transaksi Limit Dealer
- i. Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko
- j. Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Produk Dan Atau Aktivitas Baru
- k. Pedoman Pelaksanaan *Stress Test*

Penetapan limit risiko untuk setiap jenis risiko dilakukan oleh satuan kerja terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko atau Direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dalam proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perseroan dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Perseroan telah menetapkan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai unit yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko.

Proses Manajemen Risiko, terdiri dari:

- a. *Identifikasi*
Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha Perseroan yang juga meliputi produk dan jasa-jasa lainnya. Identifikasi risiko

dilakukan di level Kantor Pusat, Kantor Cabang seluruh Indonesia dengan menggunakan perangkat Manajemen Risiko.

b. *Pengukuran*

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur ekspose risiko Perseroan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Pengukuran risiko untuk risiko kredit telah menggunakan sistem *scoring* dan *rating*, risiko likuiditas menggunakan metodologi *Liquidity Gap*, risiko pasar (Interest Rate Risk on Banking Book) menggunakan *Repricing Gap* dan risiko operasional menggunakan RCSA.

c. *Pemantauan*

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya ekspose risiko, kepatuhan limit internal dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam bentuk laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d. *Pengendalian*

Pengendalian risiko dilakukan antara lain dengan memberikan tindak lanjut atas risiko yang bersifat *moderate* dan *high* yang melebihi *limit*, peningkatan kontrol (pengawasan melekat), penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian, dan audit internal secara periodik. Di samping itu juga dilakukan analisis terhadap Produk dan/atau Aktivitas Baru (PAB).

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko bertujuan agar terukurnya ekspose risiko secara keseluruhan/komposit dan dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. Sistem informasi manajemen risiko yang diaplikasikan antara lain aplikasi Sistem *Scoring*, aplikasi CRR (Credit Risk Rating) Ritel dan Menengah.

4. **Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern yang memadai dalam fungsi manajemen risiko diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan risiko berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pengendalian intern di bidang manajemen risiko dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional (*business unit*) dengan satuan kerja manajemen risiko (*risk management unit*) dan menerapkan metode pemisahan fungsi (*segregation of duties*) dengan menggunakan konsep *Maker, Checker, Approval (MCA)* pada seluruh kegiatan operasional.
- b. Satuan kerja manajemen risiko merupakan satuan kerja independen yang membuat kebijakan, prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- c. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melaksanakan pengawasan risiko pada setiap proses kegiatan usaha Perseroan yang mengandung kerawanan terhadap penyalahgunaan atau menimbulkan risiko bagi Perseroan. Temuan-temuan audit oleh SKAI diinformasikan secara tertulis kepada unit terkait dan satuan kerja manajemen risiko untuk ditindaklanjuti, guna mendeteksi dan mengantisipasi segala potensial risiko secara dini sehingga kerugian dapat dihindari dan dimitigasi.

VI FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan sebagaimana perbankan secara umum dihadapkan pada risiko yang mempengaruhi hasil usaha maupun kelangsungan usaha apabila risiko tersebut tidak dikelola dengan baik. Risiko yang menurut Perseroan mempengaruhi kegiatan usahanya adalah sebagai berikut :

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN

1. Risiko Kredit

Risiko kredit secara garis besar adalah kerugian yang timbul sebagai akibat dari kegagalan debitur ataupun *counter-party* untuk memenuhi kewajibannya kepada Perseroan pada saat jatuh tempo. Pada Juni 2016, persentase perbandingan kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan Perseroan sebesar 3,24% (bruto) dan 2,07% (bersih). Banyak hal yang mempengaruhi kegagalan pengembalian kredit ini oleh debitur baik dari sisi debitur (*insolvency* usaha), dari sisi Perseroan (risiko konsentrasi kredit pada suatu sektor tertentu maupun dari sisi eksternal berupa kebijakan pemerintah dalam menetapkan suku bunga acuan, maupun imbas tidak langsung lainnya risiko makroekonomi (inflasi, nilai tukar, maupun pertumbuhan ekonomi (PDB)). Meskipun Perseroan secara aktif terus menerapkan prinsip manajemen risiko dalam mengelola dan memonitor portofolio kredit dan terus menyempurnakan kebijakan-kebijakan dan sistem manajemen risiko kredit.

Pada Juni 2016, Perseroan telah mencadangkan kerugian sebesar 83,14% terhadap seluruh kredit bermasalah. Namun, nilai ini bisa harus terus bertambah seiring dengan kondisi kualitas portfolio kredit Perseroan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan, karena semakin besarnya porsi kredit bermasalah akan menyebabkan peningkatan kebutuhan biaya cadangan kerugian penurunan nilai kredit, yang sangat mempengaruhi keuntungan Perseroan sehingga dapat menurunkan kinerja dan kelangsungan usaha Perseroan.

Kebijakan Perseroan dalam penyaluran kredit yaitu menjadi Bank yang fokus dalam pembiayaan di sektor agrobisnis namun tetap melayani aktifitas pembiayaan di sektor non-agrobisnis. Pembiayaan terbesar dari sektor agrobisnis yaitu bisnis BUMN yang berbasis usaha agrobisnis, bisnis program (KKPE, KKP-TR dan KPEN-RP) dan bisnis agro swasta. Sedangkan di sektor non-agrobisnis Bank bergerak di pembiayaan kredit KPR, kredit karyawan, kredit investasi, dan kredit modal kerja.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari pergerakan harga pasar atau posisi yang diambil oleh Perseroan baik pada posisi neraca (*on balance sheet*) maupun pos-pos komitmen (*off balance sheet*), antara lain yang bersumber dari fluktuasi tingkat suku bunga (*interest rate*) dan nilai tukar (*foreign exchange*). Sebagian besar komponen aset dan kewajiban dalam neraca adalah komponen yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Peningkatan "harga" sumber dana yang lebih cepat daripada peningkatan "harga" penggunaan dana secara sistematis akan menimbulkan margin bunga bersih yang semakin kecil bahkan negatif (*negative spread*). Penyesuaian terhadap suku bunga kredit mengandung risiko lain, yakni ketidakmampuan debitur untuk melakukan *debt servicing* secara baik.

Pada akhirnya pergerakan kedua instrumen harga tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian dan politik suatu negara secara keseluruhan yang juga tidak terpisahkan dari pengaruh kondisi perekonomian regional maupun global.

Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga dan harga pasar surat-surat berharga akan menurunkan pendapatan Perseroan dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Risiko ini juga mencakup risiko-risiko, antara lain:

- Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga terkait dengan pergerakan tingkat suku bunga, baik penghimpunan dana maupun pelepasan dana (kredit), yang tidak sejalan dengan posisi *repricing gap* antara *asset* dan *liability* Perseroan. Risiko yang terjadi akibat perubahan suku bunga selain akan berdampak negatif pada keuntungan Perseroan juga berdampak pada tingkat kesehatan Perseroan.

- Risiko nilai tukar

Sebagai bank devisa, Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs valuta asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi valuta asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Oleh karena itu, kecurangan hati-hatian dalam mengelola perubahan nilai tukar dan mempertahankan keseimbangan jumlah aset dan kewajiban dana valuta asing berakibat kerugian yang cukup besar bagi Perseroan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko likuiditas pada prinsipnya dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid, dan ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank dan pinjaman yang diterima. Ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban dan komitmen ini akan menyebabkan turunnya kepercayaan nasabah dan mengakibatkan penarikan dana secara besar-besaran (*rush*) yang akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang tentunya juga berpengaruh pada menurunnya kepercayaan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

B. **RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL**

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem atau karena kejadian-kejadian eksternal. Lemahnya sistem operasional mengakibatkan meningkatnya biaya operasional yang pada akhirnya akan mempengaruhi laba usaha. Disamping itu, secara umum kelemahan ini akan mengakibatkan terganggunya kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah dan pada gilirannya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan.

- Risiko proses internal, terkait dengan kegagalan proses atau prosedur yang terdapat pada suatu bank, bisa karena pengendalian internal yang lemah, kesalahan penjualan/ pemasaran produk, kesalahan transaksi, dokumentasi yang tidak memadai, tidak lengkap atau tidak tepat. Risiko juga terjadi apabila suatu proses terlalu rumit, tidak terstruktur atau tidak dilaksanakan dengan semestinya.
- Risiko manusia, merupakan risiko yang terkait dengan karyawan bank, baik disengaja maupun tidak dan tidak terbatas hanya pada suatu unit organisasi tertentu saja. Area-area yang umumnya terkait dengan risiko manusia adalah isu-isu kesehatan dan keselamatan kerja, tingkat perputaran karyawan yang tinggi, *fraud* internal, sengketa pekerja, praktek manajemen yang buruk, pelatihan karyawan yang tidak memadai dan ketergantungan pada karyawan tertentu saja.
- Risiko sistem, terkait dengan penggunaan teknologi dan sistem. Penggunaan teknologi tidak saja sangat mendukung kegiatan operasional bank namun juga menimbulkan risiko bagi bank yang disebabkan oleh kesalahan pemrograman, kesalahan input data, kecocokan sistem (*system suitability*), penggunaan teknologi yang belum diuji coba, ketergantungan pada teknologi *black box*, data yang tidak lengkap dan sebagainya. Secara teoritis, kegagalan secara menyeluruh pada teknologi yang digunakan oleh Perseroan akan sangat mungkin menyebabkan terjadinya kerugian bank yang bersangkutan.

- Risiko eksternal, terkait dengan kejadian-kejadian yang berada diluar kendali Perseroan secara langsung, misalnya kejadian pada bank lain yang memiliki dampak pada keseluruhan industri perbankan, pencurian dan eksternal *fraud*, kebakaran, bencana alam, kegagalan perjanjian *outsourcing*, kerusuhan dan unjuk rasa, terorisme dan sebagainya.

1. Risiko Strategik

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal. Risiko ini selain akan berdampak pada meningkatnya beban operasional yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat keuntungan dan kinerja Perseroan, juga berdampak negatif pada tingkat kesehatan Perseroan.

2. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Beberapa faktor yang mempengaruhi risiko hukum, antara lain adanya tuntutan hukum dari pihak ketiga atas transaksi yang dilakukan dan kesalahan/kelalaian dalam membuat kontrak/perjanjian. Risiko ini selain akan berdampak pada terganggunya kelancaran kegiatan operasional, juga akan menyebabkan membesarnya biaya operasional yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada keuntungan Perseroan.

3. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Kualitas Aset Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) maupun Aset Non Produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Neto (PDN), dan sebagainya. Risiko ini selain akan berdampak pada pemberian sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), juga berdampak pada penurunan tingkat kesehatan Perseroan.

4. Risiko Reputasi

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan nasabah yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada kinerja Perseroan.

C. RISIKO INVESTASI BAGI INVESTOR

1. Risiko Saham yang Ditawarkan Tidak Likuid

Saham Perseroan yang ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia cukup banyak, namun Perseroan tidak menjamin bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan likuid, karena adanya kemungkinan saham-saham yang dimiliki oleh pihak tertentu tidak akan diperdagangkan.

2. Harga Saham yang Ditawarkan Berfluktuasi

Fluktuasi harga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- Kinerja perusahaan tidak sesuai dengan harapan investor,
- Peraturan Pemerintah yang dapat mempersempit ruang gerak ekspansi maupun *spread* pendapatan Perseroan,
- Kondisi ekonomi di Indonesia yang tidak kondusif,
- Perubahan kebijakan akuntansi
- Faktor-faktor lainnya.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu 3 November 2016 atas laporan keuangan tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan opini audit tanpa modifikasi.

VIII KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN TERBUKA

A. Riwayat Pencatatan Saham Perseroan

Jenis Penawaran Umum	Tanggal dan Informasi Pernyataan Efektif	Jumlah dan Harga Saham Yang ditawarkan	Tanggal dan tempat Pencatatan Saham
Pencatatan Saham Perseroan	Perseroan tidak melakukan penawaran umum perdana saham. Pencatatan dilakukan karena jumlah pemegang saham Perseroan telah melebihi 300 pihak dan telah memperoleh pernyataan efektif sesuai dengan surat Bapepam No. S-1565/PM/2003 tanggal 30 Juni 2003	1.529.336.690 saham dengan harga Rp100,-	8 Agustus 2003 di Bursa Efek Surabaya (BES)
Penawaran Umum Terbatas I	7 November 2003 dengan No : S-2718/PM/2003	305.867.338 saham dengan harga Rp100,-	21 November 2003 di BES
Penawaran Umum Terbatas II	12 April 2005 dengan No : S-757/PM/2005.	513.857.128 saham dengan harga Rp105,-	27 April 2005 di BES
Penawaran Umum Terbatas III	9 November 2009 dengan No : S-9827/BL/2009	1.005.144.170 saham dengan harga Rp100,-	23 November 2009 di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Pelaksanaan Waran Seri I	9 November 2009 dengan No : S-9827/BL/2009	502.572.084 saham dengan harga Rp130,-	25 Mei 2011 di BEI
Penawaran Umum Terbatas IV	26 Juni 2013 dengan No : S-186/D.04/2013	3.832.685.599 saham dengan harga Rp117,-	10 Juli 2013 di BEI
Penawaran Umum Terbatas V	17 Juni 2015 dengan No : S-259/D.04/2015	4.028.934.521 saham dengan harga Rp100,-	2 Juli 2015 di BEI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dapat dicatatkan di bursa efek. Saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah pelaksanaan PMHMETD ini berdasarkan pernyataan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 03 November 2016.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan permodalan Perseroan dari tanggal pendirian sampai dengan tahun 2012, telah diungkapkan dalam Prospektus tanggal 18 Juni 2015 dalam rangka Penawaran Umum Terbatas V yang telah dilakukan Perseroan.

Perkembangan kepemilikan saham Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus adalah sebagai berikut:

Tahun 2015

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas V yakni per tanggal 31 Mei 2015 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.992.248.973	599.224.897.300	80,42
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	14,03
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	413.553.840	41.355.384.000	5,55
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.450.781.177	745.078.117.700	100,00
Saham Dalam Portepel	2.549.218.823	254.921.882.300	-

Perseroan merencanakan meningkatkan porsi kepemilikan publik dengan :

- Meningkatkan jumlah saham yang beredar, sehingga diharapkan untuk meningkatkan likuiditas.
- Pelaksanaan peningkatan jumlah saham yang beredar dilakukan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V, yang akan memberikan kesempatan bagi pemegang saham publik yang akan melakukan pemesanan saham tambahan sehingga kepemilikan saham publik diharapkan mencapai jumlah 10% (sepuluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan
- Sesuai dengan peraturan pencatatan saham BEI No. I-A saham-saham Perseroan yang dimiliki oleh masyarakat sekurang-kurangnya sebesar 7,5% dari seluruh saham yang telah ditempatkan atau disetor penuh, apabila suatu perusahaan tercatat sampai dengan bulan Januari 2016 jumlah kepemilikan saham masyarakat kurang dari jumlah tersebut, maka memiliki risiko untuk tidak dapat dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Terbatas V yakni per tanggal 31 Desember 2015 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan berdasarkan akta Pernyataan keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0951264, tanggal 14 Juli 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3533252.AH.01.09.Tahun 2015 Tanggal 14 Juli 2015, adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.013.470.929	1.001.347.092.900	87,23
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	9,10
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	421.266.405	42.126.640.500	3,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.479.715.698	1.147.971.569.800	100,00
Saham Dalam Portepel	13.520.284.302	1.352.028.430.200	-

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2015 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan berdasarkan akta Pernyataan keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal S.H., M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0951264, tanggal 14 Juli 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3533252.AH.01.09.Tahun 2015 Tanggal 14 Juli 2015, adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.013.470.929	1.001.347.092.900	87,23
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	9,10
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	421.266.405	42.126.640.500	3,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.479.715.698	1.147.971.569.800	100,00
Saham Dalam Portepel	13.520.284.302	1.352.028.430.200	-

30 Juni 2016

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan berdasarkan akta Pernyataan keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal SH, M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0951264, tanggal 14 Juli 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3533252.AH.01.09.Tahun 2015 Tanggal 14 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.013.470.929	1.001.347.092.900	87,23
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	9,10
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	421.266.405	42.126.640.500	3,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.479.715.698	1.147.971.569.800	100,00
Saham Dalam Portepel	13.520.284.302	1.352.028.430.200	-

30 September 2016

Stuktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 September 2016 yang disusun oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan berdasarkan akta Pernyataan keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar No. 68 tanggal 14 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal SH, M.Kn. Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0951264, tanggal 14 Juli 2015, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3533252.AH.01.09.Tahun 2015 Tanggal 14 Juli 2015 adalah sebagai berikut :

	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	25.000.000.000	2.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.013.470.929	1.001.347.092.900	87,23
2. Dana Pensiun Perkebunan	1.044.978.364	104.497.836.400	9,10
3. Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5 %	421.266.405	42.126.640.500	3,67
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.479.715.698	1.147.971.569.800	100,00
Saham Dalam Portepel	13.520.284.302	1.352.028.430.200	-

C. Pengawasan dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 09 Mei 2016, dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H, Notaris di Jakarta, mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0049868 tanggal 19 Mei 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061771.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 Mei 2016, maka susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Bambang Soepeno
Komisaris Independen	: Achmad Fachmi
Komisaris	: Roswita Nilakurnia
Komisaris	: Saptono Siwi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 09 Mei 2016, dibuat di hadapan Rusnaldy, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0049868 tanggal 19 Mei 2016, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061771.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 19 Mei 2016, maka susunan anggota Direksi Perseroan yang menjabat saat ini sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: I Komang Sudiarso
Direktur	: Zuhri Anwar
Direktur	: Mustari Damopolii
Direktur	: Sahala Manalu
Direktur	: Zainuddin Mappa

Fit and Proper Test Dewan Komisaris Perseroan :

1. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-105/D.03/2014, tanggal 18 Juni 2014, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. Bambang Soepeno sebagai Komisaris Utama Independen Bank BRI AGRO.
2. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 15/35/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 19 Februari 2013, Bank Indonesia menyetujui Sdr. Achmad Fachmi sebagai Komisaris Independen Bank BRI AGRO.
3. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 11/163/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 14 Desember 2009, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Sdr. Roswita Nilakurnia sebagai Komisaris Bank BRI AGRO.
4. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-187/D.03/2016, tanggal 16 September 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. Saptono Siwi sebagai Komisaris Bank BRI AGRO.

Fit and Proper Test Direksi Perseroan :

1. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-166/D.03/2016, tanggal 25 Agustus 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. I Komang Sudiarsa sebagai Direktur Utama Bank BRI AGRO.
2. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No. SR-140/D.03/2016, tanggal 1 Agustus 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pengangkatan Sdr. Zainuddin Mappa sebagai Direktur Operasional dan Keuangan Bank BRI AGRO .
3. Surat Gubernur Bank Indonesia No.14/105/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 5 September 2012, Bank Indonesia menyetujui peralihan jabatan Sdr. Mustari Damapolii dari Direktur Operasional menjadi Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank BRI AGRO.
4. Surat Gubernur Bank Indonesia No. 14/117/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 26 September 2012, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Sdr. Sahala Manalu sebagai Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Pendanaan Bank BRI AGRO.
5. Surat Gubernur Bank Indonesia No 13/75/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 14 Juli 2011, Bank Indonesia menyetujui pengangkatan Sdr. Mustari Damapolii dan Sdr. Zuhri Anwar masing-masing sebagai Direktur Operasi dan Direktur Bisnis Bank BRI AGRO.

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Bambang Soepeno

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia kelahiran Surakarta pada tanggal 23 November 1952 ini, saat ini menjabat Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan sejak Maret 2014. Menempuh pendidikan terakhirnya di St. Louis University, Amerika Serikat dalam bidang International Business (MBA), lulus tahun 1991 Karir perbankan dimulai di Bank Rakyat Indonesia pada awal tahun 1981 sampai tahun 2011. Pernah menjabat sebagai Direktur Kepatuhan tahun 2006-2009, kemudian Direktur UMKM tahun 2009-2010 dan jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan pada tahun 2010-2011. Dalam perjalanan karirnya di BRI, pernah mendapat kepercayaan menjabat sebagai Direktur Dana Pensiun BRI tahun 2002 - 2004 kemudian bertugas di Bank BRI Syariah (2011-2014) sebagai Komisaris Utama. Pada tahun 2014 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.



Achmad Fachmi

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir di Jember pada tanggal 19 April 1956 diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan berdasarkan RUPS tanggal 3 April 2013. Menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya di Fakultas Ekonomi Perusahaan Universitas Negeri Jember (UNEJ) pada tahun 1982, dan S2 dari program Pasca Sarjana Studi Magister Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (IPB), lulus tahun 1998. Karirnya dimulai dibidang koperasi dan UKM di Perum PKK Departemen Keuangan (1982 - 1990), dilanjutkan di Bank Bukopin Jakarta (1990 - 2011) sebagai Staf Khusus Direktur UKM & Account Officer (September 1990 - Mei 1992), Kepala Bagian Pengembangan

Usaha Kredit Koperasi (Mei 1992 - September 1993), Kepala Urusan Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (September 1993 - Desember 1994), Kepala Urusan Kredit Program dan Koperasi (Desember 1994 - Februari 2000), Group Head Bisnis UKM Wilayah Jatim & Bali (Februari 2000 - Juni 2001), Pemimpin Cabang Kelas A Surabaya (Juni 2001 - April 2006), Kepala Urusan Kepatuhan Bisnis Direktorat Manajemen Risiko & Kepatuhan (April 2006 - Juli 2006), dan Kepala Divisi Kredit Komersil I Kantor Pusat Bank Bukopin Jakarta (2006 - 2011).



Roswita Nilakurnia

Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir di Banda Aceh pada tanggal 24 Oktober 1966 diangkat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan RUPS tanggal 2 Mei 2011. Menyelesaikan pendidikan kesarjanaannya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1992, dan memperoleh gelar Master of Science Management (MSM) Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 2009. Pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan untuk periode 2009 - 2011. Saat ini menjadi staf pengajar FE-UI (1992 - sekarang) dan Direktur Utama Dana Pensiun Perkebunan (2009 - sekarang). Memulai karir sebagai *Senior Advisor* di Flagler Management Advisory (1992 - 1997), *Senior Advisor* di AAJ Associates (1992 - 1997), *Managing Director* di AAJ Associates Corporate Finance Advisory Group (1997 - 2006), Presiden Direktur AAJ Batavia (2004-2006), *Managing Director* P Overseas Securities (2007 - 2008) dan Direktur Keuangan PT Risna Karya Wardhana (2008 - 2009).



Saptono Siwi

Komisaris

Warga Negara Indonesia, di Purworejo pada tanggal 25 November 1960. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan berdasarkan RUPS tanggal 20 April 2016. Memperoleh gelar sarjana ekonomi dari Universitas Padjajaran Bandung dan gelar Magister Hukum dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Menjabat sebagai Inspektur Kantor Inspeksi Malang PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2012 - 2014), Inspektur Kantor Inspeksi Jakarta 1 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2014 - 2015), Kepala Administrasi Kredit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2015), Kepala Audit Intern Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2015 - sekarang).

DIREKSI



I Komang Sudiarsa

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir di Amlapura Pada tanggal 15 November 1959. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan RUPS tanggal 20 April 2016. Memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Udayana Bali dan pernah menjabat Pemimpin Wilayah Manado PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2007 - 2008), Kepala Divisi Hubungan Lembaga PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2008 - 2013), Kepala Divisi Hubungan Lembaga 1 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2013 - 2014), Kepala Divisi Bisnis BUMN 2 PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (2014 - 2016).



Zuhri Anwar

Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada tanggal 07 September 1960 dengan pendidikan terakhir Magister Manajemen bidang SDM, Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2001. Karir Perbankan dilalui di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), diawali dari siswa *Trainee* pada 1986. Beberapa jabatan penting sudah diembannya antara lain Pemimpin Kantor Cabang BRI Maros, Makasar (1999-2002), Kepala Bagian Pelayanan Pinjaman KCK BRI (2002-2004), Kepala Bagian Kredit Kantor Cabang Khusus, Jakarta (2004-2006), Kepala Bagian Kebijakan dan Pengembangan Kredit, Divisi kredit Ritel (2006-2008), *Assistant Vice President*, Divisi Kredit Ritel BRI (2008-2009), *Vice President*, Divisi Agribisnis BRI (2009-2011). Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan 24 Maret 2015 memberikan mandat sebagai Direktur Perseroan. Kemudian diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan RUPS tanggal 25 Maret 2015.



Mustari Damopolii

Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, lahir di Kotamobagu pada tanggal 15 Mei 1956, dengan pendidikan formal terakhir Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, lulus tahun 2003.

Karir perbankan dilalui di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI) diawali sebagai *Trainee* pada 1985. Selanjutnya berbagai jabatan telah diembannya diantaranya Pemimpin Kantor Cabang BRI Sidrap, Makassar (1992-1995), Pemimpin Kantor Cabang BRI Padang (1995-1998), Pemimpin Kantor Cabang BRI Pekalongan (1998-2002), Pemimpin Kantor Cabang BRI Cimahi (2002-2004), Pemimpin Kantor Cabang BRI Jakarta Kota (2004-2007), Wakil Inspektur Kantor Inspeksi BRI Padang (2007-2008), Wakil Pimpinan Kantor Wilayah BRI Makassar (2008-2009), Wakil Pimpinan Kantor Wilayah BRI Surabaya (2009-2010), dan Wakil Pimpinan Kantor Wilayah BRI Jakarta 1 (2010). Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan 24 Maret 2015 memberikan mandat sebagai Direktur Perseroan. Kemudian diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan RUPS tanggal 25 Maret 2015.



Sahala Manalu

Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Pendanaan

Warga Negara Indonesia, lahir di Aekraja pada tanggal 24 Januari 1959 dengan pendidikan formal terakhir di Magister Manajemen bidang *Finance* - Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, lulus tahun 2002 dengan kekhususan Keuangan. Sebelumnya mendapat gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisna Dwipayana, Jakarta.

Karir Perbankan dilalui sejak awal di Bank BRI sebagai siswa *Trainee* pada April 1985. Sejak Oktober 1986 diangkat menjadi Staf I (Pegawai Sementara) di Kantor Cabang Semarang, sebagai *Account Officer*, Juli 1988 - Juni 1990 Staf II juga di Kanca Semarang, Juli 1990 - Juni 2007 bertugas sebagai Pemimpin Cabang di beberapa wilayah, pada Juni 2007 Wakil Pimpinan Wilayah (Wapinwil) yang merupakan jabatan eselon II, antara Juli 2007 - Mei 2009 menjadi Wapinwil Manado, antara Juni 2009 - April 2011 menjadi Wapinwil Semarang, dan antara Mei 2011 - April 2012 menjabat Wapinwil Jakarta. Selanjutnya Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 18 April 2012 sampai dengan 19 April 2016 memberikan mandat sebagai Direktur Perseroan. Kemudian diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan RUPS tanggal 20 April 2016.



Zainuddin Mappa

Direktur Operasional & Keuangan

Warga Negara Indonesia, lahir di Barru, pada tanggal 25 November 1961. Menempuh pendidikan terakhirnya S2 Magister Manajemen Bidang Keuangan - Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar lulus tahun 2013. Karir perbankan dimulai di Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1987 sebagai *Trainee*, tahun 1994-1996 sebagai Pemimpin Cabang BRI Selat Panjang, tahun 1997-2000 sebagai Pemimpin BRI Jakarta Segitiga Senen, tahun 2001-2003 sebagai Pemimpin BRI Cabang Jakarta Jatinegara, tahun 2004-2005 sebagai Wakil Pimpinan Wilayah Makassar, tahun 2005-2006 sebagai Wakil Pimpinan Wilayah Medan, tahun 2007-2009 sebagai Wakil Kepala Divisi Bisnis Umum BRI, tahun 2009-2010 sebagai Pemimpin Wilayah BRI Medan, tahun 2010-2012 sebagai Kepala Divisi Bisnis Umum BRI, tahun 2012-2014 sebagai Inspektur Kantor Inspeksi BRI Semarang, tahun 2014, sebagai Kepala Divisi Agribisnis BRI. Selanjutnya pada RUPS tanggal 25 Maret 2015 memberikan mandat sebagai Komisaris Perseroan, dan pada RUPS tanggal 20 April 2016 diangkat sebagai Direktur Perseroan.

Pengangkatan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. Kpts.30/Dir 01.03/III/2004 tanggal 1 Maret 2004, Perseroan telah menunjuk Hirawan Nur Kustono sebagai *Corporate Secretary* Perseroan dengan riwayat hidup sebagai berikut :

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Sekretaris Perusahaan	Hirawan Nur Kustono	<p>Dasar Penunjukan Sekretaris Perusahaan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. Kpts.30/Dir 01.03/III/2004 tanggal 1 Maret 2004</p> <p>Daftar Riwayat Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riwayat Pendidikan Tahun 1989 memperoleh gelar Sarjana Sains dari Universitas Indonesia - Riwayat Pekerjaan Mengawali karir perbankannya di Bank AGRO sebagai <i>Officer Development Program</i> Perseroan pada tahun 1989. Setelah itu menempati beberapa posisi seperti <i>Electronic Data Processing Officer</i>, <i>Money Market Dealer</i> hingga Kepala Bagian Treasury. Sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, dipercaya sebagai Sekretaris Perusahaan Bank BRI AGRO.

Tugas dan kewajiban dari Sekretaris Perusahaan, sebagai berikut :

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan atau pemangku kepentingan lainnya.
5. Membangun *corporate image* Perseroan melalui fungsi hubungan masyarakat, fungsi hubungan investor, dan fungsi kesekretariatan perusahaan termasuk Biro Direksi dan Dewan Komisaris serta pengelolaan hubungan/pelayanan informasi kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan sesuai visi, misi dan strategi perusahaan.

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite sebagai berikut:

Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada POJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kpts.R.19/Dir.01.02/MSDM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Perubahan Susunan Komite Audit.

Susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
Ketua	Achmad Fachmi	Selaku Komisaris Independen Perseroan, menjabat sebagai Ketua Komite Audit pada tanggal 3 April 2013
Anggota	Setiawan Kriswanto	Sebagai anggota Komite Audit Bank BRI AGRO pada tanggal 18 Januari 2016. Ybs. adalah Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan dan akuntansi di antaranya: - Sebagai <i>Tim Leader</i> di BPKP

		<ul style="list-style-type: none"> - <i>Head Division</i> di BDNI - <i>Chairman</i> of Temporary Management Team - Dosen di Sekolah Tinggi LPPM - Komite Audit PT Timah, BII dan Bank Danamon
Anggota	Eka Sriyantini	<p>Sebagai anggota Komite Audit BRI AGRO pada tanggal 1 Maret 2015 Bertugas di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selama 30 tahun, dari tahun 1983 s/d 2013. Dengan penempatan tugas antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Divisi <i>Treasury</i> selama 9 tahun - Divisi Pendidikan dan Pelatihan selama 4 tahun - Divisi Audit 15 tahun - Jabatan terakhir sebagai Inspektur Yogyakarta

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, sebagai berikut:

Pengendalian Intern:

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit baik internal maupun eksternal dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;

Internal Audit:

- a. Mengkaji kecukupan dari fungsi Audit Internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan dan pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Audit Intern;
- c. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Intern guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- d. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam pemilihan Kepala Auditor Internal.

External Audit:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Eksternal Auditor, mengenai kesesuaian pelaksanaan audit oleh akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
- b. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan eksternal audit guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- c. Mengkaji kompetensi dan independensi dari Auditor Eksternal dan juga merekomendasikan Auditor Eksternal kepada Dewan Komisaris yang akan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

Good Corporate Governance:

Mengkaji kecukupan dan efektifitas dari Pengendalian Internal Perseroan secara menyeluruh termasuk kepatuhan terhadap kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG), serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

Laporan Keuangan:

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;

Pengaduan:

Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kpts. R.20/Dir.01.02/MSDM/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko, maka susunan struktur organisasi Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	KETERANGAN	MASA JABATAN
Achmad Fachmi	Ketua merangkap	Komisaris Independen Perseroan	3 April 2013 - Sekarang

	anggota		
Retno Surdini	Anggota	Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai Staf Diklat Ditjen Industri Kecil - Sebagai Instruktur, Wakil Inspektur, Kadiv Kepatuhan dan Kadiv Diklat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Direktur keuangan di PT BRIngin Gigantara 	18 Februari 2016 - Sekarang
Sihar Moreno Hutabarat	Anggota	Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang akuntansi, diantaranya : <ul style="list-style-type: none"> - Beberapa kali menjadi Pemimpin Cabang BRI thn 1994 s/d 2008 - Wakil Pimpinan Wilayah BRI Tahun 2009 s/d 2012. - Inspektur BRI s/d tahun 2014 	1 Maret 2015 - Sekarang

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan (i) Surat Keputusan Direksi No.Kpts. R. 11/Dir.01.02/MSDM/04/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, maka susunan struktur organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

NAMA	JABATAN	KETERANGAN	MASA JABATAN
Bambang Soepeno	Ketua merangkap anggota	Komisaris Utama merangkap Independen Perseroan	27 Maret 2014 - Sekarang
Roswita Nilakumia	Anggota	Komisaris Perseroan	13 Maret 2012 - Sekarang
A. Karmanita	Anggota	Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia. Mulai berkarir di Bank BRI sejak tahun 1986. Tahun 2008-2009 sebagai Auditor BRI dan sebagai Kepala Divisi SDM di BRIngin Life sejak tahun 2009-2013.	Mei 2013 - Sekarang

Komite-Komite di bawah Direksi

Komite Manajemen Risiko

Dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam menyusun kebijakan umum manajemen risiko serta strategi manajemen risiko termasuk penetapan limit serta penyusunan pedoman pelaksanaan manajemen risiko terkait dengan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal. Memberikan rekomendasi perbaikan, penyempurnaan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasinya.

JABATAN	KETERANGAN
Ketua	Direktur Utama
Sekretaris	Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Hukum
Anggota Tetap	Direksi Perseroan, Kepala Divisi Bisnis Komersial; Kepala Divisi Bisnis Ritel; Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer; Kepala SKAI; Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko & Hukum.
Anggota Tidak Tetap	<u>Kepala Divisi Pengendalian Risiko Kredit dan Kepala Divisi Operasional</u> untuk membahas mengenai masalah Manajemen Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis dan Risiko Kepatuhan. <u>Kepala Divisi Operasional</u> , Kepala Divisi Kantor Pusat Operasional, Kepala Divisi MSDM, dan Kepala Divisi Teknologi Informasi, untuk membahas mengenai masalah Manajemen Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Strategis dan Risiko Kepatuhan. <u>Kepala Desk Treasury</u> dan Kepala Divisi Operasional untuk membahas mengenai masalah Manajemen Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas. <u>Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan</u> untuk membahas mengenai masalah Manajemen Risiko Reputasi dan Risiko Strategis.

Asset and Liabilities Committee (ALCO)

Dibentuk untuk memantau kinerja perbankan nasional yang bersumber data yang diterbitkan Bank Indonesia,

selanjutnya mengidentifikasi perkembangan produk perbankan, likuiditas dan suku bunga kredit dan suku bunga dana. Selanjutnya menetapkan pengelolaan aset dan liabilitas secara terpadu serta menetapkan suku bunga dasar simpanan, pinjaman dan *fund transfer price*. Komite ditugaskan untuk memastikan pengelolaan aset dan liabilitas dilaksanakan sesuai dengan Rapat ALCO.

JABATAN	KETERANGAN
Ketua merangkap anggota	Direktur Utama
Ketua pengganti I merangkap anggota	Direktur Operasional dan Keuangan
Ketua pengganti II merangkap anggota	Direktur Bisnis
Sekretaris merangkap anggota	Kepala <i>Desk Treasury</i>
Anggota	Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Bisnis Agro, Kepala Divisi Bisnis Umum, Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer, Kepala Divisi Dana dan Jasa, Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Hukum, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dibentuk untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait rencana strategis teknologi informasi, kebijakan teknologi informasi dan kesesuaian pengembangan teknologi informasi dengan rencana strategis.

JABATAN	KETERANGAN
Ketua I	Direktur Operasional dan Keuangan
Ketua II	Direktur Kepatuhan
Sekretaris merangkap anggota	Kepala Divisi Teknologi Informasi
Anggota	Kepala Divisi Operasional, Kepala Divisi Bisnis Agro, Kepala Divisi Bisnis Umum, Kepala Divisi Bisnis Ritel dan Konsumer, Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Hukum.

Piagam Audit Intern

Untuk memenuhi POJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal dan Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum ("SPFAIB") yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum sebagai ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh Bank sebagai perusahaan publik serta untuk memastikan terselenggaranya fungsi audit intern Bank yang efektif melalui kesamaan pemahaman dan dukungan komitmen mengenai visi, misi, struktur dan kedudukan, kewenangan, fungsi, tugas, tanggungjawab, independensi dan ruang lingkup pekerjaan audit intern Bank, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menetapkan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).

Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BRI AGRO No. Kpts.09.A/Dir.01/MSDMV/2013, tanggal 29 Mei 2013, tentang Penempatan Karyawan Sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Terhitung mulai tanggal 24 Mei 2013 menempatkan Sdr. Agus Suprpto sebagai Kepala Satuan Kerja Audit dibantu oleh seorang Wakil Kepala SKAI dan seorang Kepala Grup Auditor.

Tujuan adanya divisi ini adalah untuk menjadi mitra kerja yang independen, obyektif, profesional, terpercaya dan tanggap (*Strategic Business Partner*) untuk mendukung tugas Direksi dan jajaran manajemen dalam usaha mencapai sasaran perusahaan dengan cara:

1. Melaksanakan peran sebagai mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis bank melalui kegiatan audit dengan pendekatan konsultatif dan proaktif;
2. Membantu manajemen mendapatkan penilaian yang obyektif dan berkualitas terhadap pelaksanaan kegiatan Bank;

3. Mendorong manajemen meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
4. Mendorong efektifitas pengelolaan risiko (*risk management*) dan pengendalian internal Bank agar dapat memberi nilai tambah serta meningkatkan kualitas pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar sehingga kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* lainnya dapat terpenuhi.

Tugas dan Wewenang Satuan Kerja Audit Intern adalah sebagai berikut:

Tugas Satuan Kerja Audit Intern:

1. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
2. Satuan Kerja Audit Intern melaksanakan audit di semua Unit Kerja BANK BRI AGRO antara lain Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, secara independen, obyektif dan profesional.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
5. Satuan Kerja Audit Intern memberikan penilaian tingkat keyakinan kualitas pelaksanaan tugas atas proses manajemen risiko, sistem pengendalian intern dan tata kelola usaha telah dilaksanakan secara cukup dan efektif.
6. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis BANK BRI AGRO untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan bisnis BANK BRI AGRO dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan para *stakeholders*.
7. Menyerahkan hasil audit kepada pihak internal dan eksternal secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
8. Menjaga hubungan baik dengan *Auditee*, Eksternal Auditor dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja Satuan Kerja Audit Intern.

Wewenang Satuan Kerja Audit Intern

1. Memiliki kewenangan didalam akses terhadap seluruh data catatan-catatan perusahaan, pegawai, asset dan kekayaan atau kepemilikan Bank BRI AGRO yang berkaitan dengan penugasan auditnya.
2. Menguji, memeriksa, dan menilai kelengkapan, keakuratan, keabsahan, keberadaan, kepemilikan serta kewenangan akses terhadap seluruh transaksi dan dokumen Bank BRI AGRO, misalnya transaksi harian, catatan akuntansi (asset, kewajiban, modal, perhitungan laba/rugi, kontijensi dan komitmen) serta sumber daya manusia.
3. Memonitor, menindaklanjuti dan mengevaluasi langkah perbaikan atas temuan audit yang diambil oleh *Auditee*.
4. Memiliki akses langsung kepada Komite Audit, Komisaris, Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya dalam kaitan dengan obyek audit.
5. Menyusun dan mengubah Kebijakan dan Prosedur Audit Intern serta ruang lingkup pekerjaan audit sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal/internal dan kebutuhan Audit Intern Bank BRI AGRO.
6. Menetapkan *competency profile* dan *key performance indicator* Audit Intern dalam rekrutmen/seleksi, promosi, rotasi dan pendidikan profesional yang dilakukan terus menerus (*continuous improvement*).

Audit internal Perseroan mempunyai peran yang sangat penting dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan dalam pelaksanaan audit ke seluruh objek audit, audit intern telah mengimplementasikan audit berdasarkan risiko (*risk based audit*).

Komite Kredit Kantor Pusat

Komite kredit kantor pusat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BRI AGRO No. Kpts.01/DIR.01.03/KK/05/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDMK) Bank BRI AGRO beserta perubahannya pada Surat Keputusan Direksi B.06/SE/DIR.01.03/KK/08/2014 tanggal 07 Agustus 2014 tentang Revisi Putusan Delegasi Wewenang Kredit (PDMK) Bank BRI AGRO, Pelaksanaan PDMK sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Komite Kredit, yang terdiri dari:

1. Komite Kredit I: Ketua (Direktur Utama), Anggota (Direktur Bisnis dan Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Pendanaan), dan Sekretaris (Bagian Operasional Kredit)
2. Komite Kredit II: Ketua (Direktur Bisnis), Anggota (Direktur Pengendalian Risiko Kredit dan Pendanaan), dan Sekretaris (Bagian Operasional Kredit)
3. Komite Kredit III: Ketua (Kepala Divisi Pengendalian Risiko Kredit), Anggota (Kepala Divisi Ritel dan Konsumer), dan Sekretaris (Bagian Operasional Kredit)

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, merumuskan pedoman untuk evaluasi kinerja karyawan dan menangani kompensasi karyawan dan isu-isu yang bermanfaat. Unit kerja ini juga bertanggung jawab untuk merekrut dan menugaskan karyawan untuk berbagai departemen, pelatihan dan pengembangan, dan jenjang karir manajemen serta menjaga hubungan baik antara Perseroan dan karyawan.

Sebagai bagian dari usaha Perseroan untuk memperkuat budaya Perseroan, Perseroan telah mengadopsi nilai-nilai perusahaan sebagai berikut:

1. Kepuasan Nasabah - Memberikan pelayanan melebihi yang diharapkan oleh nasabah (baik internal maupun eksternal).
2. Inovasi - Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi Perseroan.
3. Keteladanan - Mulai dari diri sendiri menjadi suri teladan dalam berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai budaya kerja Perseroan.
4. Profesionalisme - Kompeten di bidangnya dan senantiasa mengembangkan diri sehingga menghasilkan kinerja terbaik.
5. Integritas - Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan Perseroan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.
6. Penghargaan Kepada Sumber Daya Manusia - Perusahaan senantiasa mengembangkan dan memberikan penghargaan yang layak kepada seluruh sumber daya manusia Bank BRI AGRO.

Profil Sumber Daya Manusia Perseroan

Total sumber daya manusia Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 sebanyak 628 orang. Dibandingkan tanggal 31 Desember 2015 sebanyak 592 orang, maka jumlah sumber daya pada akhir bulan Juni 2016 mengalami peningkatan sebesar 36 orang. Peningkatan ini terjadi antara lain karena adanya perekrutan karyawan baru melalui jalur *Officer Development Program* (ODP) serta perekrutan karyawan baru dalam rangka pembukaan cabang baru.

Tabel Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan Per 30 Juni 2016

NO	JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN					
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2
1	Kepala Divisi	11	0	0	0	0	6	5
2	Wakil Kepala Divisi	3	0	0	0	1	0	2
3	Kepala Bagian/Kepala Grup/Setingkat Kabag	30	0	0	0	4	21	5
4	Kepala Cabang	16	0	0	0	0	13	3
5	Kepala Bidang (di bawah Kacab)	55	0	0	1	5	47	2
6	Kepala Cabang Pembantu	18	0	0	0	1	14	3
7	Kepala Kantor Kas	4	0	0	0	0	4	0
8	Staff	128	0	0	0	10	107	11
9	Pelaksana	362	0	0	4	58	295	5

10	MPP	1	0	0	0	0	1	0
11	Tenaga Spesialis	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		628	0	0	5	79	508	36

Catatan : Sepanjang tahun 2015 dan Semester I tahun 2016 Perseroan membuka Kantor Cabang Solo, Cikarang, Kantor Cabang Pembantu Ciputat dan Gresik, sehingga jumlah Penimpin Cabang menjadi 16 orang, dan Penimpin Cabang Pembantu menjadi 18 Orang.

Tabel Komposisi Berdasarkan Usia

KETERANGAN	30 JUNI 2016	31 DESEMBER	
		2015	2014
Di atas 55 tahun	7	6	5
> 51 – 55 tahun	26	22	17
> 46 – 50 tahun	44	49	37
> 41 – 45 tahun	43	41	51
> 36 – 40 tahun	67	63	66
> 31 – 35 tahun	124	120	95
> 26 – 30 tahun	241	212	174
> 20 – 25 tahun	76	79	102
Total	628	592	547

Tabel Komposisi Pegawai Tetap dan Kontrak

KETERANGAN	30 JUNI 2016	31 DESEMBER	
		2015	2014
Pegawai Tetap	212	194	366
Pegawai Kontrak	416	398	181
Total	628	592	547

Pemenuhan Terhadap Ketentuan Upah Minimum

KANTOR CABANG	UPAH MINIMUM (RP)	PROPINSI	UMR (RP)
KPO & Cab Jakarta	3.690.000	DKI Jakarta	3.100.000
Medan	3.043.170	Sumatera Utara	2.271.255
Rantau Prapat	3.043.170	Sumatera Utara	2.271.255
Pekanbaru	3.043.170	Riau	2.146.375
Jambi	3.293.170	Jambi	1.937.775
Lampung	3.043.170	Lampung	1.763.000
Bandung	3.900.000	Jawa Barat	2.626.940
Semarang	3.043.170	Jawa Tengah	1.909.000
Surabaya	3.697.500	Jawa Timur	3.045.000
Balikpapan	3.373.164	Kalimantan Timur	2.225.000
Makassar	3.043.170	Sulawesi Selatan	2.313.625

Berdasarkan data tersebut di atas, upah (minimum) karyawan Perseroan telah memenuhi dan atau melebihi ketentuan upah minimum propinsi seperti yang disyaratkan.

Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu hal yang penting yang mendapat perhatian khusus dari manajemen Perseroan. Peningkatan kesejahteraan karyawan dilakukan dengan mengikutsertakan karyawan dalam Jaminan Sosial melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, fasilitas dana pensiun melalui DPLK, tunjangan kesehatan karyawan dan keluarga melalui sistem asuransi kesehatan maupun Jaminan Sosial – Kesehatan (BPJS-Kesehatan), serta pinjaman lunak karyawan yang disalurkan melalui Koperasi Karyawan.

Hubungan Industrial Karyawan

Sebagai wadah mengharmoniskan hubungan antara pihak perusahaan dan para karyawan, serta mengakomodasi kepentingan karyawan dalam hubungan industrial, maka tahun 2009 telah terbentuk Serikat Karyawan (SEKAR) Bank Agro yang tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta

Selatan No. 579/V/PV/2009, tanggal 5 Mei 2009. Hasil dari hubungan ini adalah telah disahkannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pihak Perseroan dengan Serikat Karyawan yang merupakan implementasi dari peraturan ketenagakerjaan di perusahaan dengan manajemen Perseroan. PKB tersebut terdaftar dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 193/PHIJSK-PKKAD/PKB/XII/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang berlaku sampai dengan 2 Desember 2017.

Introduksi Budaya Perusahaan

Dalam rangka menumbuhkan budaya perusahaan, Perseroan mengelola proses pengenalan nilai-nilai perusahaan secara bertahap. Sampai dengan bulan April 2015, Perseroan telah mengenalkan 10 tindakan awal sebagai berikut:

1. Disiplin waktu dalam hal kehadiran di kantor, acara rapat, dan kegiatan lainnya yang tepat waktu (tidak terlambat);
2. Melakukan doa pagi sebelum bekerja;
3. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan perusahaan secara efisien dan optimal;
4. Menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban ruang kerja dan alat kerja seoptimal mungkin;
5. Menyampaikan laporan secara akurat dan sesuai batas waktunya;
6. Mengangkat telepon meja paling lambat sebelum dering ketiga;
7. Melayani nasabah dengan tersenyum, memberikan sapaan dan salam serta ucapan terima kasih;
8. Membantu rekan kerja (peers) atau anak buah (subordinates) apabila menghadapi kesulitan/masalah dalam bekerja;
9. Saling menghargai di antara karyawan;
10. Memberikan penghargaan/pujian secara langsung kepada karyawan yang berkinerja baik.

Pelatihan dan Pengembangan SDM

Pelatihan yang telah dilaksanakan Perseroan, antara lain:

No.	Jenis Kegiatan
1	Orientasi ODP VI (di Kantor Pusat)
2	Klasikal ODP VI (BRI Corporate University)
3	Sosialisasi SE (Surat Edaran) di Kanca Jambi
4	Sosialisasi Teller pada BI (Kanca Jambi)
5	Pendidikan Pincapem "Manager Development Program for Pincapem Angkatan 4" di BRI Corporate University
6	Tekno Ekonomi Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS)
7	Pendidikan Pincapem "Manager Development Program for Pincapem Angkatan 5" di BRI Corporate University
8	Workshop: Manajemen Risiko Kredit: Panduan Penilaian dan Proses Analisa Risiko Kredit dalam Perspektif Manajemen Risiko (Termasuk Kertas Kerja)
9	Sosialisasi Pengaturan Kembali Mengenai Tindakan Atas Pelanggaran Disiplin Kategori Ringan (KC Jambi)
10	On the Job Training di Perusahaan Perkebunan Sinarmas Group (Kebun Pekanbaru)
11	Half Day Seminar LPPI dengan tema: "Strategi Bank di tengah Turbulensi"
12	E-Learning "Penilaian Agunan" untuk Pinca, Pincapem, dan MP Selindo
13	Sosialisasi OPK di Kanca Solo
14	"Scoring Model & Credit Rating System: Uji Validitas Scoring Model dan Rating System" oleh RMG
15	Pendidikan "Analisa Agunan" (Rangkaian Acara Forkom) oleh Hasan Munir Harahap (MAPPI)
16	Sosialisasi Rasio Keuangan Bank dan Hasil Forkom (KC Jambi)
17	Kupas Tuntas Employee Engagement oleh APINDO
18	Fixed Income Gathering oleh PT. Bumi Putera Capital Indonesia
19	Workshop "New Regulation Update POJK 45/POJK/POJK.03/2015: Prinsip Remunerasi dan Implikasinya Bagi Sistem Kompensasi Perbankan" oleh Infobank Learning Center
20	Pelatihan dan Sosialisasi Pengukuran Risiko Operasional dengan Metode Risk Control & Self Assessment (RCSA)

	dan <i>Loss Database Management</i> (LDM) pada Cabang Cikarang
21	Menyikapi Hasil <i>Judicial Review</i> Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2014 yang berimplikasi pada kebijakan PKWT, <i>Outsourcing</i> dan PHK, serta isu ketenagakerjaan akibat kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN / ICSA (Indonesian Corporate Secretary Assosiation) - Jakarta
22	<i>Refreshment Auditor</i> 2016 / Kanins BRI (Jakarta)
23	<i>E-Learning</i> "Penilaian Agunan" untuk AO KC dan KCP Selindo
24	Pelatihan dan Sosialisasi Pengukuran Risiko Operasional dengan <i>Metode Risk Control & Self Assessment</i> (RCSA) dan <i>Loss Database Management</i> (LDM) pada Cabang Pembantu Ciputat
25	<i>Members Meeting</i> ATM Bersama 2016
26	Pendidikan <i>Enhancement</i> Kebijakan Akuntansi oleh BRI Corporate University
27	<i>The Art Of Persuasion for Funding Officer</i> Batch 1
28	<i>The Art Of Persuasion for Funding Officer</i> Batch 2
29	Tematik Pelaporan LBU 2008 Tahun 2016 / Bank Indonesia (SOLO)
30	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer</i> "The Art of Persuasion" di KCP Bekasi
31	<i>Credit Remedial – Legal Aspect</i> "Prosedur Lengkap Aspek Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah (Termasuk Jaminan dan Strategi Eksekusinya)" / <i>Risk Management Guard</i> (JAKARTA)
32	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer</i> "The Art of Persuasion" di KCP Tebing Tinggi
33	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer</i> "The Art of Persuasion" di Kanca Semarang
34	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer</i> "The Art of Persuasion" di Kanca Solo
35	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer</i> "The Art of Persuasion" di KCP Sidoarjo
36	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer</i> "The Art of Persuasion" di KCP Tangerang
37	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer</i> "The Art of Persuasion" di Kanca Bandung
38	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer</i> "The Art of Persuasion" di Kanca TCD
39	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer</i> "The Art of Persuasion" di Kanca Cikarang
40	Edukasi dan Workshop Pelaporan LKPBU Data Pejabat Eksekutif, Jaringan Kantor, Tenaga Kerja dan Laporan Publikasi Bank Umum Tahun 2016 oleh OJK / Jakarta
41	<i>Practical Behavior Based Interview</i> / PPM Manajemen (Jakarta)
42	<i>Training Day</i> : Panduan Penilaian dan Proses Analisa Risiko Kredit dalam Perspektif Manajemen Risiko (termasuk kertas kerja) instruktur : Martha Gracia / Staf Manajemen Risiko Divisi KMRH
43	ACI World Congress Jakarta 2016 oleh Association Cambiste Internationale (ACI) Indonesia Financial Market Association
44	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer</i> "The Art of Persuasion" di KCP Kebayoran Lama
45	Sosialisasi Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia BCP SKNBI Generasi II Tahun 2016 / BI (Bandung)
46	<i>A Comprehensive Credit Analysis Through 10 Parameters</i> Kupas Tuntas 9 Karakter + 1 Kapasitas Usaha (Termasuk <i>Cash Flow Analysis</i>), Analisa Kebutuhan Modal Kerja dan Investasi / RMG (Jakarta)
47	<i>HR Management for HR Officer</i> / <i>Service Leadership</i> (Jakarta)
48	Pendidikan AO Ritel Selindo / Jakarta
49	Pelatihan Perpajakan dengan tema : PPh 21 - 2016 <i>Update</i> (Konsep Dasar, Perubahan Perhitungan PPh 21 PTKP Terbaru dan Pelaporan dengan e-SPT Sesuai PER-14/PJ.2013 dan Minimalisir Lebih Bayar) oleh Esindo Multi Tata (Jakarta)
50	Tekno Ekonomi Budidaya dan Pengolahan Kelapa Sawit / PPKS (Medan)
51	<i>Training Day</i> "Strategi Bank di Tengah Turbulensi" / Jakarta
52	<i>Managing People</i> / PPM Manajemen (Jakarta)
53	Tutorial BSMR Level 1 oleh Anugrah Citra Cendekia (ACC) / Jakarta
54	Ujian BSMR Level 1 / BSMR Jakarta
55	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer</i> "The Art of Persuasion" di Kanca Balikpapan
56	Pendidikan <i>Teller</i> oleh Bank Indonesia
57	<i>Refreshment</i> BSMR Level 4 (Direksi) : Penyusunan Kebijakan ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) oleh BSMR Jakarta

58	Orientasi Karyawan Baru (Teller) / Jakarta
59	Seminar <i>Winning Talent War Through Employee Branding</i> (Menjadi Perusahaan Idaman Para Pencari Kerja) oleh PPM Manajemen
60	Seminar FKDKP (Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan) : Kesiapan Perbankan Dalam Menghadapi Penilaian <i>Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)</i> Terhadap Indonesia oleh FKDKP / Jakarta
61	<i>E-Learning</i> AO Kantor Pusat "Penilaian Agunan"
62	<i>Training Day</i> KPO - <i>Credit Remedial – Legal Aspect</i> "Prosedur Lengkap Aspek Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah (Termasuk Jaminan dan Strategi Eksekusinya)"
63	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer "The Art of Persuasion"</i> di KC Pekanbaru
64	Sosialisasi Pendidikan <i>Funding Officer "The Art of Persuasion"</i> di KC Medan
65	Orientasi Karyawan Baru (Customer Service) / Jakarta
66	Sosialisasi Profil Bisnis - Bahan Bangunan di KCP Depok
67	Tutorial BSMR Level 1 oleh Anugrah Citra Cendekia (ACC) / Jakarta
68	Ujian BSMR Level 1
69	<i>Effective Leadership</i> oleh PPM Manajemen / Jakarta
70	<i>Effective Leadership</i> oleh Prasetya Mulya / Jakarta
71	Orientasi Karyawan Baru (Account Officer) / Jakarta
72	Sosialisasi Profil Bisnis - Jasa Pendidikan di KCP Depok
73	Sosialisasi Pelatihan Kebakaran dan Pengamanan Gedung oleh TP2KI
74	<i>Practical Problem Solving</i> / PPM Manajemen - Jakarta
75	<i>Effective Supervisory Management</i> / PPM Manajemen - Jakarta
76	Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Level 4 / LSPP Jakarta
77	Antisipasi Pemalsuan Dokumen, Tanda Tangan & Mafia Fraud / M-Knows Consulting - Jakarta
78	Sosialisasi Profil Bisnis - Bengkel Mobil di KCP Depok

E. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN PENYERTAAN

Perseroan memiliki penyertaan saham dengan rincian dibawah ini:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN DIMULAI PENYERTAAN	JENIS USAHA	PEMILIKAN (%)	NILAI TERCATAT (RIBUAN RUPIAH)
1	PT BPR Toelongredjo Dasa Nusantara	1991	Bank	3,00	76.830
2	PT BPR Tjoekir Dasa Nusantara	1991	Bank	3,00	76.818
3	PT BPR Toelangan Dasa Nusantara	1991	Bank	1,50	66.500
4	PT BPR Cintamanis Agroloka	1991	Bank	1,75	35.010
5	PT BPR Bungamayang Agroloka	1991	Bank	2,25	22.500
6	PT Aplikanusa Lintasarta	1994	Non-Bank	0,03	20.000
Total Nilai Penyertaan Saham					297.658

F. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN AFILIASI

Perseroan melakukan transaksi usaha dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai pemegang saham dan/ atau manajemen yang sama dengan Perseroan (selanjutnya disebut "**Pihak Afiliasi**"). Transaksi-transaksi tersebut terutama berhubungan dengan pinjam-meminjam dana dalam kegiatan normal usaha dan secara substansial telah dilakukan dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Persentase jumlah aset Pihak Afiliasi terhadap jumlah aset pada periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar 13,30%, 14,33% dan 16,46%.

Penempatan dana dari Pihak Afiliasi dalam bentuk simpanan:

1. Simpanan Giro dari Pihak Berelasi dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat seluruhnya sebesar Rp91,82 miliar pada tanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp101,33 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 dan sebesar Rp49,01 miliar pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Simpanan Tabungan dari Pihak Berelasi dalam mata uang Rupiah pada tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp4,7 miliar, sebesar Rp6 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 dan sebesar Rp14,13 miliar pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Simpanan Deposito Berjangka dari Pihak Berelasi dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat seluruhnya sebesar Rp131,47 miliar pada tanggal 30 Juni 2016, sebesar Rp281,04 miliar pada tanggal 31 Desember 2015 dan Rp995,83 miliar pada tanggal 31 Desember 2014.

Tidak ada bentuk pengecualian yang diberikan kepada Pihak Afiliasi dalam hal suku bunga penempatan dana.

Tabel berikut menjelaskan transaksi-transaksi dengan Pihak Afiliasi:

(dalam ribuan Rupiah)

No	Jenis Transaksi	Nama Pihak Terafiliasi	Bentuk Hubungan	Nilai
			Perseroan dengan Pihak Terafiliasi	30 Juni 2016
1.	Giro pada bank lain	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas Induk, Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI	22.563.927
		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		
2.	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI	200.000.000
3.	Efek-efek	Pemerintah RI	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI, Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI, Entitas Induk	721.055.160
		PT BNI Asset Management		
		PT Mandiri Manajemen Investasi		
		PT Perkebunan Nusantara II		
		PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		
		PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk		
4.	Kredit yang Diberikan	PT Perkebunan Nusantara XIII	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI, Hubungan pengendalian melalui entitas induk	307.229.482
		PT Perkebunan Nusantara II		
		PT Mega Eltra		
		PT Laras Astra Kartika		
		PT Perkebunan Mitra Ogan		
		PT Perkebunan Nusantara XIV		
		PT Bringin Srikandi Finance		
		PT Bringin Gigantara		
5.	Giro	Entitas dan lembaga Pemerintah dan lain-lain	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI	91.815.340
6.	Tabungan	Entitas dan lembaga Pemerintah, karyawan kunci dan lain-lain	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI	4.702.607
7.	Deposito	Entitas dan lembaga Pemerintah, karyawan kunci dan lain-lain	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI	131.466.662
8.	Simpanan dari bank lain	Entitas dan lembaga Pemerintah	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI	39.637.500
9.	Garansi Bank yang diterbitkan	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas induk, Hubungan pengendalian melalui Dana Pensiun Perkebunan	1.126.185
		PT Asuransi Jasa Tania		

G. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama antara PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia

Agroniaga Tbk. Tanggal 23 Desember 2015 tentang penggunaan sistem aplikasi ATM BRI AGRO dan penempatan ATM BRI di unit kerja BRI AGRO No. B.186/KJE/12/2015 dan No. SR-29/Dir.05/12/2015 yang berlaku selama 2 tahun t.m.t 23 Desember 2015 s/d 30 November 2017.

2. Perjanjian Kerja Sama Pendanaan dalam rangka Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dengan pemerintah Republik Indonesia no.PKP-007/KKP-E/DP3/2007 tanggal 1 November 2007, yang terakhir diubah dengan perubahan perjanjian no AMA-04/PPK-07/KKP-E/DSMI/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dengan jumlah baki debit (*outstanding*) dari waktu ke waktu setinggi-tingginya sebesar Rp. 343.000.000.000,-.
3. Perjanjian kerjasama pendanaan dalam rangka kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) dengan Pemerintah Republik Indonesia No.PKP-08/KPEN-RP/DP3/2007 tanggal 7 Desember 2007 dengan jumlah baki debit (*outstanding*) dari waktu ke waktu setinggi-tingginya sebesar Rp. 300.000.000.000,-.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenant) terkait perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham.

H. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus diterbitkan, Perseroan terlibat dalam perkara sebagai berikut:

1. Perkara Perdata

- 1.1. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 157/Pdt.G/2011/PN.BKS., tanggal 04 April 2011 - Bank BRI AGRO Kantor Pusat.

Gugatan PMH diajukan oleh Penggugat (Eva Damayanti salah seorang ahli waris dari pemilik bidang tanah dan bangunan SHM 2101/Jati Waringin) yang telah diserahkan oleh Idun Saefudin Direktur PT. Solusi Teknik Mandiri kepada Perseroan sebagai jaminan atas hutang PT. Solusi Teknik Mandiri dimaksud dalam: (1) Fasilitas Kredit Pinjaman Tetap Reguler (Kredit Modal Kerja) dengan plafon sebesar Rp 1.000.000.000,-, Kredit Pinjaman Modal Kerja Rekening Koran (PRK II) dengan plafon sebesar Rp 1.000.000.000,-, (2) Pinjaman Regular (revolving) II dengan plafon sebesar Rp 4.000.000.000,- dan (3) Pinjaman Regular (revolving) III dengan plafon sebesar Rp 5.000.000.000,-. Penggugat mendalilkan mengenai pengalihan harta waris sehingga menjadi milik Idun Saefudin tanpa diketahui dan disetujui oleh Penggugat. Di dalam petitum gugatan, Penggugat antara lain mengajukan permohonan (1) Pembatalan Akta Jual Beli atas HM 2101/Jati Waringin, (2) Menyatakan dokumen hak tanggungan tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum.

Gugatan tersebut telah dikabulkan oleh PN Bekasi dalam Putusan Nomor: 157/Pdt.G/2011/PN.Bks tanggal 18 April 2012 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 012/Pdt/2013/PT.BDG, tanggal 26 Maret 2013.

Perkara ini sedang dalam proses Kasasi berdasarkan Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 157/Pdt.G/2011/PN.Bks Jo. 012/Pdt/2013/PT.BDG. Jo. No. 29/Akta.K/2013/PN.Bks, tanggal 27 Mei 2013.

Potensi kerugian Perseroan adalah lepasnya benda jaminan jika putusan pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat.

- 1.2. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Cianjur Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.CJ, tanggal 23 Agustus 2013 - Perseroan Kantor Pusat.

Gugatan PMH diajukan oleh Penggugat (Henry Rostoe Pringgodigdo) yang mendalilkan sebagai pemegang hak atas bidang tanah SHM 248/Palasar dan SHM 266/Palasar yang telah diserahkan kepada Perseroan sebagai jaminan hutang Debitur (PT Anugrah Bersama),

dimkasud pada : (1) Fasilitas kredit Pinjaman Rekening Koran dengan total plafon sebesar Rp 3.000.000.000,- dan (2) Pinjaman Tetap Reguler dengan total plafon sebesar Rp 1.250.000.000. Penggugat mengajukan gugatan PMH dengan dalil objek jaminan yang diserahkan oleh Debitur kepada Perseroan adalah milik Penggugat yang dititipkan kepada Deirektur Debitur yang tidak pernah dijual. Di dalam petitum gugatan, Penggugat antara lain telah mengajukan permohonan (1) Menyatakan SHM 248/Palasari dan SHM 266/Palasari adalah milik Penggugat, (2) menyatakan akta jual beli batal, tidak mempunyai kekuatan hukum, (3) menyatakan balik nama kedua sertipikat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

PN Cianjur dalam Putusan Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.Cj tanggal 20 Mei 2014 telah menerima gugatan Penggugat. Namun Putusan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 465/Pdt/2014/PT.Bdg, tanggal 29 Januari 2015 telah menolak keseluruhan gugatan Penggugat.

Perkara ini sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kasasi No. 465/Pdt/2014/PT.Bdg. Jo. 32/Pdt.G/2013/PT.Cj. Jo. No. 29/Akta.K/2013/PN.Bks, tanggal 8 Juli 2015.

Potensi kerugian bagi Perseroan adalah lepasnya benda jaminan jika putusan pengadilan mengabulkan penggugat.

- 1.3. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 13/Pdt.G/2014/PN.BJ, tanggal 28 April 2014, - Perseroan Kantor Cabang Medan.

Gugatan PMH diajukan oleh pemegang hak atas bidang tanah (SHM 388/Kel. Satria) yang telah diserahkan kepada Perseroan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterima oleh Debitur (CV. Putra Melayu) di mana Penggugat adalah salah satu sekutu komanditer pada CV tersebut. Pembayaran atas fasilitas kredit ini macet, kemudian aset jaminan dilakukan eksekusi lelang oleh Perseroan. Penggugat mendalilkan tidak mengetahui dan tidak menyetujui kredit yang diterima oleh CV. Putra Melayu. Di dalam petitum gugatan, Penggugat antara lain telah mengajukan permohonan (1) Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan, (2) menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penanggungan SHM 388/Kel. Satria.

PN Binjai dalam Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2014/PN.BNJ tanggal 28 Desember 2014 telah menerima gugatan Penggugat untuk sebagian dengan menyatakan dokumen-dokumen penjaminan tidak sah dan melarang pelaksanaan lelang. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 323/PDT/2015/PT-MDN tertanggal 15 Februari 2016 menerima permohonan banding dari Perseroan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan kasasi dengan register Perkara No.7/PDT.Kasasi/2016/PN.BJ yang hingga saat ini masih dalam proses di Mahkamah Agung.

Potensi kerugian yang dapat menjadi beban Perseroan adalah lepasnya benda jaminan jika putusan pengadilan mengabulkan Penggugat.

- 1.4. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.RGT., tanggal 2 Maret 2015 - Perseroan Cabang Pekanbaru.

Gugatan PMH yang diajukan oleh Penggugat terhadap Perseroan dan 22 Tergugat lainnya dengan dalil Penggugat adalah pemegang hak atas tanah (berdasarkan Surat Keterangan Tanah) di mana tanah tersebut telah menjadi jaminan yang diserahkan oleh Debitur orang perseorangan (Tergugat XVII, XVIII, XIX, XX dan XXI) yang menerima kredit oleh Perseroan Bidang tanah yang dijadikan jaminan kepada BRI Agro adalah sebanyak 12 SHM yang terdiri

dari SHM 116, SHM 117, SHM 118, SHM 119, SHM 120, SHM 121, SHM 122, SHM 123, SHM 124, SHM 125, SHM 126 dan SHM 127. Penggugat mendalilkan sebagai pemilik lahan seluas 20 Ha yang kemudian telah diterbitkan 12 SHM dalam nama para tergugat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan dengan petitum antara lain: (1) Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap kebun kelapa sawit seluas 20 Ha yang terletak di Dusun Sumber Rejeki Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi ; (2) Memerintahkan kepada Tergugat V yakni Badan Pertanahan Nasional / Badan Pertanahan Kabupaten Kuansing untuk mencabut dan atau membatalkan 12 Sertifikat Hak Milik.

PN Rengat dalam Putusan Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.RGT, tanggal 2 November 2015, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan (para) Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Namun Putusan Tingkat Banding Nomor: 74/PDT/2016/PT-PBR, tertanggal 26 Juli 2016 menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat (Perseroan) dan dalam pokok perkara menyatakan membatalkan putusan PN Rengat.

Penggugat/Terbanding mengajukan upaya hukum Kasasi berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi No. 74/Pdt/2016/PT.PBR jo. 10/Pdt.G/2015/PN.RGT, tanggal 25 Agustus 2016.

Potensi kerugian yang dapat menjadi beban Perseroan adalah lepasnya benda jaminan jika putusan pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat.

1.5. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Semarang No.159/Pdt.G/2016/ PN.SMG tanggal 6 April 2016 - Perseroan Cabang Semarang

Gugatan PMH diajukan oleh Pihak yang mendalilkan telah meminjamkan sementara SHM No. 358/Tambakaji dengan luas 204 m² (objek jaminan) kepada Zaenal Arifin selaku pengurus Koperasi Sinergi Inti Artha, berkaitan dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (LPDB-KMUKM) sebagai jaminan sementara untuk mendapatkan dana bergulir. Pinjaman ini kemudian tidak dapat dibayar lunas yang mengakibatkan jaminan SHM No. 358/Tambakaji tidak dapat diberikan. Atas Kondisi tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di PN Semarang dengan register Perkara No. 159/Pdt.G/2016/PN. Smg. Sekaligus Sita Jaminan terhadap SHM No. 1811/Lemper Tengah dan SHM No. 1812/Lemper Tengah. Kedua Sertipikat tersebut telah diserahkan kepada Perseroan sebagai jaminan atas fasilitas kredit PT. Sinergi Inti Artha. Sehubungan dengan permohonan sita jaminan tersebut, Perseroan telah mengajukan Intervensi.

Saat ini Perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Semarang.

Potensi kerugian yang dapat menjadi beban Perseroan adalah lepasnya benda jaminan jika putusan pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat.

1.6. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Semarang No. 247/Pdt.G/2016/PN.SMG, tanggal 09 Juni 2016 - Perseroan Kantor Pusat

Gugatan PMH yang diajukan oleh Penggugat (Anik Utaminingsih) terhadap Perseroan adalah berkaitan dengan rencana Perseroan melakukan lelang atas jaminan SHM No. 346/Tembalang, yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Perseroan. Penyerahan objek jaminan oleh Penggugat kepada Perseroan adalah sehubungan dengan *take over* hutang Penggugat di Bank Danamon, Tbk. Hutang kepada BRI ini tidak dapat dibayar kembali oleh Penggugat yang selanjutnya akan dilakukan lelang atas jaminan SHM No. 346/Tembalang. Sehubungan dengan upaya lelang tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Gugatan PMH

dengan Register Perkara di PN Semarang No. 247/Pdt.G/2016/PN.SMG, tanggal 9 Juni 2016, dengan petitum gugatan antara lain : (1) Menyatakan sah dan berhak atas sita jaminan SHGB No. 346/Tembalang ; (2) Menyatakan *Take Over* hutang adalah perbuatan curang ; (3) Menyatakan Lelang yang dijalankan tidak sah karena perikatan telah daluarsa, maka batal demi hukum.

Saat ini perkara tersebut dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama pada PN Semarang.

Potensi kerugian bagi Perseroan adalah lepasnya benda jaminan jika putusan pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat.

1.7. Perkara Gugatan Perlawanan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dalam Register Perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN.Uhr, tanggal 8 Agustus 2016 - Bank BRI AGRO Cabang Semarang

Perlawanan ini diajukan oleh Pelawan (CV. Cahayamas Yuwono) sebagai Debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari Perseroan senilai Rp. 500.000.000,-. Fasilitas kredit dijamin dengan tanah dan bangunan milik Pelawan. Pelawan mengalami wanprestasi pembayaran dengan sisa hutang sebesar Rp. 414.029.162,-. Berdasarkan hal tersebut Perseroan melakukan lelang terhadap tanah dan bangunan yang menjadi jaminan, dengan lelang senilai Rp. 500.000.000,-. Pelawan mendalilkan bahwa dalam keadaan riil jaminan nilai dari tanah dan bangunan yang menjadi jaminan tersebut adalah senilai Rp. 2.120.119.000,-. Pelawan mengajukan gugatan perlawanan lelang eksekusi hak tanggungan di PN Semarang dengan Register Perkara No. 65/Pdt.G/2016/PN.Ungaran., tanggal 8 Agustus 2016, dengan petitum gugatan antara lain : Menyatakan perbuatan Perseroan dan Terlawan lain tidak sesuai dengan prosedur yang benar.

Saat ini perkara tersebut dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama pada PN Semarang.

Potensi kerugian bagi Perseroan adalah lepasnya benda jaminan jika putusan pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat.

1.8. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Register Perkara No. 339/Pdt.G/2016/PN.Mdh, tanggal 24 Juni 2016 - Bank BRI AGRO Cabang Medan

Gugatan PMH ini diajukan oleh Penggugat (CV. Makmur Rezeki) sebagai Debitur yang menerima fasilitas kredit berbentuk Modal Kerja Kontraktor (Revolving) sebesar Rp. 950.000.000,- dari Perseroan dengan memberikan jaminan berupa SHM No. 3878 seluas 139 m² atas nama Zulkamaen Pohan. Dikarenakan Penggugat wanprestasi, maka Perseroan akan melakukan lelang hak tanggungan terhadap objek jaminan melalui Kantor Pelayanan dan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan. Penggugat mengajukan gugatan di PN Medan dengan Register Perkara No. 339/Pdt.G/2016/PN.MDN, tanggal 24 Juni 2016, dengan petitum gugatan antara lain menghukum Tergugat II (KPKNL Medan) tidak melakukan lelang eksekusi atas benda jaminan.

Saat ini perkara tersebut sedang dalam pemeriksaan persidangan tingkat pertama pada PN Medan.

Potensi kerugian bagi Perseroan adalah terhambatnya proses lelang terhadap benda jaminan jika putusan pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Perkara Sengketa Konsumen

2.1. Sengketa Konsumen dalam Register Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Batu Bara No. 03/Arbitrase/BPSK/BB/1/2016, tanggal 28 Desember 2015 - Bank BRI AGRO Cabang Rantau Prapat.

Gugatan ini diajukan oleh Debitur, Muhamad Arif Siregar / selaku Konsumen yang menerima

fasilitas kredit pinjaman rekening koran dari Perseroan dengan jumlah pinjaman kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan: 1) SHM No. 189/Desa Ujung Bandar; 2) SHM No. 183/Desa Danau Balai; 3) SHM No. 180/Desa Danau Balai dan 4) SHM No. 64/Desa Bandar Tinggi. Debitur wanprestasi dengan sisa pinjaman pokok sebesar Rp 500.000.000. Selanjutnya Debitur mengajukan permohonan kepada Perseroan agar dapat menanggihkan pembayaran angsuran suku bunga setiap bulannya, Debitur mendalilkan bahwa Perseroan tidak mempertimbangkan permohonan penangguhan tersebut dan melakukan lelang terhadap jaminan fasilitas kredit.

Berdasarkan hal tersebut Debitur mengajukan permohonan penyelesaian sengketa secara arbitrase pada BPSK Kab. Batu Bara dengan register No. 03/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016, tanggal 28 Desember 2015 dengan petitum gugatan antara lain : (a) Menyatakan Perjanjian Kredit antara Konsumen (Muhamad Arif Siregar) dengan Pelaku Usaha (Perseroan) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.; (b) menyatakan Pelaku Usaha yang akan / telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum adalah perbuatan melawan hukum.

BPSK Kab. Batu Bara dalam Putusan 03/Arbitrase/BPSK-BB/II/2016, tanggal 23 Maret 2016, mengabulkan gugatan Konsumen antara lain, Menyatakan Perjanjian Kredit antara Konsumen (Muhamad Arif Siregar) dengan Pelaku Usaha (Perseroan) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya PN Rantau Prapat dalam Putusan No. 32/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN-RAP, tanggal 30 Mei 2016 memberi putusan antara lain : Menyatakan permohonan Keberatan Pemohon (Perseroan) tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijke Verklaard*).

Saat ini Perseroan mengajukan upaya hukum kasasi terhadap Putusan No. 32/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN-RAP tersebut.

Potensi kerugian bagi Perseroan adalah lepasnya benda jaminan jika putusan pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat.

2.2. Sengketa Konsumen dalam Register Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. Batu Bara No. 116/P3K/JS-III/BPSK-BB/II/2016, tanggal 13 Januari 2015 - Bank BRI AGRO Cabang Rantau Prapat

Gugatan ini diajukan oleh Debitur, Siti Rohani Hasibuan / selaku Konsumen yang menerima fasilitas kredit dari Perseroan sejumlah Rp 600.000.000,- dengan jaminan HIM No. 73/Desa/Kel. Kampung Pajak. Selanjutnya Konsumen mengajukan permohonan kepada Pelaku Usaha (Perseroan) agar diberikan keringanan pembayaran angsuran setiap bulannya atau dapat menanggihkan angsuran untuk sementara waktu serta dibebaskan dari bunga dan denda tunggakan akibat keterlambatan pembayaran. Debitur mendalilkan bahwa Perseroan tidak mempertimbangkan permohonan penangguhan tersebut dan akan melakukan lelang terhadap jaminan fasilitas kredit.

Berdasarkan hal tersebut Debitur mengajukan permohonan penyelesaian sengketa secara arbitrase di BPSK Kab. Batu Bara dengan petitum gugatan antara lain : (a) Menyatakan Perjanjian Kredit antara Konsumen (Siti Rohani Hasibuan) dengan Pelaku Usaha (Perseroan) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.; (b) Menyatakan Pelaku Usaha yang akan / telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum adalah perbuatan melawan hukum.

BPSK Kab. Batu Bara dalam Putusan No. 116/P3K/JS-III/BPSK-BB/II/2016, 17 Juni 2016, mengabulkan gugatan antara lain, Menyatakan Perjanjian Kredit antara Konsumen (Siti Rohani Hasibuan) dengan Pelaku Usaha (Perseroan) batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya PN Rantau Prapat dalam Putusan No. 70/Pdt.G/2016/PN-RAP, tanggal 2 September 2016, memberi putusan antara lain : Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan BPSK Kab. Batubara No. 116/P3K/JS-III/BPSK-BB/II/2016, 17

Juni 2016

Perseroan belum memperoleh konfirmasi atas putusan tersebut.

Potensi kerugian bagi Perseroan adalah lepasnya benda jaminan jika putusan pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat.

3. Perkara Niaga

Perkara Niaga dalam Register Perkara di Pengadilan Niaga pada PN Medan No. 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Mdh, tanggal 12 Agustus 2015 - Bank BRI AGRO Cabang Pekanbaru.

Termohon PKPU (Koperasi Karyawan Nusantara V) sebagai Debitur telah diajukan PKPU oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Bahwa Termohon PKPU tersebut juga mempunyai utang kepada Perseroan yang sudah jatuh tempo. Jumlah utang Termohon PKPU kepada Perseroan sebesar Rp. 10.131.449.257,-.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan setelah masa PKPU menjatuhkan Putusan No. 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Mdh, tanggal 7 Desember 2015, yang menyatakan Termohon Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Termohon saat ini sedang dalam keadaan insolvensi berdasarkan Penetapan No. 01/HP/08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN-Niaga.Mdh., tanggal 18 Januari 2016.

Status perkara ini dalam proses penyelesaian budel pailit dimana hak kebendaan Perseroan atas benda jaminan adalah berupa tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan alat/mesin.

4. Perkara Tata Usaha Negara

Perkara TUN dalam Register Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.45/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 29 Juli 2015 - Bank BRI AGRO Cabang Rantau Prapat.

Gugatan Perkara TUN diajukan oleh Penggugat (PT. Belungkut) yang mendalilkan sebagai pemegang HGU No. 1//Belungkut yang mana pada areal HGU No.1/Belungkut telah diterbitkan 39 Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu. Terhadap Penerbitan SHM tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan TUN di PTUN Medan yang memohon antara lain agar menyatakan batal dan mencabut Surat-surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu mengenai penerbitan 39 SHM tersebut.

Perseroan selaku pemegang Hak Tanggungan atas 13 SHM dari 39 SHM tersebut, mengajukan permohonan sebagai Tergugat Intervensi untuk melindungi kepentingannya.

PTUN Medan dalam Putusan No.45/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2016, tidak menerima gugatan Penggugat dengan putusan antara lain : (1) Menerima eksepsi Para Tergugat; (2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima. Selanjutnya Pengadilan Tinggi TUN Medan dalam Putusan No. 95/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 20 Juli 2016, memberi putusan antara lain : menguatkan Putusan PTUN Medan No.45/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 10 Maret 2016.

Saat ini perkara tersebut dalam proses Kasasi berdasarkan upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi No. 45/G/2015/PTUN-MDN jo. No. 95/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 5 September 2016.

Potensi kerugian bagi Perseroan adalah lepasnya benda jaminan jika putusan pengadilan mengabulkan gugatan penggugat.

5. Perkara Pidana

- 5.1. Perkara Pidana dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Register Perkara di Pengadilan Negeri Medan No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, No. 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN dan No. 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.MDN, tanggal 26 Agustus 2015 - Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu S Parman.

Perkara pidana ini sehubungan dengan dugaan manipulasi / fiktif penyaluran kredit yang diduga telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yaitu mantan Kepala Cabang Pembantu S Parman, Account Officer pada Kantor Cabang Pembantu S. Parman serta Ketua Koperasi Karyawan PT. Pertamina UPMS-I.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama tentang Penyaluran dan Pengelolaan Fasilitas Kredit Karyawan (Chanelling) Nomor: BA/SP-28/Dir.04/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012, Bank BRI AGRO Kantor Cabang Pembantu S Parman telah menyalurkan kredit kepada karyawan PT. Pertamina UPMS-I Medan dan Koperasi Karyawan dengan total kredit yang telah dicairkan terakhir pada November 2012 untuk 589 karyawan sebesar Rp 25.150.529.433,-. Pada saat pembayaran terakhir pada Mei 2014 dengan saldo outstanding sebesar Rp 19.093.795.611,- status pinjaman macet.

Perseroan, menemukan fakta terjadinya manipulasi data fiktif karyawan dan sehubungan dengan kejadian tersebut telah mengajukan laporan pidana pada Kejaksaan Tinggi Medan dengan dakwaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pengadilan Tipikor pada PN Medan dalam Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 4 Januari 2016 telah menjatuhkan putusan terhadap Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS-1 Medan dengan putusan antara lain : (1) Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama; (2) Menjatuhkan pidana penjara 11 tahun dan denda 500juta yang apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan 8 bulan..Selanjutnya putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Banding Perkara No. 8/Pid.Sus-TPK/2016 terhadap Ketua Kopkar Pertamina, dengan putusan antara lain : menguatkan putusan Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 4 Januari 2016.

Pengadilan Tipikor pada PN Medan dalam Putusan No. 68/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 4 Januari 2016 telah menjatuhkan vonis terhadap Mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu Medan S. Parman, dengan putusan antara lain : (1) Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama; (2) Menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dan denda 250juta yang apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan 4 bulan. Selanjutnya putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan Banding Perkara No. 9/Pid.Sus-TPK/2016/PT.MDN terhadap Mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu Medan S.Parman, dengan putusan antara lain : (1) Menyatakan terbukti secara sah dan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama; (2) Menjatuhkan pidana penjara 6 tahun dan denda 250juta yang apabila tidak dibayar harus diganti pidana kurungan 4 bulan.

Pengadilan Tipikor pada PN Medan dalam Putusan No. 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn, tanggal 4 Januari 2016 telah menjatuhkan putusan terhadap Mantan Account Officer, dengan putusan antara lain : (1) Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama; (2) Menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda 200juta yang apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan 3 bulan.

Saat ini perkara dimaksud pada Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2016 jo. Putusan No. 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn dan Putusan No. 9/Pid.Sus-TPK/2016 jo. Putusan No. 68/Pid.Sus-

TPK/2015/PN.Mdn dalam proses kasasi yang diajukan oleh Ketua Koperasi dan Mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu Medan S. Parman.

Potensi kerugian saldo outstanding tidak terbayarkan.

- 5.2. Perkara pidana dugaan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud Surat Perintah Penyelidikan No. Pol. SP. Lidik/207/II/2016/Reskrimum, tanggal 24 Februari 2016 - Bank BRI AGRO Banyumanik Semarang

Pelapor (Anik Utaminingsih, S.H) sebagai Debitur Perseroan yang mendalilkan bahwa terdapat kesalahan prosedur dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur tersebut. Anik Utaminingsih melaporkan Perseroan kepada Polda Jawa Tengah dengan dugaan Tindak Pidana Perbankan yang terjadi pada manajemen Perseroan, Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 10 tahun 1998.

Saat ini Perkara tersebut sedang dalam penyelidikan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng

6. Perkara yang melibatkan Komisaris dan Direksi : Tidak ada / Nihil

Terhadap perkara-perkara tersebut diyakini oleh Perseroan tidak akan mempengaruhi kegiatan operasi usaha Perseroan. Perseroan telah mengungkapkan seluruh perkara yang material yang dihadapi Perseroan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini

I. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan seluruh harta kekayaan dan kepentingan Perseroan yang ada pada / dimiliki oleh Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Perseroan, baik atas harta benda maupun kesehatan karyawan. Jenis-jenis pertanggungan yang telah ditutup adalah *property all risk*, kebakaran dan gempa bumi atas harta kekayaan tetap dan bergerak, asuransi *burglary / theft* untuk Kantor Cabang Pekanbaru dan Jambi serta Kantor Cabang Pembantu Kasikan, Lubuk Dalam, Ujung Batu, Air Molek, Bandar Jaya, dan Kantor Kas Dalu-Dalu asuransi *cash in safe / cash in transit* pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, serta asuransi atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Pertanggungan tersebut ditutup pada PT Asuransi BRINS Tbk. yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan oleh Dana Pensiun BRI dan/atau PT Asuransi JASTAN. Persyaratan pertanggungan dan penutupan asuransi pada PT Asuransi BRINS, Tbk dilaksanakan dengan persyaratan yang berlaku umum (*arms length*) sebagaimana dengan pihak ketiga lainnya.

Selain itu Kantor Pusat juga menutup asuransi Kumpulan Asuransi Jiwa Berjangka dan Asuransi Kesehatan pada PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera.

Total nilai pertanggungan asuransi adalah sekitar Rp282,49 miliar untuk asuransi bangunan, inventaris kantor dan kendaraan bermotor.

Perseroan meyakini bahwa jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Rata-rata jangka waktu pertanggungan asuransi adalah sebagai berikut:

- Asuransi bangunan dan inventaris kantor sekitar 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- Asuransi kendaraan bermotor paling lama 1 tahun.

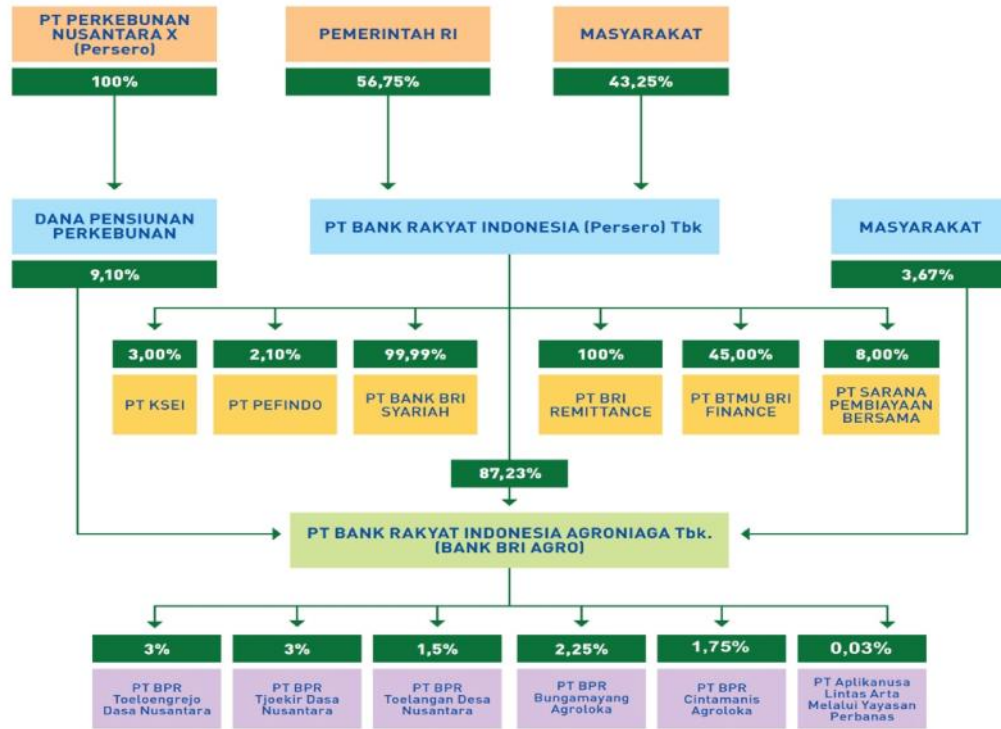
J. ASET TETAP PERSEROAN

Aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan berupa tanah dan bangunan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dimana pada posisi 30 Juni 2016 mencapai Rp 305,5 miliar yang meliputi kepemilikan atas 15 (sepuluh) bidang tanah dan bangunan, 69 (enam puluh sembilan) kendaraan roda empat dan 97 (sembilan puluh tujuh)

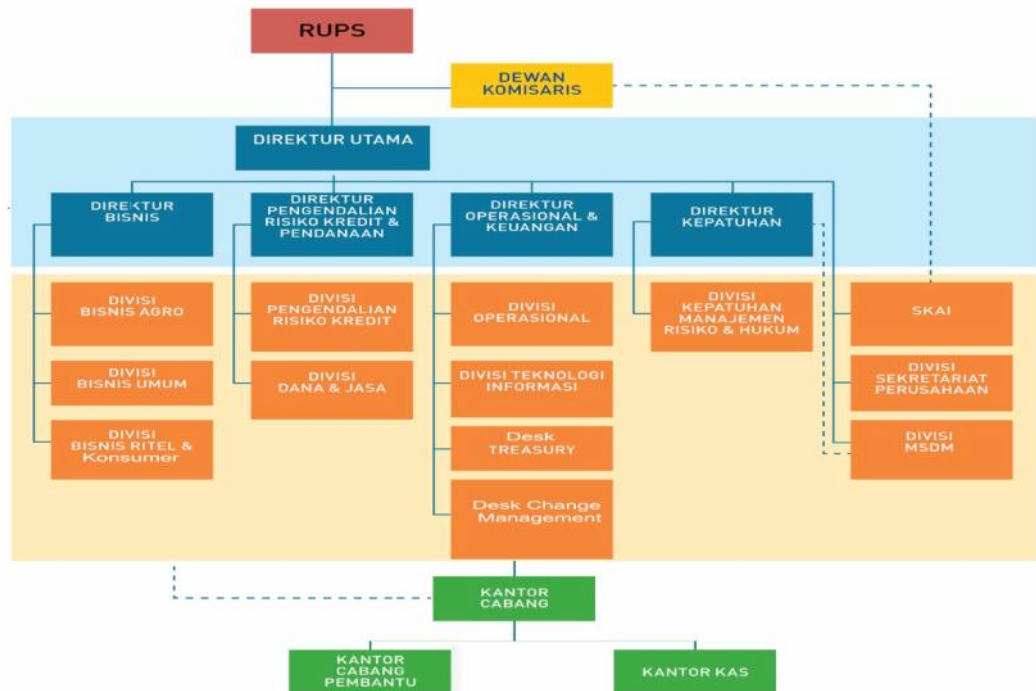
kendaraan roda dua.

Kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan telah diperoleh berlandaskan bukti perolehan hak yang sah yang melandasi penguasaan dan kepemilikan Perseroan atas harta kekayaan tersebut.

K. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN



L. DIAGRAM PENGAWASAN PERSEROAN



2. KEGIATAN USAHA

A. STRATEGI PERSEROAN

Perseroan telah memulai kegiatan konsolidasi internal baik dari sisi sumber daya manusia, strategi bisnis maupun pengembangan jaringan. Selain fokus pada bidang usaha agribisnis, Perseroan juga akan bergerak di usaha bisnis umum serta usaha kecil dan menengah (UKM). Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 beberapa strategi fundamental Perseroan telah dilakukan, seperti penerapan budaya kerja perusahaan, penyempurnaan kebijakan manajemen dibidang SDM, pengembangan *Core Banking System* (BRI Agro Core Banking) dan penyempurnaan struktur organisasi yang mendorong kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu dari sisi usaha, Perseroan menetapkan Strategi KYD dan DPK sebagai berikut:

- 1 Dana Pihak Ketiga (DPK)
Mengurangi risiko konsentrasi yang saat ini masih tergantung pada beberapa depositan besar dengan cara mengembangkan sumber dana ritel. Selain itu, jaringan kantor pelayanan akan ditambah dengan pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu di sentra-sentra bisnis.
- 2 Kredit Yang Diberikan (KYD)
Kredit yang diberikan (KYD) lebih difokuskan ke sektor agribisnis, terutama untuk sektor perkebunan dan membuka sektor bisnis umum serta usaha kecil dan menengah (UKM) lainnya. Bank juga akan terus menggiatkan kredit konsumen untuk karyawan dan pensiunan serta *linkage* program. Namun demikian, sektor selain agribisnis bank juga menyalurkan kredit terutama kredit untuk pembiayaan (*multifinance*) dan sektor perdagangan.
- 3 Non Performing Loan (NPL)
NPL - gross Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 sebesar 3,24%, akan tetapi Perseroan berupaya mengelola NPL pada tingkat aman dibawah 3% dengan cara:
 - a. Pemberian kredit yang selektif dengan memperhatikan prinsip *prudential banking* dan *four eyes principle*;
 - b. Meningkatkan pembinaan dan monitoring yang berkesinambungan terhadap seluruh kredit yang telah diberikan;
 - c. Mengintensifkan penagihan;
 - d. Melakukan restrukturisasi terhadap kredit bermasalah;
 - e. Mengupayakan penjualan aset yang dijaminkan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah;
 - f. Litigasi.

Selain target tersebut di atas, Perseroan juga akan meningkatkan *fee base income* melalui kegiatan pembiayaan kredit, dana, jasa perbankan lainnya dan ekspor impor di sektor agribisnis dan bisnis umum.

Untuk meningkatkan profitabilitas, Perseroan memelihara *margin* bunga bersih (NIM) pada kisaran 4% - 6% dengan tingkat efisiensi yang dicerminkan oleh rasio BOPO pada level di bawah 90%. Perseroan juga tetap berkomitmen untuk menjaga fungsi intermediasi dan likuiditas (LDR) di atas 78% sampai dengan 92%.

Perseroan memanfaatkan kemampuan dan pengalaman dalam mengelola nasabah usaha bidang agribisnis. Selain itu, dalam menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat Perseroan senantiasa berinovasi dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan agribisnis seperti, produk yang dapat dipergunakan untuk rencana *replanting* atas perkebunan dan produk persiapan pensiun bagi karyawan di bidang perkebunan. Selain itu, arah pengembangan jaringan kantor perseroan dikembangkan pada sentra agribisnis, seperti di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi selain di Pulau Jawa.

B. UNIT BISNIS UTAMA

1. Pangsa Pasar Perseroan

Dalam Industri Perbankan, Perseroan dikategorikan sebagai Bank dalam BUKU II berdasarkan modal inti yang dimiliki oleh Perseroan, sedangkan dari sisi pasar Perseroan termasuk bank yang memposisikan sebagai bank

fokus yaitu fokus dalam pembiayaan usaha pertanian atau agribisnis. Namun demikian sebagai langkah penyebaran risiko, Perseroan juga membiayai usaha diluar agribisnis.

Saat ini, pangsa pasar Perseroan dipasar Indonesia masih di bawah 1% baik untuk DPK maupun kredit per 30 Juni 2016. Namun, Perseroan melihat peluang untuk meningkatkan pangsa pasar menjadi lebih tinggi dengan meningkatkan jumlah jaringan kantor cabang.

(dalam miliar rupiah)

KETERANGAN	PASAR	PERSEROAN	PANGSA PASAR
Kredit	4.200.214	7.054	0,168%
DPK	4.574.671	7.692	0,156%

(Sumber : Statistik Otoritas Jasa Keuangan, Juni 2016)

Perseroan mempunyai ceruk pasar di bidang agribisnis yang telah ditekuni selama 26 tahun. Hal ini memberikan keunggulan akan kemampuan Perseroan dalam mengelola portofolio kredit dibidang agribisnis.

Keunggulan lain yang sangat penting adalah kedekatan Perseroan dengan komunitas usaha pertanian yang sudah terjalin sangat panjang, terutama dengan PT Perkebunan Nusantara I s/d XIV yang secara tidak langsung turut serta membidani kelahiran Perseroan.

Perseroan dalam pengembangan bisnis dan strategi perusahaan juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kondisi perekonomian global yang masih berfluktuatif dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian domestic.
- b. Persaingan ketat di sektor perbankan dari sisi size (modal dan jaringan) serta pricing (produk penghimpunan dana dan penyaluran kredit).
- c. Munculnya alternative investasi yang lebih menarik seperti asuransi unit *linked*, reksadana, ORI dan lain-lain.
- D. Bank – bank lain yang berminat untuk masuk dalam bidang usaha yang sama karena masih besarnya margin dan *opportunity*.

2. Cakupan Pemasaran

Cakupan pemasaran Perseroan diarahkan di sekitar Jaringan Kantor yang saat ini lebih banyak dikembangkan ke wilayah yang memiliki prospek agribisnis yang potensial terutama sektor ritel / UKM. Sampai dengan saat ini cakupan pemasaran meliputi Medan, Rantau Prapat, Riau, Palembang, Jambi, Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Pontianak, Bogor, Palembang, Cikarang dan Solo. Perseroan tidak memiliki anak perusahaan dan hanya memiliki penyertaan di 5 (lima) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Lampung dengan porsi kepemilikan saham kurang dari 5%.

Perseroan memandang perluasan wilayah pemasaran masih sangat terbuka, dengan mempertimbangkan potensi agribisnis terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi yang membukakan pertumbuhan agribisnis yang pesat. Di wilayah tersebut nasabah utama Perseroan antara lain, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan perkebunan swasta lainnya yang dapat membuka peluang pasar Perseroan untuk mengembangkan bisnis kepada petani plasma maupun rekanannya serta ke beberapa perusahaan swasta bidang agribisnis lainnya.

C. TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI (TSI)

Mulai tahun 2015, peran teknologi informasi mengalami transformasi dari *business support* menjadi *business enabler* (pemberdaya) dan mitra untuk pengembangan bisnis. Transformasi ini bertujuan untuk membangun sistem teknologi informasi yang berfokus dan berorientasi pada pelayanan nasabah, yang aman dan efisien serta mengurangi risiko operasional.

Sebagai wujud upaya untuk tetap menjadi bank modern yang handal, Perseroan telah menyusun dan melaksanakan program pengembangan teknologi informasi secara bertahap dan berkelanjutan sejak tahun 2008. Rencana program-program pengembangan tersebut disusun dan dituangkan dalam *Information Technology Strategic Plan* (ITSP) Perseroan untuk jangka waktu 4 (empat) tahunan yang dikaji ulang setiap tahun. Rencana pengembangan periode tahun 2016 – 2019 telah disusun dan dituangkan di dalam ITSP

2016 - 2019.

Berbagai program mengenai pengembangan TI yang dijalankan sesuai dengan *roadmap* ITSP tersebut diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

a. Memperkuat Infrastruktur

Memperkuat fondasi TI yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan layanan yang handal, optimal dan *real time online* sehingga mampu memberikan layanan sesuai standar *Service Level Agreement (SLA)* yang kompetitif. Selama tahun 2016, telah dilakukan beberapa upaya untuk memperkuat infrastruktur yaitu:

- 1) *Re-design* arsitektur jaringan komunikasi sehingga memudahkan proses *monitoring* dan dapat menerapkan teknik *failover*;
- 2) *Review* kontrak *provider* jaringan telekomunikasi dalam rangka efisiensi tanpa mengurangi kualitas jaringan komunikasi;
- 3) Peremajaan perangkat keras *server*, pengadaan perangkat *storage* dan perangkat *monitoring* untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja.

b. Penyediaan Informasi yang Akurat

Dalam rangka penyediaan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan, strategi pemasaran dan informasi sistem pelaporan, telah dibangun *Data Warehouse* dan aplikasi *Management Information System*. Sistem dan aplikasi ini berfungsi untuk repositori data dan informasi yang lebih.

c. Perluasan Jasa Pelayanan

Untuk kemudahan nasabah, Perseroan melakukan perluasan jaringan layanan melalui penambahan jaringan kantor, jaringan ATM, melakukan kerja sama IT *Linkage* dengan Bank BRI sehingga nasabah dapat bertransaksi di ATM BRI yang tersebar di seluruh Indonesia dan penambahan kanal transaksi *mobile banking (SMS banking bermenu)*, *internet banking* dan *cash management system* yang mudah digunakan melalui semua operator telekomunikasi.

Rencana Pengembangan

Sejak tahun 2015, Perseroan melakukan penyelarasan strategi teknologi informasi mengacu pada *Information Technology Strategic Plan (ITSP) 2012 - 2015* dan untuk 4 (empat) tahun kedepan mengacu pada ITSP 2016-2019.

Pada tahun 2015, Perseroan telah berhasil melakukan migrasi Core Banking Baru BRIAGRONETS sebagai pondasi Teknologi Informasi yang tangguh dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan bisnis perbankan yang cepat, efektif dan efisien yang terintegrasi dengan jaringan induk perusahaan yang luas. Berikutnya, beberapa langkah strategis perseroan dalam rangka penyelenggaraan Teknologi Informasi yang handal dan modern meliputi :

- 1) *Mendukung Efisiensi Operasional*, melalui penerapan *paperless*, penggunaan *data warehouse* untuk otomatisasi data dan pelaporan, dan penyesuaian kontrak-kontrak *hardware* dan *software* sesuai perkembangan teknologi;
- 2) *Mendukung Inovasi Produk*, mempersingkat *time-to-market*, meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan produk perbankan berbasis teknologi informasi (*electronic channel*) sesuai dengan ekspektasi nasabah yang terus meningkat;
- 3) *Menghilangkan ketergantungan terhadap pihak ketiga*, melalui pengembangan dan penyempurnaan berbagai aplikasi secara mandiri maupun *joint-development* dengan BRI untuk mengurangi risiko operasional.

D. KOMUNIKASI PEMASARAN

Kegiatan komunikasi Perseroan diarahkan untuk mendukung proses transisi *corporate image* Perseroan menjadi bagian dari pengendali baru, selain untuk mendukung pemasaran produk Perseroan. Kegiatan ini diwujudkan melalui perubahan nama dan logo Perseroan beserta sosialisasinya serta peningkatan *brand awareness* atas produk-produk Perseroan.

Peningkatan *brand awareness* ditujukan kepada pasar ritel terutama di pasar sasaran yaitu sentra agribisnis. Program besar yang dilakukan adalah kegiatan komunikasi pemasaran mendukung produk tabungan dengan tema "Infiniti dan Multima". Kegiatan komunikasi selain melalui iklan media masa juga perubahan tampilan di kantor layanan. Adapun kegiatan peningkatan penetrasi kredit terutama untuk konsumsi dilakukan dengan perbaikan tema kampanye dan perwajahan media komunikasi dalam hal brosur-brosur produk. Selain itu, Perseroan juga melakukan komunikasi aktif dengan memberikan sponsor pada kegiatan/*event* yang langsung bersentuhan dengan target pasar, seperti kegiatan seminar, kegiatan pameran maupun kegiatan mudik bersama karyawan yang menjadi target pasar.

Pemasaran dan segmen pasar Perseroan dan anak perusahaan.

Cakupan pemasaran Perseroan di arahkan disekitar Jaringan Kantor yang saat ini lebih banyak dikembangkan ke wilayah yang memiliki prospek agribisnis yang potensial terutama sektor ritel / UKM. Sampai dengan saat ini cakupan pemasaran meliputi Medan, Rantau Prapat, Pekanbaru, Jambi, Lampung, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Pontianak, Palembang, Bogor, Solo dan Cikarang.

Perseroan tidak memiliki anak perusahaan dan hanya memiliki penyertaan di 5 (lima) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di wilayah Jawa Timur, Sumatera Selatan dan Lampung dengan porsi kepemilikan saham kurang dari 5%.

Perseroan memandang perluasan wilayah pemasaran masih sangat terbuka, dengan mempertimbangkan potensi agribisnis terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan serta Sulawesi yang membukukan pertumbuhan agribisnis yang pesat. Di wilayah tersebut nasabah utama Perseroan antara lain, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Hutahaean Group dan perusahaan swasta besar lainnya yang dapat membuka peluang pasar Perseroan untuk mengembangkan bisnis kepada petani plasma, maupun rekanannya.

Kegiatan promosi yang dilakukan Perseroan.

Perseroan melakukan aktivitas promosi mengikuti pola pemasaran yang tersegmentasi terutama dari segi cakupan wilayah dimana kantor Perseroan berada. Sedangkan aktivitas promosi yang ditempuh lebih banyak menggunakan promosi langsung kepada nasabah dan/atau calon nasabah dan sedikit menggunakan media massa nasional. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan sebaran wilayah pemasaran yang terpencar namun belum seluruh wilayah di Indonesia terdapat kantor cabang Perseroan.

Beberapa aktivitas promosi yang dilakukan antara lain dengan meluncurkan program tabungan dan deposito berhadiah langsung "Ayo Bergoyang", melakukan 'open table' di lokasi kantor nasabah maupun calon nasabah dan pada 'event' yang diadakan oleh nasabah, serta memasang iklan di media komunitas pertanian.

E JARINGAN DAN LAYANAN

Pengembangan jaringan terus dilakukan oleh Perseroan untuk menopang target pertumbuhan yang ingin dicapai. Pada tahun 2015, Perseroan telah membuka 4 (empat) unit kerja baru yaitu Kantor Cabang Solo - Jawa Tengah, Kantor Cabang Cikarang - Jawa Barat, Kantor Cabang Pembantu Ciputat - Tangerang Selatan, dan Kantor Kas Teluk Sono – Riau. Disamping itu telah dilakukan relokasi atas 5 (lima) unit kerja yaitu : Kantor Cabang Cik Ditiro, Kantor Cabang Medan, Kantor Cabang Semarang, Kantor Cabang Pembantu S.Parman - Medan dan Kantor Cabang Pembantu Manggala Wanabakti - Jakarta. Serta penutupan 1 (satu) unit kerja Payment Point di gedung Dapenbun - Hayam Wuruk Jakarta.

Sementara itu, untuk tahun 2016, Perseroan telah merealisasikan relokasi Kantor Pusat dari lokasi lama di Plaza Agro, Kuningan - Jakarta ke lokasi yang baru di Gedung BRI AGRO di daerah Warung Jati Barat, Jakarta dan pembukaan 1 (satu) unit kerja Kantor Cabang Pembantu di Gresik - Jawa Timur serta merelokasi 1 (satu) unit kerja Kantor Cabang Pembantu di Kasikan - Riau.

Tabel berikut menyajikan rincian tentang jaringan distribusi selama lima tahun terakhir:

	31 DESEMBER				30 JUNI
	2012	2013	2014	2015	2016
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Cabang	10	12	14	16	16
Kantor Cabang Pembantu	9	10	16	17	18
Kantor Kas & Payment Point	3	3	4	4	4

Total kantor	23	26	35	38	39
ATM	34	34	41	0	0

Catatan : Berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S.228/KR.041/2016 tertanggal 25 April 2016, pada bulan April 2016 Perseroan membuka Kantor Cabang Pembantu Pembantu Gresik, sehingga jumlah Kantor Cabang Pembantu menjadi 18 dan terdapat penutupan 1 Payment Point.

i. Kantor Pusat

Kantor pusat adalah titik utama dalam organisasi Perseroan dan terletak di Gedung BRI AGRO. Jl. Warung Jati Barat No.139, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran. Jakarta Selatan.

ii. Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas

Kantor Cabang Perseroan dibagi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Setiap cabang, tanpa memperhatikan klasifikasinya, beroperasi secara independen dari cabang lainnya. Cabang memiliki level yang berbeda untuk kewenangan memutus kredit tergantung dari klasifikasi masing-masing cabang.

Setiap kantor cabang mengawasi kantor cabang pembantu dan kantor kas yang berada dibawah wewenangnya. Kantor cabang pembantu menawarkan produk-produk yang sama dengan yang dimiliki kantor cabang tapi memiliki tingkat kewenangan memutus kredit yang lebih terbatas. Sementara itu, kantor kas lebih terfokus pada pengumpulan dana pihak ketiga dari sektor ritel dan menyediakan layanan terkait uang tunai kepada nasabah.

Jaringan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas dan Title Hak

No.	Status Kantor	Nama Kantor	Alamat Kantor	Title Hak dan Luas Tanah/Bangunan	Kepala Kantor
1.	Kantor Pusat	Kantor Pusat	Gedung BRI AGRO. Jl. Warung Jati Barat No.139, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran. Jakarta Selatan.	Milik Sendiri HGB No. 1466/ Kalibata Luas : 103 m ² , HGB No. 1027/ Kalibata Luas : 2.527 m ² , HGB No. 1372/Kalibata Luas : 195 m ² , HGB No. 1349/Kalibata Luas 105 m ² , HGB No. 1418/Kalibata, luas 136 m ²	Direksi
2.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Kuningan	Jl. H.R. Rasuna Said X-2 No. 1, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan	Sewa menyewa Ruangan Perkantoran Luas :292 m ²	Suharno
3.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Bandung	Jl. Abdul Rivai No 2B RT.05 RW. 1, Kecamatan Bandung Wetan, Kelurahan Tamansari, Bandung	Milik sendiri HGB No. 145/Kelurahan Taman Sari, luas 260 M ²	Sugiyardono
4.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Semarang	Jl. Jl. MT Haryono No. 970 Ruko Metro Plaza A-2, Kota Semarang	Sewa menyewa bangunan Luas tanah :622 m ²	Gabriel Hendra Kuniawan
5.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Surabaya	Jl. Tais Nasution No. 27 Surabaya	Sewa menyewa Bangunan Luas :225,30 m ² (Lantai Dasar), dan 220,30 M ² (Lantai Mezzaine)	Wahyudi Dwi Irawan
6.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Medan	Jl. Iskandar Muda Ruko Premier No. 10 dan 11, Medan, Sumatera Utara	Milik Sendiri HGB No. 230/Babura Luas : 123 m ² , HGB No. 229/ Babura Luas : 123 m ²	Selamat Riadi

7.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pekanbaru	Jl. Jendral Sudirman No 231, Pekanbaru	Sewa gedung PT. Pos Indonesia (Persero) Luas bangunan : 336 m ²	Novy Tjahya Indrianto
8.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Jambi	Jl. Hayam Wuruk RT 23, Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung, Jambi	Sewa bangunan ruko Luas : 314 m ²	Fasya Salman Al Farizi
9.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Bandar Lampung	Jl. Raden Intan No 104 B-C, Tanjung Karang, Bandar Lampung	Sewa 2 unit bangunan ruko (1) Luas tanah : 130 m ² (2) Luas tanah : 121m ²	Yungki Pramono
10.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Rantau Prapat	Jl. Jend. Ahmad Yani No 135 F, Rantau Prapat Sumatera Utara	Sewa ruko 3 lantai Luas : 136 m ²	Jaya Pratama Silalahi
11.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Balikpapan	Jl. Jendral Sudirman No 319 Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan	Sewa bangunan Luas tanah : 1.963 m ²	Haris Rahman
12.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Makassar	Jl. Slamet Riyadi No 14 Ujung Pandang, Makassar	Sewa Rumah Dinas PTPN XIV Seluas 985 m ²	Achmad Farid
13.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Bogor	Jl. KS. Tubun No. 59F RT.003/ RW.002 Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor	Milik sendiri HGB No. 111/ Kelurahan Cibuluh Luas : 224 m ²	Johan Jacob Saleh
14.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Palembang	Jl. Kol. H. Burlian No. 1458 A-B RT. 25 RW. 04 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarumi Kota - Palembang	Milik sendiri HGB No. 15 dan No. 16/Kelurahan Sukabangun Luas : 268 m ²	Iman Yusuf
15.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pontianak	Jl. Jenderal A. Yani Rukun Tetangga 01 Rukun Warga 34 Kelurahan Benua Melayu Darat Pontianak	Sewa ruko 3,5 lantai Luas tanah : 248 m ²	Muhammad Nasar
16.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Solo	Jl. Slamet Riyadi No 330 Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta - Solo	Sewa bangunan 3 lantai Luas tanah : 202 m ²	Anton Suhartanta
17.	Kantor Cabang	Kantor Cabang Cikarang	Jl. Jababeka Raya, Kawasan Permata Junction Blok B.05, RT.05 RW. 06 Kel. Pasir Gombang Kec. Cikarang Utara, Bekasi	Milik Sendiri HGB No. 986/Pasir Gombang Luas : 105 m ²	Winda Fibriana A
18.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Jamsostek	Jl. Jend. Gatot Subroto No 79, RT 008 RW 002, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan	Sewa ruangan gedung Luas : 153,63 m ²	Wiwik Waluyanti
19.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Depok	Jl. Margonda Raya No. 198 A, RT 003 RW 008, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji Kota Depok.	Milik sendiri HGB No. 363/Kemiri Muka/2002 Luas : 94 m ²	Hesti Herayati
20.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Kebayoran Lama	Jl. Kebayoran Lama RT.001 RW. 013 Grogol Utara, Jakarta Selatan	Sewa Kantor Luas : 455 m ²	Fernando K. Sinuraya
21.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Bekasi	Komp. Ruko Ramayana Jl. Ir. H. Juanda Blok A-4 No. 03 Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi	Milik sendiri HGB No. 11811/Kelurahan Duren Jaya Luas : 92 m ²	Jaya Simatupang
22.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Tangerang	Jl. Merdeka No 197 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Karawaci, Tangerang	Sewa ruko Luas tanah : 160 m ²	Siska Rosidaningrum
23.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem A.R. Hakim, Medan	Jl. Jl. A.R Hakim No. 153, Sukarame, Medan	Milik Sendiri HGB NO. 26/Tegal Sari III Luas : 124 m ²	Abdul Hanan
24.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Kasikan	Desa Kasikan Dusun 4, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar	Milik Sendiri HGB NO. 00002 seluas 382 M/2 dan 00003 / Kasikan seluas :238 m ²	Torang Sirait
25.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Lubuk Dalam	Jl. Pertamina, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Siak	Milik Sendiri HGB No. 05/ Lubuk Dalam Luas : 200 mm ²	Posma Simangunsong
26.	Kantor	Kantor Capem Ujung	Jl. Jend Sudirman No. 100,	Sewa rumah	Arief Abdalli

	Cabang Pembantu	Batu	Ujung Batu, Rokan Hulu Riau	Luas : 154 m ²	
27.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Kelapa Gading	Jl. Boulevard Raya Blok CN. 1 Kelapa Gading Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta	Milik sendiri Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 345/I-II/B Kelurahan Kelapa Gading Timur Luas : 175,065 m ²	Erwind Andrew O Damanik
28.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Banyu Manik	Jl. Sukun Raya No. 41 (Ruko) 1 A Sronddol Wetan, Semarang	Sewa bangunan 2 lantai Luas tanah : 112 m ²	Dipo Rumansyah
29.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Air Molek	Jl. Jend. Sudirman Air Molek I, Kab. Indragiri Hulu, Riau	Sewa ruko 2 lantai Luas : 153 m ² (di atas tanah seluas 2.400 m ²)	Ari Suryanata Kusumah
30.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Bandar Jaya	Jl. Proklamator Raya No. 133 A Terbanggi BEsar, Bandar Lampung	Sewa ruko 2,5 lantai Luas tanah : 450 m ²	Ferri Aryudha
31.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Sidoarjo	Jl. H. Sunandar Priyo Sudarmo RKA. 06 RT 16 RW 05 Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo	Milik sendiri HGB No. 613/Desa Larangan Luas : 108 m ²	Akhsin Suyito
32.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Pematang Siantar	Jl. Asahan Kompleks Megaland Blok A No. 45 Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar	Sewa ruko 3,5 lantai Luas tanah : 68 m ²	Deddy Effendi
33.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Tebing Tinggi	Jl. Jend. Sudirman No. 405 C, Tebing Tinggi Barat, Sumatera Utara	Milik sendiri HGB No. 60/Kelurahan Sri Padang Luas: 88 m ²	Arief Rachmat Riandi
34.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Ciputat	Jl. Ir. Juanda No. 114, Cempaka Putih, Kota Tangerang Selatan	Milik Sendiri HGB No. 01495 / Cempaka Putih Luas : 105 m ²	Reza Pahlevi
35.	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Capem Gresik	Jl. RA Kartini No. 216, Gresik Jawa timur	Sewa Ruang Kantor seluas 100 m ²	Widowati Nur Utami
36.	Kantor Kas	Kantor Kas Dalu-Dalu Emplacement Perkebunan Kelapa Sawit PT Hutahaean	Desa Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau	Sewa Ruangan Kantor Luas : 23,52 m ²	Philip Sitompul
37.	Kantor Kas	Kantor Kas Teluk Sono Emplacement Perkebunan Kelapa Sawit PT Hutahaean	Desa Teluk Sono, Bonai Darussalam, Rokan Hulu Riau	Sewa Ruangan Kantor	Abraham Yulistiandi
38.	Kantor Kas	Kantor Kas PTPN IX Semarang	Jl. Mugas Dalam, Semarang	Sewa Tanah dan Bangunan Luas bangunan : 28 m ²	Ratna Handayani
39.	Kantor Kas	Kantor Kas Deptan Kementerian Pertanian, Gedung E Lantai Dasar,	Departemen Pertanian, Gedung E Lantai Dasar, Jl. RM Harsono No. 3 Jakarta	Sewa ruangan kantor Luas lantai : 87,5 m ²	Noor Latifah

iii. ATM dan Kartu ATM

Per tanggal 30 Juni 2016, tidak memiliki mesin ATM karena telah menggunakan Mesin ATM dari Bank BRI sehingga nasabah dapat bertransaksi di ATM BRI serta bekerja sama dengan jaringan ATM Bersama yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemegang kartu ATM Perseroan dapat menggunakan ATM Perseroan dan ATM BRI serta ATM Bank yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama untuk menarik dana, memeriksa saldo dan transfer dana antara rekening tabungan termasuk rekening antar nasabah.

F. PENGELOLAAN RISIKO DAN KEPATUHAN

Perseroan menghadapi berbagai jenis risiko yang terkait dengan pemberian pinjaman, simpanan dan bisnis lainnya, termasuk risiko yang terkait lingkungan operasional. Risiko utama yang Perseroan hadapi adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar (termasuk risiko suku bunga, risiko trading dan risiko nilai tukar), risiko

operasional, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko hukum, serta risiko reputasi. Tujuan Perseroan dalam pengelolaan risiko adalah untuk memastikan bahwa Perseroan memahami, mengukur dan memantau berbagai risiko yang timbul dan memastikan Perseroan mematuhi kebijakan dan prosedur-prosedur yang ada untuk mengelola risiko-risiko ini.

Program Kerja Manajemen Risiko

Program kerja dan implementasi manajemen risiko selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan *review* dan *update* atas Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) Bank.
- b) Melakukan *review* dan *update* atas SK Komite Manajemen Risiko
- c) Melakukan *review* dan *update* atas Kebijakan *Contingency Funding Plan*
- d) Melakukan *review* dan *update* atas Kebijakan *Stress Test*
- e) Melakukan *review* dan *update* atas Limit Transaksi *Dealer*
- f) Membuat dan melakukan implementasi pengukuran risiko operasional dengan metode RCSA (Risk Control Self Assessment) secara *online* keseluruhan unit kerja
- g) Implementasi dan *refreshment* metode risiko operasional RCSA (Risk Control Self Assessment) di beberapa Kantor Cabang sebagai salah satu alat untuk meningkatkan *risk awareness* kepada seluruh karyawan dan satuan kerja.

Dalam menerapkan manajemen risiko Perseroan, langkah-langkah mitigasi risiko adalah sebagai berikut :

1. *Manajemen Risiko Kredit*

Pengelolaan dan pengendalian risiko kredit dilakukan dengan upaya:

- a) Mengendalikan risiko, yaitu dengan cara melakukan pembatasan eksposur dan tindakan perbaikan sehingga kerugian yang mungkin terjadi dapat diminimalkan.
- b) Menerapkan *four eyes principles* pada proses pemberian kredit.
- c) Menerapkan internal *credit risk rating* dan *credit risk scoring* sebagai salah satu alat pengukuran dan pemantauan (monitoring credit) dengan cara mendeteksi secara lebih awal debitur yang berpotensi cidera janji (default).

2. *Manajemen Risiko Pasar & Risiko Likuiditas*

Pengukuran risiko pasar dan risiko likuiditas dilakukan melalui analisis terhadap pemicu munculnya risiko (risk driver), yaitu suku bunga dan nilai tukar. Pengelolaan dan pengendalian risiko pasar dan risiko likuiditas dilakukan dengan pemantauan posisi gap (liquidity gap, repricing gap), IRRBB (Interest Rate Risk on Banking Book) dan PDN (Posisi Devisa Neto).

3. *Manajemen Risiko Operasional*

Pengelolaan dan pengendalian risiko operasional berguna untuk meningkatkan kesadaran setiap karyawan di seluruh kantor, meliputi :

- Limit dan kewenangan transaksi dan aktivitas kantor.
- Pengetahuan prosedur operasional dengan titik berat pada area-area *high risk* dan *high volume*.
- Pengetahuan fitur dan risiko produk-produk yang ada.
- Pemahaman terhadap aspek KYC.

4. *Manajemen Risiko Strategik*

Pengelolaan dan pengendalian risiko strategik dengan cara melaksanakan proses pengendalian terhadap rencana strategis dan rencana bisnis. Hal ini bertujuan untuk memantau realisasi dibandingkan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi.

5. *Manajemen Risiko Hukum*

Pengelolaan dan pengendalian risiko hukum dilakukan melalui :

- Peninjauan secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara bank dengan pihak lain.
- Pengembangan budaya kepatuhan dan kepedulian terhadap risiko hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi secara berkelanjutan.

6. *Manajemen Risiko Kepatuhan*

Pengelolaan dan pengendalian risiko kepatuhan berguna untuk memitigasi risiko tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dengan cara memastikan kepatuhan terhadap kebijakan & prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada semua aktifitas fungsional bank.

7. *Manajemen Risiko Reputasi*

Risiko reputasi yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif dan informasi yang tidak tepat terkait persepsi terhadap bank. Pengelolaan dan pengendalian risiko reputasi mengatasi keluhan nasabah, keterbukaan informasi yang memadai.

G. **Good Corporate Governance (GCG)**

Seiring dengan ketetapan langkah untuk bertransformasi, Perseroan senantiasa melengkapi berbagai pranata organisasi dan membangun mekanisme pengelolaan bisnis yang andal. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance (GCG)* pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Perseroan secara konsisten.

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara paripurna/menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan.

Bagi Perseroan, penerapan GCG bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. Selama Semester I Tahun 2016 berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)* sudah dilakukan dengan predikat “baik” dan nilai komposit “2”, sehingga kami simpulkan hasil matrik dalam penilaian pada Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko ini, masuk katagori matrik peringkat “2”.

Bank memfokuskan perhatian yang tinggi pada implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Dewan Komisaris sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar memberikan tanggapan dan saran atas laporan kinerja Perseroan yang disampaikan Direksi setiap bulan. Disamping itu Dewan Komisaris juga secara berkala (mingguan) mengadakan rapat / diskusi dengan Manajemen. Kunci untuk mendengar langsung permasalahan yang terjadi dan memberikan saran / rekomendasi untuk perbaikan.

Pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

Komite Audit membahas hasil laporan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh unit-unit kerja baik di kantor pusat dan kantor cabang. Komite Pemantau Risiko melakukan pemantauan implementasi manajemen risiko dan kepatuhan di Bank. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi dan memberikan masukan untuk kebijakan nominasi.

Peranan Bank BRI AGRO ke depan mempunyai peran yang strategis dalam sektor agribisnis, maka Dewan Komisaris menyarankan kepada jajaran Direksi untuk mempersiapkan Sumber daya manusia (SDM) yang benar-benar mampu menjawab tantangan tersebut, karena peluangnya yang masih terbuka luas dan merupakan salah satu fokus Pemerintah saat ini untuk meningkatkan dan membangun sektor pertanian.

Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk dapat meningkatkan kinerja dan berpegang pada regulasi yang ditetapkan serta prinsip tata kelola yang baik agar dapat tumbuh sehat dan berkesinambungan.

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan berdampingan memberi nasihat di bidang kebijakan dan operasional kepada Direksi Perseroan melalui rapat berkala setiap bulan, surat-surat dan rekomendasi sesuai dengan kapasitas serta kewenangannya.

Dari semua itu, merupakan elemen fundamental yang mengacu kepada internasional *best practices*. Perseroan berkeyakinan bahwa dengan melakukan implementasi GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan memfasilitasi *value driver* untuk bekerja optimal. Hal ini diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan (*value creation*).

H. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Kehadiran Perseroan sebagai warga masyarakat yang baik diimplementasikan secara konsisten melalui program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) guna mewujudkan misi Perseroan sebagai bank komersial yang fokus pada sektor pertanian dalam mendukung pengembangan agrobisnis di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Perseroan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan dapat terlibat mendapatkan manfaat dari setiap kegiatan operasional Perseroan. Secara garis besar kegiatan tanggung jawab sosial diimplementasikan dalam 2 (dua) kegiatan yaitu:

Perlindungan Nasabah melalui penerapan sistem transparansi informasi produk hingga pembentukan struktur penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia sebagai berikut :

- a. No. 7/6/PBI/2005 tentang transparansi Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah,
- b. No. 7/6/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank,
- c. No. 10/1/PBI/2008 tentang perubahan peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan terkait perlindungan nasabah dilaksanakan dengan penerapan sistem transparansi informasi produk hingga pembentukan struktur penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah sampai ketinggian mediasi perbankan.

Transparansi produk perbankan dilakukan dengan menyediakan informasi tertulis bagi nasabah mengenai karakteristik produk (manfaat dan risiko yang melekat pada produk, persyaratan dan tata cara penggunaan produk serta biaya-biaya yang melekat pada produk Giro, Tabungan, Deposito, Transfer dan lain-lain) berupa brosur, penyampaian karakteristik produk dalam aplikasi/ formulir produk, maupun penempatan informasi melalui papan pengumuman nasabah di setiap unit kerja.

Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan nasabah selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal

30 Juni 2016 telah ditangani dan diselesaikan secara tepat waktu, dimana Perseroan menetapkan prosedur bahwa semua pengaduan nasabah harus diselesaikan paling lambat 20 hari kerja dengan masa perpanjangan 20 hari kerja. Adapun pengaduan nasabah yang diterima selama sampai dengan 30 Juni 2016 sebanyak 2.180 pengaduan dan seluruhnya dapat diselesaikan dalam batas waktu 20 hari kerja. Selain itu, sampai dengan 30 Juni 2016 tidak terdapat pengaduan nasabah yang diselesaikan melalui mediasi institusi perbankan.

Pengembangan Komunitas yang dilakukan sejak tahun 2010 dengan membentuk wadah aktivitas pengembangan komunitas dengan mengikutsertakan karyawan Perseroan baik sebagai donatur maupun relawan dengan nama "Perseroan Peduli" dengan kegiatan bakti sosial untuk korban bencana kebakaran, buka puasa bersama anak yatim di seluruh kantor cabang Perseroan dan sumbangan pembangunan rumah ibadah. Perseroan melaksanakan normalisasi saluran air dan rehabilitasi jalan dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar kantor pelayanan.

I. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan adalah pemegang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Ciptaan atas Logo "BANK BRI AGRO" yang terdaftar dalam nomor permohonan C00201403940, tanggal 13 Oktober 2014, nomor pendaftaran : 069999 dan permohonan Pendaftaran Merek No J002012039879, tanggal 9 Agustus 2012, untuk etiket merek "BRI Agro + LOGO (merupakan satu penamaan)" pada kelas barang / jasa 36 dan belaku sampai dengan 19 Januari 2064 (50 tahun).

3. KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

A. PROSPEK USAHA

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2016 diperkirakan akan tetap didominasi oleh konsumsi dan arus investasi yang tetap kuat, didorong oleh meningkatnya jumlah golongan masyarakat yang berpendapatan menengah dan meningkatnya komposisi jumlah penduduk usia produktif. Ekspor diperkirakan belum banyak mengalami perbaikan sejalan dengan kondisi perekonomian beberapa negara mitra dagang utama yang masih terkena dampak krisis ekonomi global di Eropa dan Amerika Serikat. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh pada kisaran 5,1% (Sumber: Tinjauan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia, Juni 2016).

Stabilitas sistem keuangan dan fungsi intermediasi perbankan tetap terjaga dengan baik. Kinerja industri perbankan yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) sebesar 19,64% yang berada jauh di atas ketentuan minimum 8% dan rendahnya rasio kredit bermasalah (*NPL/Non Performing Loan*) neto yaitu 2,07% pada Juni 2016. Sementara itu, pertumbuhan kredit hingga akhir Maret 2016 sebesar 11,50% (yoy) sejalan dengan masih lambatnya perkembangan ekonomi domestik. Kredit modal kerja dan kredit investasi tumbuh sebesar 10,54% (yoy) dan 13,16% (yoy), sementara kredit konsumsi tumbuh 11,37% (yoy).

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (BI, Juni 2016) kredit pertanian (termasuk industri penunjangnya) posisi bulan Juni 2016 masih cukup kecil yaitu mencapai sebesar Rp57.193 miliar atau hanya 4,77% dari total kredit perbankan. Masih rendahnya kredit pertanian bukan berarti bahwa sektor ini kapasitasnya kecil, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor Pertanian terhadap Produk Domestik bruto yang mencapai \pm 14,45% (Sumber BPS).

Ditinjau dari variabel di atas tentunya kredit sektor pertanian yang menjadi fokus usaha Perseroan sangat potensial untuk dikembangkan, terutama pertanian berbasis ekspor seperti perkebunan dan usaha turunannya. Di samping itu akses petani terhadap pembiayaan perbankan masih relatif rendah sehingga memberikan peluang bagi Perseroan untuk dapat meningkatkan penetrasi pasar lebih kuat.

Segmen Bisnis Agro

Kontribusi kredit sektor agribisnis telah memberikan porsi 52% dari portfolio kredit bank. Potensi pengembangan portofolio kredit sektor agribisnis masih terbuka lebar untuk dikembangkan mengingat negara Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Bank akan tetap melakukan pengembangan bisnis ke sektor agribisnis walaupun harga komoditi sangat fluktuatif. Sektor agribisnis yang telah dikembangkan di Bank mulai dari hulu, *on farm*, hilir dan juga jasa/suporting bisnis. Strategi pengembangan bisnis disektor agribisnis ke BUMN yang sehat dan swasta besar serta kepada nasabah yang telah bermitra dengan Bank BRI Grup. Pengembangan bisnis untuk pembiayaan kepada plasma (koperasi) yang merupakan mitra kerja dari grup usaha perkebunan besar merupakan sasaran utama Bank. Hal ini dengan harapan perusahaan inti sebagai off taker dan juga sebagai penjamin atas kewajiban plasma kepada Bank.

Sektor agribisnis kedepan akan lebih baik terutama pengembangan komoditi minyak kelapa sawit dan turunannya karena merupakan komoditi strategis Indonesia. Disamping itu adanya kebijakan pemerintah untuk moratorium ijin usaha perkebunan sawit dan restorasi lahan gambut, kedepan kinerja perkebunan sawit dan turunannya akan lebih dan harga kebun akan meningkat. Bank akan lebih fokus untuk pengembangan bisnisnya kepada komoditi sawit dan turunannya.

Segmen Bisnis Ritel dan Konsumer

Usaha Kecil dan Menengah berperan besar dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tercermin dari jumlah usaha atau dari penciptaan lapangan kerja. Selain itu, Perseroan juga akan turut berperan serta lebih besar di dalam pembiayaan produktif sektor Usaha Kecil dan Menengah dengan batasan pengembangan sektor UKM dimaksud disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Produk Bisnis Ritel dan Konsumer

Produk-produk bisnis yang telah ada saat ini semakin variatif dan disesuaikan pada 'customer need', antara lain :

- Kredit Modal Kerja
- Kredit Investasi
- Kredit Pemilikan Gudang
- Kredit *Fully Cash Collateral*
- Kredit program untuk komoditi pertanian (KKPA, KUR)
- Kredit Konsumer :

1. Agro Griya
2. Agro Mobil
3. Agro Multiguna
4. Kredit Karyawan Tetap

Produk-produk kredit ritel maupun kredit konsumer telah dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pasar sehingga kontribusi produk dimaksud dalam portofolio bisnis sudah mulai bertumbuh.

Produk-produk pembiayaan di atas dikembangkan untuk menysasar sektor bisnis dalam skala UKM untuk dapat memberikan kontribusi positif dengan volume portofolio yang semakin seimbang dengan sektor bisnis lainnya.

Strategi Bisnis Ritel & Konsumer

a. Strategi Umum

Merupakan garis besar dalam menciptakan perangkat bisnis yang mapan dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan pada umumnya, antara lain :

- (i) Melakukan ekspansi bisnis yang sehat dengan mempertimbangkan komposisi antara bisnis Agro maupun non-Agro (bisnis Umum).
- (ii) Optimalisasi *outlet* (unit kerja) Cabang dan Capem melalui penetapan RBB berbasis potensi wilayah.
- (iii) Pembukaan outlet (unit kerja) baru di lokasi-lokasi yang representatif.
- (iv) Peningkatan kualitas dan kuantitas PKL (Pejabat Kredit Lini).
- (v) Menciptakan produk-produk bisnis yang potensial dengan menitikberatkan pada *risk assesment dan risk mitigation*.
- (vi) Menerapkan sistem monitoring yang lebih efektif dan efisien.

b. Strategi Khusus (Pengembangan Bisnis)

Merupakan langkah-langkah spesifik yang dilakukan untuk pengembangan bisnis ritel dan konsumer, antara lain :

(i) Bisnis Ritel

Strategi pengembangan bisnis ritel dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu Jaringan Bisnis, SDM dan Produk & Mitigasi. Ketiga kategori rencana strategis ini merupakan rangkuman dari program-program yang akan dilaksanakan secara teknis untuk memenuhi tuntutan perkembangan bisnis ritel, sebagai berikut :

- 1) Jaringan Bisnis : Optimalisasi Unit Kerja eksisting, pembukaan jaringan /unit kerja baru dan mapping bisnis per-wilayah kerja.
- 2) SDM : rekrutmen AO untuk memenuhi formasi di semua kantor cabang / capem, pelaksanaan pendidikan bagi AO, MP, Pincapem dan Pinca, menerapkan insentif berbasis kinerja dan menerapkan RSK (rencana sasaran kerja) dengan penyusunan *pipe-line* bisnis dan evaluasi terhadap realisasi *pipelite*.
- 3) Produk & Mitigasi : Optimalisasi produk - produk bisnis berbasis kolateral, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan penjamin kredit sebagai *second way out*, meningkatkan *trickledown* bisnis dari debitur – debitur menengah dan menetapkan kebijakan wilayah pelayanan bisnis di seluruh unit kerja.

Selain itu, pengembangan bisnis ritel lainnya yang masih merupakan bagian dari bisnis ritel adalah

Kredit Program, dengan strategi pengembangan sebagai berikut :

- 1) Kerjasama pembiayaan plasma dengan Perusahaan inti yang telah menjadi Debitur Perseroan.
- 2) Kerjasama pembiayaan plasma dengan Perusahaan BUMN (PTPN dan lain-lain)
- 3) Kerjasama pembiayaan plasma dengan Perusahaan swasta besar (Asian Agri Group dan lain-lain).
- 4) Melakukan perluasan/ekspansi pembiayaan diluar komoditi perkebunan, seperti pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan dengan mempertimbangkan potensi pasar dan kompetensi SDM.
- 5) Optimalisasi target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersubsidi dari Pemerintah.

(ii) Bisnis Konsumer

- 1) Optimalisasi produk-produk kredit berbasis *collateral* (Agrogriya, Agromobil, KMG dan lain-lain).
- 2) Menjalani kerjasama dengan *developer* yang memiliki bonafiditas yang baik.
- 3) Optimalisasi pelayanan kredit karyawan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menjadi Debitur Perseroan.
- 4) Membuka jaringan bisnis dengan instansi-instansi yang memiliki jaringan di unit kerja Perseroan melalui prakarsa Perjanjian Kerja Sama (PKS) induk di kantor pusat untuk kemudian dapat di eksekusi oleh unit kerja Perseroan di lapangan (misalnya : Askrido, Jamsostek dan lain-lain).
- 5) Melakukan pemasaran kredit konsumer kepada anak (grup) usaha BRI.
- 6) Potensi penyaluran kredit karyawan kepada perusahaan multifinance besar dengan rating baik dan telah menjadi Debitur Perseroan.
- 7) Pemasaran intensif produk kredit karyawan produktif kepada perusahaan mitra, BUMN dan perusahaan swasta besar lainnya.

Segmen Bisnis Umum

Perseroan selain mengembangkan pembiayaan agrobisnis yang menjadi fokus usaha, juga mengembangkan bisnis umum dengan fokus pada bisnis umum yang terselektif dan tahan terhadap guncangan bisnis. Pengembangan bisnis umum dimulai pada tahun 2012, bisnis umum meliputi pembiayaan kepada *multifinance*, rekanan BUMN, sektor perdagangan, jasa dan pariwisata (hotel) serta lain-lain dimana dalam pelaksanaannya ekspansi kredit bisnis umum juga disinergikan dengan strategi dalam rangka mendukung pengembangan bisnis ritel dengan cara membuka pada peluang *tricle down* bisnis bank baik funding dan maupun lending. Secara strategis pengembangan bisnis Perseroan maka diharapkan porsi bisnis umum dapat mewujudkan pencapaian maksimal sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Selain itu, juga dikembangkan pembiayaan kepada Bank Perkreditan Rakyat dengan pola *linkage* program.

Kontribusi profitabilitas Bisnis Umum Perseroan selama 6 (enam) bulan dan 2 (dua) tahun terakhir sesuai dengan *trend* tingkat suku bunga pasar, dengan produktifitas per 30 Juni 2016 sebesar 12,66%, Desember tahun 2015 sebesar 12,70 %, Desember tahun 2014 sebesar 12,23%. Produktifitas tersebut seiring dengan perkembangan *Cost of Fund* Perseroan sehingga bunga kredit untuk segmen menengah bisa bersaing dengan bank lainnya.

Prospek Bisnis

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia Nasional berada pada kisaran 5,1% - 5,6% di tahun 2016, yang didukung oleh konsumsi domestik dan investasi yang tetap kuat. Selain itu pertumbuhan kelas menengah Indonesia dan peningkatan komposisi penduduk pada usia produktif memberikan optimisme akan arah perkembangan dan prospek bisnis perbankan Nasional. Memperhatikan perkembangan tersebut, Perseroan akan mengupayakan pengelolaan jasa keuangan dengan lebih baik dan kuat terutama dalam permodalan. Selain fokus pada bidang usaha agrobisnis, Perseroan juga akan bergerak di usaha bisnis umum serta usaha kecil dan menengah (UKM).

Dari sisi usaha penghimpunan dana, Perseroan menetapkan arah dengan upaya mengurangi risiko konsentrasi yang saat ini masih tergantung pada beberapa deposit besar dengan cara mengembangkan sumber dana ritel yang antara lain melalui penambahan jaringan kantor pelayanan dengan membuka kantor cabang dan cabang pembantu di sentra-sentra bisnis.

Dalam pengembangan bisnis, strategi perusahaan juga memperhatikan kondisi dan potensi daerah pengembangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kondisi perekonomian global yang masih berfluktuatif dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian domestic.
- b. Persaingan ketat di sektor perbankan dari sisi *size* (modal dan jaringan) serta *pricing* (produk penghimpunan dana dan penyaluran kredit).
- c. Munculnya alternative investasi yang lebih menarik seperti asuransi unit linked, reksadana, ORI dan lain-lain.
- d. Bank – bank lain yang berminat untuk masuk dalam bidang usaha yang sama karena masih besarnya *margin* dan *opportunity*.

Bisnis Treasury

Untuk memaksimalkan pengelolaan sumber dan penggunaan dana bank agar risiko *assets liabilities gap* dapat terkendali, maka Perseroan akan menetapkan suatu strategi yang lebih baik untuk mengembangkan dan meningkatkan pengelolaan ALM (*Asset Liabilities Management*).

Selain itu Perseroan juga akan mengembangkan metode dan kebijakan *pricing* suku bunga yang sudah ada saat ini yaitu kebijakan penerapan suku bunga yang berhubungan dengan kondisi masing-masing unit kerja agar lebih variatif sehingga diharapkan produk-produk bisnis Perseroan dapat lebih berkembang.

Selain itu Bagian *Treasury* juga mengembangkan struktur organisasi yaitu menambah fungsi Manajemen Likuiditas dan *Marketing Treasury Product* yang berguna untuk menunjang bisnis di masa yang akan datang selain pengelolaan likuiditas. Hal ini untuk menunjang bisnis *Treasury* ke depannya selain pengelolaan likuiditas. *Treasury* juga diharapkan dapat berfungsi penuh sebagai unit bisnis dalam peningkatan di *fee based income*.

Selama sampai dengan 30 Juni 2016 upaya menuju unit bisnis dapat dilakukan dengan:

1. Mengupayakan minimalisasi biaya dana dengan optimalisasi penempatan pada *secondary reserve*;
2. Melakukan transaksi surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah (SUN dan ORI) secara selektif berdasarkan tenor dan *yield* yang diberikan dan disesuaikan dengan kondisi likuiditas. Pembelian ini dilakukan selain likuid, surat berharga tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan kliring BI dalam bentuk *prefund* dan untuk memenuhi GVM Sekunder.

Kontribusi *Treasury* sampai dengan 30 Juni 2016 cukup baik, dengan menyumbang pendapatan bunga yang berasal dari efek-efek sebesar Rp21,32 miliar, penempatan pada BI dan bank lain sebesar Rp11,97 miliar dan giro pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp1,15 miliar, serta pendapatan operasional selain bunga yang berasal dari keuntungan penjualan dan kenaikan surat berharga sebesar Rp22,60 miliar.

Mempertimbangkan prospek ke depan, *Treasury* akan mengembangkan:

1. transaksi obligasi dalam bentuk mata uang dolar AS melalui pembukaan *Custody Euro Clear*, selain *trading* obligasi dalam bentuk Rupiah.
2. Melakukan kerja sama dengan beberapa Manajer Investasi/Aset Manajemen untuk mengoptimalkan dana;

Dana dan Jasa

Dengan semakin meningkatnya persaingan di industri perbankan dalam memperebutkan dana pihak ketiga (DPK) serta banyaknya program yang dikeluarkan oleh bank pesaing untuk memperluas pangsa pasar Dana Pihak Ketiga, maka Perseroan akan menerapkan strategi pemasaran produk dana yang disesuaikan dengan perilaku masyarakat yang dinamis.

Rencana tahun 2016 diarahkan dalam rangka upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan struktur pendanaan Perseroan dengan berbasis ritel (*mass banking*) sebagai *buffer* dana pihak ketiga (DPK) dalam rangka mendukung *liabilities* dan meningkatkan *competitive position* serta *market share* pertumbuhan DPK secara optimal. Oleh karena itu fokus utama pengembangan dan strategi bisnis yang dilakukan adalah:

- a. Melakukan pengembangan fitur tabungan dengan cara modifikasi fitur yang telah ada dengan cara menyesuaikan dan memperhatikan kebutuhan serta karakteristik nasabah.
- b. Melakukan program pemasaran secara terpadu di seluruh unit kerja Bank BRI AGRO.
- c. Meningkatkan akses layanan *e-channel* dengan bekerjasama dengan perusahaan induk dalam memanfaatkan ATM guna memberikan kemudahan, kenyamanan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Produk Tabungan

Tabungan BRI-AGRO

Tabungan BRI AGRO adalah tabungan konvensional yang menggunakan *system real time online* di seluruh Indonesia, sehingga nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan tunai di seluruh Satuan Kerja Perseroan dan dilengkapi dengan fasilitas Kartu ATM Bank BRI AGRO. Tabungan BRI-AGRO terutama diperuntukkan untuk Nasabah yang membuka Tabungan secara kolektif misalnya untuk payroll gaji maupun untuk Nasabah yang terkait dengan kredit.

TabunganKu

Produk tabungan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia, termasuk Perseroan, untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabungan Infiniti

Tabungan Infiniti Bank BRI AGRO merupakan simpanan yang diluncurkan pada tanggal 8 Juli 2013 dengan *tagline* "Tabungan yang memberikan nilai lebih". Tabungan Infiniti Bank BRI AGRO dirancang khusus bagi nasabah yang sangat sensitif terhadap suku bunga sehingga nasabah dapat menikmati tingkat pengembalian yang optimal dengan keleluasaan sebuah tabungan.

Tabungan Multima

Tabungan Multima BRI AGRO merupakan tabungan berjangka yang dapat membantu nasabah dalam perencanaan keuangan pemenuhan kebutuhan masa depannya. Pada Tabungan Multima, nasabah diberikan keleluasaan penuh untuk menentukan besaran angsuran dan jangka waktu. Tabungan Multima lebih mengutamakan pengembalian manfaat dimasa depan dari dana yang disetorkan setiap bulannya dengan suku bunga yang bersaing.

Tabungan Simpel

Tabungan untuk pelajar / siswa Warga Negara Indonesia (WNI) yang diterbitkan oleh OJK dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Produk Giro

Giro BRI-AGRO

Giro Bank BRI AGRO (*Current Account*) adalah salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja selama jam kerja dengan menggunakan warkat cek dan bilyet giro.

Produk Deposito

Deposito Bank BRI AGRO

Deposito Bank BRI AGRO merupakan simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah dengan bunga menarik dan beragam keuntungan lainnya.

Produk Kredit

Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha untuk menambah modal kerja usaha sehingga dapat membantu dalam pembiayaan pembelian bahan baku, biaya produksi dan pemasaran serta pengelolaan piutangnya dengan jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit untuk pembelian barang modal seperti tanah, mesin/peralatan produksi, pembuatan bangunan pabrik baik untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atas proyek yang sudah ada maupun pendirian proyek baru

Kredit Usaha Kecil (KUK)

KUK adalah kredit yang diberikan ke debitur usaha kecil dengan plafon Rp250 juta untuk membiayai usaha produktif dan kredit yang diberikan ke debitur usaha kecil dengan Rp25 juta tanpa melihat tujuan penggunaan (produktif/konsumtif).

Kredit Konsumer (KK)

KK adalah kredit yang diberikan untuk tujuan konsumtif.

B. TINGKAT KESEHATAN BANK

Kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko dilaksanakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.04/POJK.03/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko adalah hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian seperti: Profil Risiko Perseroan, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan. Sehingga akan menghasilkan peringkat tingkat kesehatan Perseroan berdasarkan risiko.

Tingkat kesehatan Perseroan secara keseluruhan mempunyai peringkat komposit 2 (sehat) yang tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) berdasarkan risiko posisi 30 Juni 2016, sebagai berikut:

a. Analisis Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Mekanisme penilaian Profil Risiko, penetapan tingkat Risiko dan penetapan peringkat profil Risiko mengacu dan diselaraskan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko atau *Risk Based Bank Rating* (RBBR) serta ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan lainnya yang berlaku. Laporan ini merupakan adanya perubahan format dari kertas kerja yang kami sajikan sehingga dengan seiring perkembangan perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan, upaya tersebut akan kami lakukan dengan selalu melakukan *update* dan *review* kertas kerja profil risiko Perseroan, tentunya dengan saran, kritik dan arahan dari seluruh komponen yang terkait mulai dari unit bisnis, pejabat eksekutif, Dewan Komisaris, Direksi, maupun arahan dari bimbingan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di Indonesia.

Secara keseluruhan Peringkat Profil Risiko Perseroan dengan skala usaha yang dimiliki saat ini terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit (1); Risiko Pasar (2); Risiko Likuiditas (3); Risiko Operasional (4); Risiko Hukum (5); Risiko Strategik (6); Risiko Kepatuhan (7); dan Risiko Reputasi (8), dalam penilaian kami selama periode 30 Juni 2016 penilaian peringkat Profil Risiko dengan peringkat 3 "MODERATE" dengan tingkat risiko *inherent* dinilai 3 "MODERATE", dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) adalah "FAIR".

b. Analisis mengenai Good Corporate Governance (GCG)

Selama Semester I Tahun 2016 berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) sudah dilakukan dengan predikat "baik" dan nilai komposit "2", sehingga kami simpulkan hasil matrik dalam penilaian pada Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko ini, masuk katagori matrik peringkat "2", artinya mencerminkan bahwa Manajemen Perseroan telah

melakukan penerapan GCG secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan atas prinsip-prinsip dasar GCG seperti tertuang dalam Kertas Kerja *Self Assessment*. GCG dan apabila terdapat adanya suatu kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Perseroan.

c. Analisis mengenai Rentabilitas

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Rentabilitas di Perseroan Selama Semester I Tahun 2016 adalah memadai. Pencapaian laba sebesar 120,12% dari RBB dan mendukung pertumbuhan permodalan bank sehingga peringkat rentabilitas diperoleh nilai "2" (memadai), dengan pertimbangan karena seluruh atau sebagian besar sudah memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sudah memadai.
- 2) Sumber utama rentabilitas berasal dari sumber pendapatan utama (*core earnings*) dari aktivitas perkreditan, dominan.
- 3) Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings*, cukup stabil.
- 4) Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba di masa *rating* tinggi, didukung oleh kecenderungan (*trend*) laba yang terus meningkat.

d. Analisis mengenai Permodalan

Selama semester I Tahun 2016 Perseroan memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai dengan nilai "2" yang relatif terhadap profil risikonya. Hal tersebut disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Perseroan.

Hal ini berdasarkan penilaian sebagai berikut:

a. Kecukupan permodalan:

- 1) Perseroan memiliki tingkat permodalan di atas persyaratan minimum dan dapat mengcover terhadap seluruh risiko yang dihadapi.
- 2) Kualitas komponen permodalan Perseroan pada umumnya baik, permanen dapat menyerap kerugian.

b. Pengelolaan permodalan:

Perseroan telah memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik yang dilakukan perhitungannya setiap bulannya. Perhitungan permodalan per 30 Juni 2016 sebagai berikut :

- 1) Rasio CAR (Tier 1) sebesar 18,62%
- 2) Rasio CAR (Tier 2) sebesar 1,02%
- 3) Rasio CAR (Total) sebesar 19,64%

Kondisi kesehatan perbankan selalu dimonitor oleh Bank Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko dilaksanakan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.04/POJK.03/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko adalah hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian seperti: Profil Risiko Perseroan, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan. Sehingga akan menghasilkan peringkat tingkat kesehatan Perseroan berdasarkan risiko.

Tingkat kesehatan Perseroan secara keseluruhan mempunyai peringkat komposit 2 (sehat) yang tercermin dari keempat faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank (TKB) berdasarkan risiko posisi 30 Juni 2016, sebagai berikut:

e. Analisis Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 telah dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Mekanisme penilaian Profil Risiko, penetapan tingkat Risiko dan penetapan peringkat profil Risiko mengacu dan diselaraskan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan Risiko atau *Risk Based Bank Rating* (RBBR) serta ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan lainnya yang berlaku. Laporan ini merupakan adanya perubahan format dari kertas kerja yang kami sajikan sehingga dengan seiring perkembangan perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan, upaya tersebut akan kami lakukan dengan selalu melakukan *update* dan mereview kertas kerja profil risiko Perseroan, tentunya dengan saran, kritik dan arahan dari seluruh komponen yang terkait mulai dari unit bisnis, pejabat eksekutif, Dewan Komisaris, Direksi, maupun arahan dari bimbingan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di Indonesia.

Secara keseluruhan Peringkat Profil Risiko Perseroan dengan skala usaha yang dimiliki saat ini terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit (1); Risiko Pasar (2); Risiko Likuiditas (3); Risiko Operasional (4); Risiko Hukum (5); Risiko Strategik (6); Risiko Kepatuhan (7); dan Risiko Reputasi (8), dalam penilaian kami selama periode 30 Juni 2016 penilaian peringkat Profil Risiko dengan peringkat 3 "MODERATE" dengan tingkat risiko *inherent* dinilai 3 "MODERATE", dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) adalah "FAIR".

f. Analisis mengenai Good Corporate Governance (GCG)

Selama Semester I Tahun 2016 berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) sudah dilakukan dengan predikat "baik" dan nilai komposit "2", sehingga kami simpulkan hasil matrik dalam penilaian pada Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko ini, masuk katagori matrik peringkat "2", artinya mencerminkan bahwa Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan atas prinsip-prinsip dasar GCG seperti tertuang dalam Kertas Kerja *Self Assessment*. GCG dan apabila terdapat adanya suatu kelemahan yang tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Perseroan.

g. Analisis mengenai Rentabilitas

Berdasarkan hasil penilaian terhadap Rentabilitas di Perseroan Selama Semester I Tahun 2016 adalah memadai. Pencapaian laba sebesar 120,12% dari RBB dan mendukung pertumbuhan pemodalannya bank sehingga peringkat rentabilitas diperoleh nilai "2" (memadai), dengan pertimbangan karena seluruh atau sebagian besar sudah memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kinerja Perseroan dalam menghasilkan laba (rentabilitas) sudah memadai.
- 2) Sumber utama rentabilitas berasal dari sumber pendapatan utama (*core earnings*) dari aktivitas perkreditan, dominan.
- 3) Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings*, cukup stabil.
- 4) Kemampuan laba dalam meningkatkan pemodalannya dan prospek laba di masa *rating* tinggi, didukung oleh kecenderungan (*trend*) laba yang terus meningkat.

C. PERSAINGAN USAHA

Perseroan menghadapi persaingan dalam seluruh lini bisnis yang dijalani. Pesaing utama Perseroan adalah bank-bank domestik dan dalam cakupan yang lebih kecil yaitu bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Sebagai akibat dari krisis keuangan global, persaingan untuk mendapatkan pendanaan khususnya pendanaan ritel yang menawarkan biaya pendanaan yang lebih murah menjadi semakin intensif. Perseroan bersaing dengan bank-bank lain terutama dalam hal *pricing*/bunga. Beberapa pesaing Perseroan yang lebih besar dibandingkan Perseroan, memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya yang lebih besar dan memiliki cabang dan jaringan ATM yang lebih luas. Per 30 Juni 2016, jumlah tabungan dan giro Perseroan dibandingkan dengan rasio total Dana Pihak Ketiga Perseroan adalah sebesar 13,37%.

Sebagai tambahan, Perseroan secara tidak langsung menghadapi persaingan dari berbagai jenis institusi/lembaga jasa keuangan. Pada tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia telah menghapus batas kepemilikan bank asing dan mengizinkan bank-bank asing membuka kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank-bank domestik dan asing yang telah dan baru beroperasi, yang mana banyak dari bank asing tersebut menerapkan kerjasama *joint venture* atau investasi di bank-bank domestik, mengakibatkan dampak

negatif bagi kondisi operasional dan keuangan Perseroan.

Karena pembangunan dan reformasi sektor keuangan Indonesia masih terus berlanjut, Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau kredit dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan ini akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan Perseroan dan banyak lembaga keuangan ini juga yang memiliki ikatan kepada Pemerintah atau grup bisnis besar dengan sumber daya finansial yang lebih besar.

Posisi Perseroan dalam industri (pangsa pasar yang dikuasai)

Dalam Industri Perbankan, Perseroan dikategorikan sebagai Bank dalam BUKU II berdasarkan modal inti yang dimiliki oleh Perseroan, sedangkan dari sisi pasar Perseroan termasuk bank yang memposisikan sebagai bank fokus yaitu fokus dalam pembiayaan usaha pertanian atau agribisnis. Namun demikian sebagai langkah penyebaran risiko Perseroan membiayai usaha diluar agribisnis.

Saat ini, pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia masih dibawah 1% baik untuk DPK maupun kredit per 30 Juni 2016. Namun, Perseroan melihat peluang untuk meningkatkan pangsa pasar menjadi lebih tinggi dengan memperbanyak jaringan kantor cabang.

(dalam miliar Rupiah)

KETERANGAN	PASAR	PERSEROAN	PANGSA PASAR
Kredit	4.200.214	7.054	0,168%
DPK	4.574.671	7.692	0,156%

(Sumber : Statistik Otoritas Jasa Keuangan, Juni 2016)

Perseroan mempunyai ceruk pasar di bidang agribisnis yang telah ditekuni selama 26 tahun. Hal ini memberikan keunggulan akan kemampuan Perseroan dalam mengelola portofolio kredit di bidang pertanian yang relatif spesifik.

Keunggulan lain yang sangat penting adalah kedekatan Perseroan dengan komunitas usaha pertanian yang sudah terjalin sangat panjang, terutama dengan PT Perkebunan Nusantara I s/d XIV yang secara tidak langsung turut serta membidani kelahiran Perseroan.

Upaya Perseroan dalam menghadapi persaingan industri

Perseroan memanfaatkan kemampuan dan pengalaman dalam mengelola nasabah usaha bidang agribisnis. Selain itu, dalam menghadapi persaingan usaha yang sangat ketat Perseroan senantiasa berinovasi dengan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan agribisnis seperti, produk yang dapat dipergunakan untuk rencana '*replanting*' atas perkebunan dan produk persiapan pensiun bagi karyawan di bidang perkebunan. Selain itu, arah pengembangan jaringan kantor Perseroan dikembangkan pada sentra agribisnis, seperti di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi selain di Pulau Jawa.

IX EKUITAS

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan posisi Ekuitas Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Posisi Ekuitas Perseroan untuk untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016, dan periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2015 bersumber dari laporan keuangan audit Perseroan.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015 dan 2014 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan ditandatangani oleh Yasir, Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703 dengan opini bahwa Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan pada tanggal-tanggal 30 Juni 2016, 31 Desember 2015 dan 2014, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	30 Juni 2016	31 Desember 2015	31 Desember 2014
EKUITAS			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.147.971.570	1.147.971.570	745.078.118
Tambahan Modal Disetor	75.915.828	75.915.828	77.116.982
Kerugian yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual-setelah Pajak Tangguhan	(1.714.889)	(22.727.337)	(7.121.572)
(Kerugian) Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti -setelah Pajak Tangguhan	(2.433.294)	(785.868)	1.984.870
Cadangan Khusus	116.559	116.559	116.559
Cadangan Umum	5.752.647	3.337.890	2.097.868
Laba Ditahan	177.556.846	148.583.783	75.408.037
Ekuitas Neto	1.403.165.267	1.352.412.425	894.680.862

Setelah PMHMETD sebanyak-banyaknya 3.845.996.122 (tiga miliar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam seratus dua puluh dua) saham baru yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, sehingga seluruhnya sebanyak-banyaknya berjumlah Rp 499.979.495.860,- (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh Rupiah). Diasumsikan bahwa pada tanggal 7 Desember 2016 seluruh pemegang saham telah mengambil seluruh saham yang ditawarkan secara proporsional maka posisi jumlah modal ditempatkan dan disetor per tanggal 7 Desember 2016 menjadi sejumlah 15.325.711.820 (lima belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Dengan demikian jumlah saham modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan menjadi sebesar Rp1.532.571.182.000,- (satu triliun lima ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh dua ribu Rupiah).

Berikut ini adalah tabel proforma ekuitas pada tanggal 20 Desember 2016 apabila PMHMETD dan seluruh HMETD telah selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2016 dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Kerugian yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual-setelah Pajak Tangguhan	(Kerugian) Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti -setelah Pajak Tangguhan	Cadangan Khusus	Cadangan Umum	Laba Ditahan	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2016	1.147.971.570	75.915.828	(1.714.889)	(2.433.294)	116.559	5.752.647	177.556.846	1.403.165.267
Perubahan Ekuitas seandainya PMHMETD sejumlah 3.845.996.122 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp130,- setiap saham	384.599.612	115.379.884	-	-	-	-	-	-
Proforma Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2016 setelah PMHMETD dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham	1.532.571.182	191.295.712	(1.714.889)	(2.433.294)	116.559	5.752.647	177.556.846	1.843.144.763

Selanjutnya dalam PMHMETD ini Perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 616.908.103 (enam ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus tiga) Waran Seri II, dimana setiap 1 Waran Seri II dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham. Dengan demikian dengan asumsi seluruh Waran Seri II dikonversi menjadi saham baru Perseroan maka modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan menjadi sebesar 15.942.619.923 (lima belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga) saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham. Dengan demikian jumlah saham modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan menjadi sebesar Rp1.594.261.992.300,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh empat miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus Rupiah).

Berikut ini adalah tabel proforma ekuitas pada tanggal 11 Juni 2018 apabila Waran Seri II dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2018 dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp130,- (seratus tiga puluh Rupiah) adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Kerugian yang Belum Direalisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek-efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual-setelah Pajak Tangguhan	(Kerugian) Keuntungan Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti -setelah Pajak Tangguhan	Cadangan Khusus	Cadangan Umum	Laba Ditahan	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 30 Juni 2016	1.147.971.570	75.915.828	(1.714.889)	(2.433.294)	116.559	5.752.647	177.556.846	1.403.165.267
Perubahan Ekuitas seandainya PMHMETD sejumlah 3.845.986.122 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp130,- setiap saham	384.599.612	115.379.884	-	-	-	-	-	
Perubahan Ekuitas seandainya Waran Seri II sejumlah 616.908.103 di konversi menjadi Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp130,- setiap saham	61.690.810	18.507.243						
Proforma Ekuitas pada tanggal 11 Juni 2018 setelah Konversi Waran Seri II dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham	1.594.261.992	209.802.955	(1.714.889)	(2.433.294)	116.559	5.752.647	177.556.846	1.983.342.816

X KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, pembagian dividen harus disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPST.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen tersebut akan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan pasal 24 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diatur dalam hal Perseroan diatur bahwa dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan telah memiliki saldo laba positif maka kebijakan dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain, dengan demikian Kebijakan Dividen yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS.

Manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen apabila terdapat surplus kas dari kegiatan operasional setelah dana tersebut disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan memiliki kemampuan atau akan membayar dividen atau keduanya pada masa yang akan datang. Apabila diperlukan, dari waktu ke waktu Perseroan dapat tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan seperti dalam hal Perseroan membutuhkan dana untuk melakukan pengembangan usaha atau pemenuhan kecukupan modal atau akuisisi bisnis baru.

Perseroan hanya akan membayar dividen dari laba bersih berdasarkan hukum di Indonesia dan akan membayarkan dividen secara tunai, jika ada, dalam mata uang Rupiah.

Berikut merupakan keterangan mengenai Saldo Negatif Perseroan untuk tahun buku 2011 sampai dengan 2012, dengan demikian Perseroan tidak dapat membagikan dividen dari tahun 2011 sampai dengan 2012.

(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember				
	2015	2014	2013	2012	2011
Dividen Tunai	15.615.422	6.076.112	10.278.181	-	-
Persentase	19,40%	10,23%	19,60%	-	-
Laba Tahun Berjalan	80.491.880	59.407.934	52.439.708	33.026.578	32.856.381
Saldo Laba	152.038.232	77.622.464	28.492.711	(15.214.568)	(48.241.146)

Perseroan tidak memiliki pembatasan (*negative covenants*) sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (bertaku efektif 1 Januari 2009) mengenai Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("UUPh No. 36/2008), penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK/03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di bursa efek di Indonesia.

Adapun penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa dividen merupakan objek pemotongan pajak yang dipotong oleh pihak yang wajib membayarnya dari jumlah bruto sesuai dengan peraturan yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final apabila penerima dividen adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (2c) UUPh No. 36/2008 dan Peraturan Pemerintah RI No.19/2009);
2. Sebesar 15% (lima belas persen) apabila penerima dividen adalah wajib pajak dalam negeri (selain Wajib Pajak orang Pribadi) namun apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya (Pasal 23 ayat (1) huruf a dan ayat (1a) UUPh No. 36/2008);

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 23 pada ayat (1) UUPh No.36/2008, tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri sebagai berikut:

- o Dividen yang dibayar kepada bank yang berkedudukan di Indonesia
 - o Dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, sebagaimana tersebut di atas;
 - o Dividen yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di BEI.
3. Sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") apabila penerima dividen adalah Wajib Pajak luar negeri. Tarif sesuai P3B dikenakan dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi Pasal 26 UUPh No.36/2008.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di BEI (seri PPh Umum

No.3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan PPh atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di BEI), ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Untuk transaksi penjualan saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jual saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terhutang dapat dilakukan oleh masing-masing pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka perhitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 17 tahun 2000.

Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, tentang Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak dari Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman antara lain dalam efek yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, maka Bunga Obligasi dan Dividen baik dari saham atau sekuritas baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terhutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam Negeri Orang Pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong pajak penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas Bukti HMETD, apabila Pemegang Saham menjual Bukti HMETD, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan. Penghasilan dari penjualan Bukti HMETD yang diterima oleh Pemegang Saham Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (*withholding tax*) di Indonesia apabila Bukti HMETD dibeli dan dibayar oleh orang pribadi penduduk Indonesia atau mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan bentuk usaha tetap.

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan bea materai sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000,00 (tiga ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai kurang dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan bea materai.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan atas pemeriksaan pajak tahun 2010 menerima 19 Surat Ketetapan Pajak (SKP). Dalam rentang tahun 2011 hingga 2014 terdapat 18 SKP yang telah diselesaikan baik setelah menerima keputusan banding yang diterima sebagian ataupun dibayar secara penuh. Sampai dengan saat ini, Perseroan masih belum menerima 1 putusan pengadilan atas SKP PPh Pasal 4 ayat (2) No. 00072/204/08/062/10. Selain itu Perseroan menerima 12 SKP untuk PPh Pasal 4 ayat (2) untuk pemeriksaan tahun pajak 2012. Berdasarkan surat No. B.785/SK-KC/PKU/XI/2015 tanggal 4 November 2015 ke KPP Madya Pekanbaru, Perseroan menyatakan akan melunaskan hutang sebesar Rp3.322.101.355,- dengan mencicil selama 56 bulan sebesar Rp60.000.000,- per bulan. Saat ini Perseroan sedang menunggu keputusan salah satu pihak Bank lain yang mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas kasus yang sama. Apabila hasil keputusan banding dimenangkan wajib pajak (Bank Lain), maka akan menjadi dasar Perseroan untuk mengajukan pembatalan SKP tersebut. Taksiran penghasilan kena pajak tahun 2015 dan 2014 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang dilaporkan Perseroan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Per 30 Juni 2016, Perseroan telah menyetorkan dan melaporkan seluruh kewajiban pajaknya sebagai berikut:

*(dalam ribuan
Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan Pasal 21	4.235.366
Pajak Penghasilan Pasal 23	236.484
Pajak Penghasilan Pasal 25	3.873.530
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	6.054.184
Pajak Pertambahan Nilai	480

CALON PEMESAN HMETD DALAM PMHMETD YANG DISERTAI WARAN SERI II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD, WARAN SERI II YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD INI.

XII LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : PRISMA & Co Advocate, Legal and Tax Consultant

Alamat : Cyber 2 Tower, 22nd Floor,
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, No.13
Jakarta 12950
Telp. : (+62) (21) 29021315 (hunting)
Fax. : (+62) (21) 29021318

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No. STTD : 104/BL/STTD-KH/2011, tanggal 11 April 2011 atas nama
Tjandra Putra
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran
dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.
KEP.01/HK-HPM/2005 tanggal 18 Februari 2005

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. B.29/Dir.05/SKP/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

Tugas Pokok:

Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PMHMETD yang disertai Waran Seri II ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

**Akuntan Publik : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
(the Indonesian member firm of Ernst & Young Global Limited)**

Gedung Bursa Efek Indonesia Menara 2, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190
Telp. : (62-21) 5289 5000
Fax. : (62-21) 5289 4100

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia
No. Institut Akuntan Publik Indonesia : Registrasi Akuntan Publik No. AP.0703
atas nama Yasir.
No. STTD : 18/BL/STTD-AP/2006 tanggal 7 November 2006
Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. B.39/Dir.05/SKP/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016.

Tugas Pokok :

Menerbitkan kembali laporan auditor independen atas laporan keuangan, melakukan penelaahan (review) terhadap bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas dan membuat *comfort letter* berdasarkan hasil audit terhadap laporan keuangan.

Notaris : Kantor Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H

Alamat : Cyber 2 Tower, 22nd Floor,
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5, No.13 - Jakarta 12950
Telp. : (62) (21) 29021312
Fax. : (62) (21) 29021314
No. Ikatan Notaris Indonesia : 036/Pengda/Suket/III/2010 a/n Mochamad Nova Faisal, SH.
No. STTD : 398/BLS/STTD-N/2010 tanggal 8 Desember 2010
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Tugas Pokok :

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PMHMETD yang disertai Waran Seri II ini antara lain adalah Membuat akta-akta perjanjian dan membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham sehubungan dengan PMHMETD yang disertai Waran Seri II ini sesuai dengan peraturan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. B.28/Dir.05/SKP/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016.

**Biro Administrasi : PT Datindo Entrycom
Efek (BAE)**

Alamat : Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220 – Indonesia
No. Telp : +62 21 5709009
No. Fax : +62 21 5709026
No. STTD : Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1995.
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD yang disertai Waran Seri II ini, sesuai Peraturan Pasar Modal yang berlaku, antara lain menentukan Daftar Pemegang Saham Perseroan (DPS) yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD serta Waran Seri II dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan Waran Seri II, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham kepada Pemesan serta menyusun laporan PMHMETD sesuai peraturan yang berlaku.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No.B.46/Dir.01/SKP/IX/2016 tanggal 30 September 2016.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PUT VI Perseroan dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

XIII TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD Perseroan, sesuai dengan Akta no 41 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dan Akta nomor 22 tanggal 18 November 2016 tentang Adendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri II Dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, SH. Notaris di Kota Jakarta Selatan.

a. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan) saham Perseroan akan memperoleh 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham HMETD dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan dengan Harga Pelaksanaan Rp 130,- (seratus tiga puluh Rupiah) per saham.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 7 Desember 2016.

b. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik ke dalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 7 Desember 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing_masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 8 Desember 2016 dengan membawa:

- 1) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- 2) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

c. **Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD**

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016.

Prosedur pelaksanaan :

- 1) Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository – Book Entry Settlement System* (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.
- 2) Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.
- 3) Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.
- 4) Pemegang HMETD yang melaksanakan HMETDnya dengan membayar harga pelaksanaan pada periode pelaksanaan berhak atas Waran Seri II dimana 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) saham hasil pelaksanaan HMETD akan memperoleh 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Waran Seri II yang akan didistribusikan mulai tanggal 9 Desember 2016 s/d 20 Desember 2016 ke sub rekening efek atas nama pelaksana HMETD.
- 5) Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

d. Pemesanan Saham Tambahan

- 1) Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) tambahan.
- 2) Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- 3) Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- 4) Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2016 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

e. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 21 Desember 2016 dengan

ketentuan sebagai berikut:

- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
- Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

f. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT VI yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai / cek / bilyet giro / pemindahbukuan / transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("Bank Perseroan") sebagai berikut:

Bank PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
Cabang Kantor Pusat Operasional (KPO)
No. Rekening : A/C. 0010-01-000156.99.9
Atas nama : PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk – PMHMETD 1

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 20 Desember 2016.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

g. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

h. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham dalam PMHMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham dalam PMHMETD akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

- Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat_syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;
- Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
- Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD ke saham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

i. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham HMETD tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

j. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan. Sedangkan Waran Seri II akan dikreditkan pada rekening efek pada tanggal yang sama dengan tanggal dikreditkan saham hasil pelaksanaan HMETD.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham HMETD tambahan dan Waran Seri II akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 21 Desember 2016. Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau

- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

k. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam HMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD yang tidak teralokasi pada pemesan saham, maka saham-saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari dalam portepel.

XIV PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PUT VI ini melalui iklan di surat kabar.

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 8 Desember 2016. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 8 Desember 2016 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220
Telp. 021 – 5709009
Fax. 021 – 5709026

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 7 Desember 2016 pukul 16.00 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Datindo Entrycom sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.